

Metamorfosa INOVASI DAERAH

Hasil Monitoring dari Evaluasi Kinerja Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan untuk Otonomi Awards 2012



FIPO



USAID

KINERJA

FAJAR



Metamorfosa INOVASI DAERAH

Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan untuk Otonomi Awards 2012



Diterbitkan Oleh:



FIPO

The Fajar Institute Of Pro Otonomi

Atas Kerja Sama:



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

KINERJA
Improving Public Services

FAJAR
Fajar-Piye



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan

Metamorfosa Inovasi Daerah

Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
untuk Otonomi Awards 2012

Penulis	Basir Kadir, A. Mattingaragau T., Dasman, Saiful Rijal Yunus, A. Risdawati AP, Ihsanul Amri
Editor	Sukriansyah S.Latief, Nurdin Tappa
Lay Out/Cover Design	Rahma WR/Norman
Penerbit	The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)
Atas Kerja Sama	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan- Harian Pagi Fajar-USAID Kinerja
Alamat Penerbit	Graha Pena Lt.4, Jl Urip Sumoharjo No.20, Makassar Telp. (0411)-3661928, Fax. (0411)-3661923 Website: www.fipofajar.org

Terbitan Pertama, September 2012
vii+154 halaman; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-602-95604-4-6

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
All rights reserved

Sambutan Direktur Utama Media Fajar Group

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas hadirnya buku ini ke tangan para pembaca sekalian. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah pelaksanaan penganugerahan trofi Otonomi Awards diselenggarakan, The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Olehnya itu, saya menyambut baik prakarsa FIPO tersebut, karena hasil monev ini sangat penting mengingat informasi yang ditemukan selama monev berkolerasi dengan upaya-upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan monev sebagai rangkaian Otonomi Awards yang dilaksanakan FIPO merupakan kegiatan tahunan. Konsistensi dan keberlanjutan monev dan Otonomi Awards dalam empat tahun terakhir adalah bukti komitmen PT Media Fajar tetap terjaga dalam mengawal implementasi otonomi daerah.

Berdiri sejak 16 Juni 2008, FIPO melakukan monev dalam bentuk penelitian dan penilaian program-program inovatif kabupaten/kota. Program-program yang dinilai dalam tahun-tahun sebelumnya mencakup kategori: pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi lokal, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, partisipasi publik, akuntabilitas publik, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2012 ini, FIPO menambah satu parameter khusus sekaligus sebagai kategori penilaian yaitu pengentasan kemiskinan. Kabupaten/kota dengan program paling inovatif dari 10 kategori itu akan anugerahi trofi Otonomi Awards sebagai apresiasi atas kinerja terbaiknya.

Konten buku ini terdiri atas metamorfosa otonomi daerah, hasil monev, analisis keberhasilan suatu kabupaten/kota meraih trofi, dan program-program best practices dan catatan seremonial puncak anugerah Otonomi Awards 2012. Pemuatan program-program peraih trofi tersebut dimaksudkan sebagai diseminasi informasi atas praktik cerdas tersebut sehingga nantinya memudahkan untuk dapat direplikasi.

Semoga buku ini memberi banyak manfaat, baik untuk penyelenggara pemerintahan maupun bagi seluruh stakeholders pembangunan. Selamat membaca!

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2012
PT Media Fajar

H. Syamsu Nur
Direktur Utama



Daftar Isi

Sambutan Direktur Utama Media Fajar Group	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Bab 1. Pendahuluan	1
■ Metamorfosa Otonomi Daerah	3
■ Otonomi di Tengah Kompleksitas Tatanan Global	7
■ Otonomi Awards, Festival para Juara	19
Bab 2. Catatan Singkat Kemenangan Daerah	23
■ Otonomi Awards untuk Daerah Terbaik	25
■ Ranking dan Peraih Otonomi Awards 2012	29
Bab 3. Best Practices Otonomi Awards 2012	89
■ Berawal dari Keterbatasan	91
■ Kuatkan Modal Kerja tanpa Bunga	95
■ Berdayakan Masyarakat Melalui Koperasi Sistem Syariah	99
■ Patta'ba Sekolah Unggulan Berbasis ESQ	103
■ Parisai Panjaga, Solusi Kesehatan Lingkungan	107
■ Tak Ada Kata Sulit dalam Pelayanan	111
■ Transformasi Musrembang, Khasanah Baru Metode Perencanaan	115
■ Ombudsman, Awasi Pelaksanaan Layanan Publik	119
■ Pokmaswas Bukan Sekadar Penjaga Pantai	123
■ Entaskan Kemiskinan, Maksimalkan Potensi Masyarakat	127
■ Kebijakan Pagu ADD, Inspirasi Pertumbuhan Ekonomi Desa	131



Bab 4. Penutup	135
■ Seminar Nasional	137
■ Semarak Malam Anugerah Otonomi Awards 2012	145
Tentang Penulis/Editor	151

Daftar Tabel

1	Tingkatan Inovasi Program Pembangunan Pemerintah Daerah	16
2	Nomine dan Peraih OA 2012 Parameter Kehidupan Ekonomi Lokal	26
3	Nomine dan Peraih OA 2012 Parameter Pelayanan Publik	27
4	Nomine dan Peraih OA 2012 Performa Politik Lokal	27
5	Nomine dan Peraih OA 2012 Pengelolaan Lingkungan Hidup	28
6	Nomine dan Peraih OA 2012 Kategori Pengentasan Kemiskinan dan Inspiratif	28
7	Peraih Grand Award OA 2012	28
8	Isu Strategis Kategori Pertumbuhan Ekonomi	30
9	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Pertumbuhan Ekonomi	34
10	Isu Strategis Kategori Pemerataan Ekonomi	36
11	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Pemerataan Ekonomi	39
12	Isu Strategis Kategori Pemberdayaan Ekonomi	41
13	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Pemberdayaan Ekonomi	45
14	Isu Strategis Kategori Layanan Pendidikan	47
15	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Layanan Pendidikan	51
16	Isu Strategis Kategori Layanan Kesehatan	53
17	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Layanan Kesehatan	57
18	Isu Strategis Kategori Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan	59
19	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan	62
20	Isu Strategis Kategori Partisipasi Publik	64
21	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Partisipasi Publik	68
22	Isu Strategis Kategori Akuntabilitas Publik	70
23	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Akuntabilitas Publik	74
24	Indikator dan Isu Strategi Parameter Lingkungan Hidup	76
25	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Lingkungan Hidup	81
26	Indikator dan Isu Strategi Parameter Pengentasan Kemiskinan	83
27	Nilai Kabupaten/Kota Kategori Pengentasan Kemiskinan	87

Daftar Grafik

1	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Pertumbuhan Ekonomi	35
2	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Pemerataan Ekonomi	40
3	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Pemberdayaan Ekonomi	46
4	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Layanan Pendidikan	52
5	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Layanan Kesehatan	58
6	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan	63
7	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Partisipasi Publik	69
8	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Akuntabilitas Publik	75
9	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Lingkungan Hidup	82
10	Ranking Kabupaten/Kota Kategori Pengentasan Kemiskinan	88



Bab 1

Pendahuluan

Metamorfosa Otonomi Daerah•

Otonomi di Tengah
Kompleksitas Tatanan Global•

Otonomi Awards, Festival para Juara•



Metamorfosa Otonomi Daerah

KEBIJAKAN pembaharuan desentralisasi yang telah berlangsung selama 11 tahun belakangan, membawa spektrum baru pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Sebagai antitesa dari sentralisasi, otonomi daerah telah menjadi pilihan logis pemerintah keluar dari krisis multidimensi serta menjadi sebuah rekayasa sosial mengelola ragam potensi dan masalah daerah itu sendiri.

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pola desentralisasi pemerintahan telah diberlakukan sejak zaman Hindia Belanda maupun setelah masa kemerdekaan dengan warna dan ciri yang berbeda satu sama lain. Jauh sebelum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin terlaksananya desentralisasi pemerintahan melalui pasal 18 yang membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam provinsi, kabupaten dan kota untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Cikal bakal desentralisasi telah dimulai dari terbitnya undang-undang desentralisasi wet 1903 pada zaman hindia belanda.



Aturan ini memungkinkan adanya daerah otonom yang memiliki kewenangan mengurus keuangan sendiri, dikarenakan lambatnya proses pengambilan keputusan oleh pusat yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Artinya, Indonesia ditinjau dari segi geografis dan demografisnya tidak akan pernah cocok dikelola secara sentralistik. Rentang kendali yang terlalu jauh, permasalahan yang berbeda di setiap daerah adalah beberapa masalah mendasar yang dialami setiap daerah, sehingga pada dasarnya otonomi merupakan suatu *condition sine qua non* (kondisi yang tidak boleh tidak) bagi Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengemban tugas suci (*holy mission*) untuk membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensional, serta mampu menjadi sebuah rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, makmur dan sejahtera¹. Lahirnya Undang-undang ini juga memberi demarkasi yang jelas bagaimana desentralisasi dijalankan dengan otonomi yang nyata, tidak memiliki dua sisi seperti pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Dikatakan demikian karena selama masa pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik, pada bagian ujungnya telah menuai berbagai krisis. Dengan perkataan lain, masa depan bangsa akan tergantung pada bagaimana Daerah-daerah yang telah diberi kepercayaan untuk mengelola kewenangan luas, utuh dan bulat mampu berpikir secara strategis dan komprehensif.

Namun otonomi daerah sendiri bukan jaminan bahwa pemerintahan akan melahirkan cita-cita kesejahteraan yang dimanifestasikan dalam UUD. Otonomi daerah merupakan sebuah pintu gerbang yang membuka selubung gelap pola sentralistik, yang terbukti menciderai demokratisasi bernegara. Selain itu otonomi adalah jembatan yang akan menjadi jalan penghubung negara dengan cita yang diimpikan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dalam arti daerah melalui pemerintah daerahnya hanya meneruskan pola-pola dan cara berpikir lama yang terbukti distortif, mungkin saja akan terjadi krisis seri kedua yang disebabkan oleh salah urus daerah.

Dengan kewenangan yang luas, daerah mempunyai ruang yang sangat besar mengarahkan sendiri laju daerahnya. Kendalanya, apabila pemerintah daerah yang disertai mandat untuk menjalankan kewenangan masih meneruskan cara berpikir lama yang sifatnya cenderung merusak. Masih sangat susah untuk menghilangkan praktik-praktik menyimpang dari tata kelola pemerintahan. Terciptanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang ternyata ikut terdesentralisasi secara merata pada otonomi yang diberikan pada daerah menjadi catatan tersendiri perjalanan otonomi bangsa ini. Tengok saja jumlah kepala daerah yang terbelit masalah hukum khususnya korupsi dari tahun 2004 sampai tahun

¹ Sadu Wasistiono, dalam makalah menangkap peluang otonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya daerah

2012 berjumlah 173 orang. Belum lagi jumlah pengaduan kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan di daerah yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Realita yang terjadi kurang lebih satu dekade terakhir ini memberi gambaran nyata bahwa otonomi memberi peluang terjadinya penyelewengan kekuasaan yang jauh lebih besar dan merata, bahkan mungkin terciptanya krisis seri kedua. Namun di lain sisi otonomi juga merupakan peluang mencapai kemajuan. Dalam praktiknya, transformasi otonomi sampai saat ini memberi medium yang luas bagi daerah-daerah dengan kebebasan dan kewenangannya untuk melakukan kreasi dan inovasi. Melalui sumber daya yang tersedia, daerah memiliki ruang untuk mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik berupa modal capital, modal intelektual, maupun modal sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat daerah dan bangsa tentunya.

Kreasi dan inovasi yang dilakukan daerah ini lahir dari inisiasi daerah itu sendiri mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan memaksimalkan potensi. Tentu saja inisiasi ini tidak hadir begitu saja tanpa diiringi kemauan yang kuat daerah untuk keluar dari permasalahan yang terjadi. Sebab inovasi tidak hanya berbicara tentang sejauh mana program inovatif didesain dan dikonstruksi, akan tetapi juga bercerita efektivitas pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan tentu saja sesuatu yang berkesinambungan.

Mengapa inovasi sesuatu yang penting dalam otonomi? Sebab inovasi merupakan cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Dia lahir seiring dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki mengatasi problema. Cara-cara baru ini membuat proses menjadi efektif, memangkas prosedur yang tidak diperlukan dan hanya memakan anggaran, membuat kapasitas pelaksana semakin berkembang, dan yang paling penting tujuan yang didambakan tercapai dengan gemilang. Oleh karenanya, inovasi merupakan sesuatu yang berperan penting dalam otonomi, sebab secara langsung maupun tidak langsung dia mampu menjadi jalan pintas kemajuan. Apabila otonomi merupakan kondisi yang tidak boleh tidak dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, maka inovasi juga sesuatu yang harus dilakukan daerah.

Sayangnya, dalam perjalanan otonomi bangsa ini, praktik cerdas dalam pembangunan masih amat jarang terdengar kabar beritanya. Padahal otonomi yang merupakan wadah terciptanya beragam inovasi, setidaknya memaksa pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk berkreasi lebih nyata. Beberapa hal menjadi faktor yang melatarbelakangi, seperti ketidakmampuan daerah mengelola daerahnya sendiri, terjadinya konflik antarsesama pelaku pembangunan, atau mungkin peran media yang masih kurang aktif mengabarkan keberhasilan dan prestasi yang diraih daerah. Dewasa ini media sering terjebak pada stigma berita baik itu hanyalah berita yang buruk (*bad news is a good news*), serta menganggap keberhasilan daerah bukan sesuatu yang ‘sexy’ untuk disebarluaskan.



Harian FAJAR sebagai pelopor media surat kabar di Sulawesi Selatan (Sulsel) khususnya, mengambil peran untuk ikut serta menjadi salah satu corong penyampai keberhasilan pembangunan kabupaten/kota. Melalui medium Otonomi Awards (OA) program inovasi daerah di Sulsel diapresiasi secara proporsional dan disebarluaskan dengan harapan mampu memotivasi, menginspirasi dan memacu kreasi dan inovasi yang lebih baik.



Otonomi di Tengah Kompleksitas Tatanan Global

KONSTELASI desentralisasi kita berlangsung di tengah tatanan globalisasi. Interaksi *local-nasional-global* yang kompleks mestinya mendorong terjadinya *discovery* dan *invention*. Dialektika strukturasi *discovery* dan *invention* itu akan melahirkan sekian banyak inovasi-inovasi pembangunan di tingkat lokal yang bercorak pada *local geniuss* masing-masing daerah.

Kontekstualisasi spirit zaman meniscayakan adanya perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Sebuah paradigma yang sifatnya multiparadigmatik diperlukan untuk merespons dan beradaptasi atas tuntutan spirit zaman yang ada.

Kecenderungan ke depan, akan makin signifikannya pembangunan lokal, makin didorongnya parakarsa komunitas, semakin dibutuhkannya kemitraan,



pentingnya peningkatan kapasitas dibalik pelaksanaan pembangunan.

Pada kecenderungan demikian, perluasan partisipasi dan desain *community development* dalam perencanaan dan implementasi pembangunan ke depan mutlak diperlukan untuk mempersiapkan kapasitas dan kompetensi pemerintah maupun masyarakat.

❖ Spirit Zaman dan Paradigma Baru

Globalisasi dan desentralisasi merupakan spirit zaman yang melandasi tatanan saat ini¹. Karakteristik globalisasi ditandai dengan adanya interaksi kompleks yang terjadi pada tatanan kita. Hampir di semua level (nasional, lokal, dan komunitas) melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian terhadap kapasitas sumber daya, kelembagaan dan norma (visi) pembangunan. Upaya itu adalah penyelerasan terhadap spirit zaman pada level global, visi pembangunan pada level nasional dan kontinuitas dan sinergitas pembangunan pada level daerah. Dengan cara itu pula pembangunan dapat berlangsung secara selaras dan berkelanjutan.

Berangkat dari setting tatanan yang kompleks itu, dibutuhkan paradigma baru dalam pembangunan. Sulit bagi kita untuk mendasari diri pada satu skema, karena upaya adaptasi itu berlangsung secara dinamis dan terus menerus. Pendasaran fanatik pada satu paradigma akan menciptakan jebakan. “Jebakan itu berupa pembenahan atas substansi masalah pembangunan secara sepenggal-sepenggal (pertumbuhan ekonomi, pemutusan ketergantungan, pelestarian lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembebasan manusia); keterlibatan sejumlah aktor secara sendiri-sendiri (pemerintah, swasta dan masyarakat sipil); dan penempatan unit secara seragam (nasional/pusat). Untuk keluar dari jebakan itu, diperlukan pendasaran baru yang lebih multiparadigmatik”².

Paradigma baru yang multiparadigmatik itu adalah paradigma *holisme-dialogisme* yang merupakan hasil dari sebuah revolusi paradigma keilmuan³.

“Dalam paradigma holisme-dialogisme, diasumsikan bahwa objek bukan lagi entitas yang merepresentasikan realitas, realitas lebih direpresentasikan oleh interkoneksi, karena itu *entitas pembangunan* adalah perwujudan interkoneksi itu sendiri. Bukan kinerja komponen (sektor pembangunan) yang menjadi perhatian melainkan pada hubungan yang tercipta, pada interkoneksi di antara komponen (sektor pembangunan) tersebut. Perwujudan interkoneksi disebut tatanan, dan hakikat interkoneksi

¹ Darmawan Salman, Perspektif dan Kecenderungan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

² Darmawan Salman, Reinvensi Paradigma Bagi Pembangunan: Akhir Sains Modern dan Awal Sains Baru

³ Amin (2005) dalam Darmawan Salman, Reinvensi Paradigma Bagi Pembangunan: Akhir Sains Modern dan Awal Sains Baru

sebuah tatanan terletak pada *emergence resources* yang ditimbulkannya, fitur baru yang dihasilkannya, karena fitur baru inilah yang menjamin sustainabilitas”⁴.

Dalam paradigma Holisme-Dialogisme ini, jika dioperasionalkan, maka terdapat tiga unsur dalam entitas pembangunan yakni :

“Pertama, unsur sumberdaya (*resources*), mencakup sumberdaya fisik, manusia dan finansial/teknologi yang terdapat pada sebuah tatanan. Kedua, unsur organisasi (*organizations*), mencakup agregasi sejumlah individu manusia yang berfungsi mengelola sumberdaya dalam tatanan. Ketiga, unsur norma (*norms*), yang berfungsi sebagai acuan bagi organisasi dalam mengelola sumberdaya untuk pencapaian tujuan sesuai misi/visi tatanan”.

Dalam paradigma *holisme*, pembangunan didefinisikan sebagai *upaya meningkatkan kapasitas tatanan agar senantiasa mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga dapat menciptakan peluang dari perubahan itu*⁵. Dengan demikian perencanaan pembangunan mengalami perubahan dari formulasi tindakan-tindakan tertentu dalam tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu ke penyiapan tatanan untuk menghadapi dinamika lingkungan tatanan tersebut di masa depan⁶.

Penyiapan itu dilakukan dengan meningkatkan kompetensi berevolusi (*evolutionary competency*) sebagai syarat untuk bisa mengarahkan evolusi, karena kompetensi itulah yang memungkinkan kita menciptakan realitas yang sesuai dengan visi kita. Inti dari “kemampuan mengarahkan evolusi” adalah *self-organizing capacity (SOC)* dengan unsur-unsur: kualitas identitas diri (terkait dengan visi/misi dan nilai/norma), keragaman dan diversitas (terkait dengan kemampuan menyelaraskan keragaman eksternal dengan keragaman internal) dan kesadaran berevolusi (kesadaran diri sebagai bagian tak terpisahkan dari semesta sehingga keikutan berevolusi adalah keniscayaan). Secara operasional, inti dari SOC ini adalah kemampuan sebuah tatanan menyesuaikan pola interkoneksi *resources (R)- organizations (O) -norms(N)*nya dalam merespons perubahan spirit zaman⁷.

❖ Kecenderungan Arah Pembangunan

Mengacu pada paradigma tersebut, pembangunan ke depan tidak lagi dilihat secara sektoral, akan tetapi bagaimana interkoneksi antar sektor itu

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid



berlangsung. Model sektoral hanya meniscayakan sinergitas yang dioperasionalkan melalui skema koordinasi antarsektor yang menjadi kelemahan utama perencanaan dan implementasi pembangunan di daerah selama ini. Sinergitas perencanaan hanya terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan tetapi di level sektoral terjadi karut marut. Masing-masing sektor larut dalam ego sektoralnya, apalagi ketika itu terkait dengan domain penentuan kapasitas anggaran.

Ke depan, pembangunan harus dilakukan sebagai upaya penyiapan kapasitas tatanan untuk berkompetisi dan berevolusi. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan ruang dan panggung untuk peningkatan kompetensi untuk berevolusi tersebut.

Dengan spirit zaman dan paradigma pembangunan yang *holistis-dialogis* itu kecenderungan perencanaan pembangunan daerah ke depan adalah :

“PERTAMA, *makin signifikkannya pembangunan lokal.*

Pembangunan nasional yang bersifat sektoral semakin digeser ke pembangunan lokal yang bersifat wilayah. Konsekuensinya, pembangunan daerah, yang unit formalnya adalah kabupaten/kota, harus didorong operasionalisasinya pada unit-unit lokal: kampung, dusun, desa, marga, suku, dan sebagainya. Pembangunan daerah lebih merupakan hasil penjelmaan interkoneksi berbagai unit lokal tersebut.

KEDUA, *makin didorongnya prakarsa komunitas.* Ketika pembangunan semakin berunit lokal, sementata pemberdayaan masyarakat telah semakin mewarnai pembangunan, maka prakarsa komunitas menjadi kebutuhan. Akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah berkembangnya prakarsa komunitas. Komunitas bukan lagi sekadar partisipan, apalagi sekadar objek penerima manfaat.

KETIGA, *semakin dibutuhkannya kemitraan.* Pengelolaan pembangunan semakin tidak lagi dilihat sebagai hadirnya pihak inisiator dan lainnya hanya partisipan. Prinsip kemitraan, ataupun keterlibatan multipihak telah semakin didorong, dan dalam kerangka demikian para pihak. Dapat saling menyesuaikan diri, berkontribusi sumber daya dan meresolusi konflik.

KEEMPAT, *pentingnya peningkatan kapasitas dibalik pelaksanaan pembangunan.* Kegiatan dan program pembangunan semakin dituntut bukan hanya menghasilkan output berupa kemajuan sektoral ataupun wilayah. Ia semakin perlu dimulai pada efeknya dalam mendorong kapasitas untuk pembangunan itu sendiri, baik pada tingkatan individu, organisasi maupun sistem. Ini dipentingkan karena peningkatan kapasitaslah yang memungkinkan keberlanjutan secara jangka panjang”⁸.

⁸ Darmawan Salman, *Perspektif dan Kecenderungan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*

❖ Perluasan Partisipasi Mendorong Inovasi

Jika merujuk kembali pada apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam masa Undang-Undang no 22 tahun 1999, maupun di masa UU. No. 32 tahun 2004, visinya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah dengan mengelola urusan-urusan pemerintahan dan sumber daya-sumber daya yang ada di daerah secara otonom/mandiri. Sumber daya-sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya sosial dan kultural serta sumber daya alam.

Perluasan partisipasi adalah upaya awal dan upaya penyadaran yang niscaya dilakukan sebagai penyiapan kapasitas bagi masyarakat dalam penyiapan kompetensi untuk berevolusi. Perluasan partisipasi itu adalah ruang dan panggung yang disediakan bagi peran dan aktualisasi kesadaran warga dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Mengontekstualisasi spirit zaman ke dalam lokalitas mesti dilakukan secara partisipatif, karena jika tidak, adaptasi spirit zaman hanya akan menjadi praktik asing (tidak tepat sasaran) bagi masyarakat lokal. Dengan demikian perluasan partisipasi merupakan upaya penyiapan dan pemetaan *resources* (**R**), penyiapan (kapasitas) kelembagaan lokal (*organize/O*) baik di level government dan non-government serta kontekstualisasi *norms* (**N**) yang pada akhirnya akan menjadi visi yang akan mengerahkan evolusi sosial dan pembangunan.

Dengan demikian pijakan awal untuk menciptakan otonomi daerah yang demokratis telah cukup jelas. Siapa pun yang memegang tampuk kewenangan tertinggi di daerah harus memperkuat komitmen dan memulai langkahnya dari upaya-upaya tersebut sehingga proses politik yang menghabiskan energi masyarakat dan sumber daya yang begitu besar dalam Pemilu dan Pilkada tidak berakhir hanya dengan *euphoria* kemenangan, akan tetapi proses politik itu dapat memberikan makna yang lebih terukur pada sejauh mana konsekuensi-konsekuensi dari proses politik itu mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Partisipasi masyarakat mesti dimaknai lebih luas lagi, tidak hanya dibutuhkan dan dilibatkan pada saat proses pemilihan akan tetapi masyarakat harus dapat dimaknai sebagai subjek dalam proses perumusan kebijakan pemerintah, masyarakat dilibatkan dalam tahapan implementasi dan evaluasi program, sehingga masyarakat akan merasa memiliki daerahnya, pemimpinnya, wakilnya, serta kebijakan-kebijakan pembangunan menjadi kerja bersama, baik elit maupun masyarakat. Elit bertindak sebagai agen dan aktor, sementara masyarakat bertindak selaku partisipan yang aktif.

Perluasan partisipasi masyarakat ini akan mampu mendorong tumbuhnya *discovery* dan *invention* di daerah. *Discovery* merupakan sebuah upaya menggali gagasan-gagasan baru yang dapat diaplikasikan untuk mendorong kemajuan, sedangkan *invention* adalah ketika penemuan/gagasan-gagasan baru



itu dicoba untuk diimplementasikan di tengah masyarakat⁹. Pertautan antara *discovery* dan *invention* yang berhasil diimplementasikan dan kemudian dilembagakan dalam kehidupan masyarakat, maka penemuan baru itu kemudian disebut sebagai **inovasi**.

Gagasan-gagasan baru untuk perubahan (*discovery*), percobaan (invensi) dan inovasi akan semakin subur, beragam, tercipta dan tersempurnakan secara terus menerus ketika terdapat ruang aktualisasi yang terbuka dan merdeka dimana diskursus kritis dan penuh kesadaran mengenai berbagai persoalan di tengah masyarakat berlangsung secara dialektis dan dinamis.

Upaya perluasan partisipasi adalah sebuah model dimana ruang dialektika gagasan, uji coba dan inovasi itu dapat berlangsung. Perluasan partisipasi juga dapat berarti adanya perluasan aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun dalam proses implementasi dan evaluasi program.

Terjadinya perluasan aktor ini, akan mendorong munculnya gagasan-gagasan baru (*discovery*), mekanisme-mekanisme baru (*invention*) dan tentunya kebijakan-kebijakan baru (Inovasi). Inovasi-inovasi itu akan muncul dari semua lini, mulai dari gagasan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat itu sendiri (ruangnya seperti apa), pelembagaannya, hingga pada bagaimana upaya pelibatan masyarakat pada perumusan, monitoring dan evaluasi program serta program yang dihasilkan.

Dampaknya bagi masyarakat akan lebih terukur dan cakupannya akan lebih luas. Dengan terciptanya/terlembaganya partisipasi yang aktif dan mandiri, pada dasarnya pemerintah daerah telah menciptakan inovasi/program yang terlembaga, berdampak jangka panjang dan *sustainable*.

❖ Perlunya Kapasitas *Community Development*

Untuk terjadinya interkoneksi yang efektif dan terlembaga tidak hanya diperlukan mekanisme yang terkelola dengan baik dan efektif, akan tetapi sejauhmana inisiatif masyarakat juga dapat terlibat secara aktif dalam proses. Mekanisme dapat saja diadakan akan tetapi dapat menjadi tidak efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian untuk adanya interkoneksi dan diskursus yang berimbang dibutuhkan kapasitas yang berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah tidak semata-mata menjalankan mekanisme secara birokratis dan sektoral yang mungkin saja bertentangan dengan keinginan/aspirasi masyarakat, sehingga hasil/dampak dari sebuah program menjadi tidak efektif.

Rendahnya partisipasi masyarakat tidak serta merta menjadikan pemerintah

⁹ <http://www.scribd.com/doc/86744137/BAB-II-jono>

berhak untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat secara sepihak. Akan tetapi pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menstimulasi keterlibatan masyarakat tersebut. Sehingga stimulasi tersebut tidak sekadar formalitas berupa keberadaan regulasi dan mekanisme, akan tetapi stakeholder pemerintah melakukan langkah-langkah pemberdayaan dan pengorganisasian sumber daya-sumber daya sosial yang ada sehingga keterpaduan konsep, mekanisme, proses dan hasil dapat terealisasi secara integratif.

Dalam kondisi inisiatif dan tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka stakeholder-stakeholder pemerintah mau tidak mau harus mengambil peran yang lebih aktif. Para pemangku kebijakan /stakeholder pemerintahan di era otonomi perlu memiliki kapasitas *community development*.

Kapasitas yang demikian ini akan mendorong pemerintah untuk mampu mengorganisir partisipasi publik secara lebih luas, secara bertahap pemerintah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat yang kemudian akan memunculkan stakeholder-stakeholder baru yang akan menjadi aktor baru untuk terlibat dalam proses kebijakan. Munculnya aktor-aktor baru itu seiring dengan semakin mapannya kapasitas kelembagaan komunitas, perluasan aktor pun dapat berlangsung dan pemerintah dapat mengembangkan skema kemitraan dengan kelembagaan-kelembagaan komunitas yang ada.

Semakin banyak aktor yang terlibat, maka kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi banyak aspek, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif. Komprehensivitas kebijakan itu dapat dilihat dari mekanisme dan tahapan perumusan (perencanaan), mekanisme dan tahapan implementasi, serta mekanisme dan tahapan monitoring dan evaluasi, manajemen sumber daya manusia, finansial, dan sebagainya.

Pada program yang didesain dengan model *Community Development* biasanya memiliki tiga karakter utama yaitu **berbasis masyarakat** (*community based*), **berbasis sumber daya setempat** (*local resource based*) dan **berkelanjutan** (*sustainable*).

Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Kedua sasaran itu dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*) berjalan secara simultan.

❖ Metodologi Kompetisi Inovasi

KOMPETISI merupakan fitrah, sesuatu yang mutlak adanya. Dimana



pun kaki berpijak, kompetisi merupakan bagian tak terpisahkan. Bahkan aroma kompetitif telah dimulai sebelum manusia menjadi embrio. Pertanyannya, apakah kompetisi mampu mendorong peningkatan kapasitas sekaligus tumpuan kemajuan?. Kompetisi yang baik adalah sebuah ruang dengan konstruksi dan landasan visioner, dibalut dengan tahapan dan aturan yang sistematis dan komprehensif, serta dengan tujuan pencapaian yang nyata.

Kompetisi yang baik merupakan arena untuk meningkatkan pencapaian, dengan mengambil komparasi positif dari kelebihan dan kekurangan baik internal maupun eksternal. Ikut serta dalam kompetisi berarti telah menancapkan satu kaki untuk berkembang lebih jauh, telah menjadi bagian dari suatu proses kemajuan dan sedikit banyak telah memberi arah untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya.

Seiring dengan credo “tiada kemajuan tanpa kompetisi”, *The Fajar Institute of Pro Otonomi* (FIPO) dibentuk untuk memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota melalui penganugerahan apresiasi yang disebut Otonomi Awards. Otonomi Awards merupakan bagian pendukung agar pelaksanaan otonomi daerah tetap berada dalam konteks pembaruan yang dicita-citakan.

Secara umum, monitoring dan evaluasi dari suatu kegiatan merupakan upaya mencari informasi yang objektif untuk penyempurnaan. Informasi yang akurat dan objektif ini menjadi landasan dalam mengambil langkah dan kebijakan yang paling penting dilakukan. Otonomi Awards mengusung sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki program yang telah berjalan, akan tetapi juga mendesainnya dalam kompetisi yang partisipatif. Sistem ini disebut *simonev-komparatif*.

Dalam risetnya, FIPO secara konsisten mendesain komponen penggalan data dalam tiga tahapan, yaitu wawancara mendalam, survei publik, dan eksisting data. Ketiga tahapan ini merupakan proses berkesinambungan yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu bagian sistem penilaian.

Tahap wawancara mendalam menjadi awal pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai pembuka informasi sekaligus pintu masuk untuk mengetahui program-program inovasi daerah. Dikatakan mendalam karena menggali informasi yang sedetail-detailnya melalui informan kunci, seperti bupati/walikota, kepala SKPD, staf, terutama aparat penanggung jawab program, dan tidak lupa juga meminta salinan dokumen-dokumen dari program itu sendiri. Dokumen ini dapat meliputi SK perancangan program, laporan penganggaran, peraturan daerah, dan data hasil program yang sekaligus sebagai payung hukum dan menjadi pegangan yang valid. Selain itu, wawancara juga harus terangkai dengan observasi langsung pelaksanaan program yang mewawancarai pelaku lapangan, sehingga menjadi satu rangkaian informasi yang utuh, baik dari segi latar belakang program, teknis pelaksanaan, hasil, dan yang terpenting

kesinambungan program itu sendiri. Terlebih, dengan observasi langsung tersebut didokumentasikan, menjadi sarana verifikasi kebenaran informasi dari para informan.

Tahap kedua adalah survei publik. Survei cenderung menjadi alat ukur paling terpercaya saat ini. Dengan metodologi dan instrumen yang tepat, survei secara ilmiah akan memberikan gambaran nyata persepsi masyarakat. Survei publik dalam tahapan riset FIPO menjadi bentuk konfirmasi kepada masyarakat atas program yang dijalankan pemerintah. Sebagai penerima manfaat langsung, publik tentunya memiliki pandangan yang paling nyata dari program itu sendiri, sehingga survei sesuatu yang patut menjadi penilaian. Jika publik merasa puas dengan program yang dijalankan, maka kinerja pemerintah sudah berjalan pada koridor yang semestinya, begitu pula sebaliknya. Dengan catatan, metode yang dilakukan tepat. Untuk pihak yang menjadi responden misalnya, FIPO menganalisis dalam beragam latar belakang. Seperti, asosiasi profesi kesehatan dan pendidikan, CSO, organisasi massa, mahasiswa dan pelajar, anggota legislatif, dan investor. Syarat umum dari beragam kategori ini adalah mereka yang berusia 17 tahun dan merupakan kalangan yang *well-educated* dan *well-informed*. Artinya, mereka yang menjadi responden harus kalangan yang memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup.

Tahap ketiga eksisting data, merupakan identifikasi data-data sekunder yang dirangkum dalam satu desain yang saling terkait. Verifikasi data sekunder ini meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, Kaupaten/Kota Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan beragam data sekunder lainnya. Beragamnya data sekunder yang diinput dalam satu bagian menjadi satu pengayaan data tersendiri, sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis tertentu. Analisa ini dapat menggambarkan bagaimana daerah mengelola anggarannya, sejauhmana alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, rasio guru dan murid, perbandingan pertumbuhan ekonomi, dan beragam data analisa lainnya.

Secara umum, ketiga tahap penggalian data ini dimaksudkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok pada Otonomi Awards. Pertama, seberapa jauh otonomi daerah membawa peningkatan dalam skala kehidupan ekonomi? Kedua, seberapa jauh otonomi membawa perbaikan dalam pelayanan publik? Ketiga, seberapa jauh otonomi daerah membawa akibat bagi perbaikan performa politik lokal yang demokratis? Keempat seberapa jauh otonomi daerah membawa akibat bagi perbaikan lingkungan hidup?

Dari keempat pertanyaan umum yang mewakili empat parameter ini, yaitu ekonomi lokal, layanan publik, performa politik lokal dan lingkungan hidup, menjadi dasar pencarian dan penggalian informasi dari para informan terkait program inovatif. Artinya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak terlepas dari empat parameter ini. Parameter-parameter tersebut mencakup sembilan indikator yang terdistribusi di setiap parameter, seperti pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan

ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi lokal yang tergabung dalam parameter kehidupan ekonomi lokal. Untuk layanan pendidikan, administrasi dasar kependudukan dan perizinan termasuk dalam parameter layanan publik, sedang untuk parameter performa politik mencakup indikator partisipasi politik dan akuntabilitas publik.

Bagaimana dengan isu lingkungan hidup? Parameter lingkungan hidup termasuk dari dua parameter khusus bersama dengan isu pengentasan kemiskinan. Kedua isu ini menjadi perhatian khusus, karena keduanya merupakan hal yang urgen dan harus diperhatikan secara serius. Dalam kaitannya dengan pembangunan, kedua isu ini merupakan bagian integral yang pertama harus terjawab, sebab dengan pendekatan terhadap keduanya akan menjamin integrasi pembangunan sekaligus perbaikan taraf hidup masyarakat.

Isu pengentasan kemiskinan awalnya adalah indikator dari parameter ekonomi lokal, menyatu dengan indikator pemberdayaan ekonomi lokal. Namun dengan pertimbangan bahwa isu kemiskinan masih menjadi momok dan harus segera diatasi, juga perlunya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengupayakan terobosan program yang lebih komprehensif dan inovatif isu ini berdiri sendiri dan menjadi sebuah parameter khusus.

Menilai program dari sejumlah indikator dan parameter khusus di atas dalam kata kunci inovasi tentu memiliki kriteria dan standar tertentu. Dalam bingkai FIPO inovasi dibagi dalam empat tingkatan, yaitu kreatif, strategis, produktif dan berkelanjutan. Artinya, inovasi adalah buah dari proses kreatif yang semakin bermakna jika memiliki nilai strategis, berpotensi produktif serta menjamin keberlanjutan.

Tabel 1

Tingkatan Inovasi Program Pembangunan Pemerintah Daerah					
Tingkatan Inovasi	Range Nilai	Baik		Baik	
		Ide Cerdas	Implementatif	Efek Jangka Pendek	Efek Jangka Panjang
Kreatif	21-40	V	-	V	-
Strategis	41-60	V	-	V	V
Produktif	61-80	V	V	V	-
Berkelanjutan	81-100	V	V	V	V

Bingkai inovasi yang diusung FIPO secara strata adalah sesuatu yang bertingkat, dari standar kreatif sampai berkelanjutan. Standar inovasi **kreatif** adalah gagasan cerdas yang belum menunjukkan praktik nyata yang aktif, namun telah memperlihatkan efek jangka pendek. Inovasi dianggap **strategis** jika

program memiliki ide cerdas yang telah menghasilkan efek jangka pendek dan terjamin untuk jangka panjang, namun secara implementasi masih terdapat beberapa kekurangan. Inovasi dikatakan **produktif** apabila gagasan cerdas telah memiliki mekanisme lapangan yang sesuai harapan dan berefek jangka pendek, namun belum memiliki jaminan keberlangsungan jangka panjang. Sedang untuk inovasi yang **berkelanjutan** adalah inovasi dengan ide cerdas yang implementatif tidak hanya memiliki efek jangka pendek, namun juga jangka panjang.

Khusus untuk penilaian program peraih award pada tahun sebelumnya, program belum dapat diajukan pada tahun depannya namun dapat diajukan kembali dua tahun ke depan. Hal ini mengingat program membutuhkan atmosfer baru yang tentu tidak instan dan memerlukan proses yang tidak cepat. Setidaknya, untuk dimajukan kembali program terlebih dahulu harus melakukan proliferasi inovasi.

Proliferasi diartikan sebagai pengembangbiakan inovasi, dari inovasi yang ada dikembangkan lagi menjadi inovasi dengan sentuhan yang baru. Proliferasi dalam bingkai FIPO terdiri dari empat bagian, yaitu ekstensifikasi, diferensiasi, diseminasi, dan developmentasi.

Ekstensifikasi diartikan adanya inovasi baru dalam program yang sama, ekstensifikasi adalah penambahan inovasi lain yang berbeda pada program yang telah ada. Diseminasi diartikan timbulnya efek menular dan efek berganda dari suatu program inovasi bagi wilayah atau daerah lain, sedang developmentasi adalah peningkatan kualitas terobosan pada inovasi yang telah ada.



Otonomi Awards, Festival para Juara

DALAM ruang otonomi yang makin bebas, ditandai dengan pelimpahan kewenangan dan penyerahan urusan yang luas, sedikit banyak telah mendorong daerah untuk merestorasi pola pembangunan agar terus bergerak maju dan berkembang. Pola konvensional dan sektoral yang terbukti tak ampuh menjadi konstruksi kemajuan, sudah sepatutnya didesain dan dikembangkan ulang. Kerangka dasar pembangunan sudah seharusnya dikonstruksi dengan desain inovatif, holistik serta berciri interkoneksi agar menjadi pijakan sekaligus katalisator kemajuan.

Program dengan ide cerdas, kerja kreatif, partisipatif dan berkesinambungan adalah sebuah keharusan dalam kerangka otonomi. Karenanya komposisi program inovatif harus berbanding lurus dengan kewenangan yang makin besar. Idealnya, dengan kebebasan yang dilimpahkan maka tujuan kemajuan akan berjalan beriringan. Inilah cita-cita mulia otonomi daerah, menjadi jalan tengah yang membawa ranah kebebasan seiring sejalan dengan kemajuan yang didambakan.



Otonomi Awards lahir dengan semangat dan cita-cita yang sama. Diinisiasi dengan optimisme bahwa keberhasilan pembangunan dicapai melalui karya kreatif dan inovatif, dilandasi pondasi bahwa setiap proses keberhasilan pembangunan itu mutlak untuk terus dikabarkan. Mengapa harus inovasi? Ya, mengangkat program inovatif sebagai tema khusus, bukan tanpa alasan. Inovasi yang merupakan daya guna segala potensi dalam mengatasi masalah dengan cara cerdas, kreatif dan berkesinambungan adalah gambaran kemajuan yang terupaya secara bebas. Menilai kemajuan otonomi dalam ukuran inovasi, berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang dimiliki daerah mampu mendorong munculnya program, kebijakan serta gagasan lokal yang cerdas dalam menyiasati segala keterbatasan dengan mengoptimalkan segala bentuk keunggulan yang dimiliki daerah. Dengan kata lain, inovasi merupakan tolok ukur paling efektif menilai kemajuan.

Kemajuan itu pada dasarnya harus dikabarkan, sebagai motivasi dan penghargaan bagi mereka yang berbuat agar menjadi pelecut semangat untuk berbuat lebih. Selain itu, pemberitaan program inovatif sekaligus sebagai diseminasi informasi bagi yang belum berbuat, agar menjadi motivasi untuk terus maju berkembang. Diseminasi informasi juga menjadi pembanding, dimana otonomi tidak melulu menghadirkan berita kemerosotan pembangunan daerah. Otonomi dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjadi pintu gerbang kemajuan dengan lahirnya beragam program inovatif dari daerah.

Program inovasi yang selama ini masih terkebiri dengan massifnya pemberitaan negatif tentang pemerintah daerah, harus mendapat penjelasan sekaligus praktik nyata. Di tengah zaman yang berkembang melesat dari perkiraan, pemberitaan kemajuan memerlukan wadah yang berimbang. Otonomi Awards sebagai sebuah rekayasa sosial hadir sebagai suplemen penyeimbang akan kemajuan-kemajuan daerah, terlebih inovasi merupakan sebuah terobosan. Terobosan yang menggambarkan paduan kreativitas dan kecerdasan untuk keluar dari masalah yang dihadapi, baik karena masalah keterbatasan sarana ataupun kecenderungan keluar dari kungkungan program yang biasa-biasa saja. Mengabarkan kemajuan melalui medium festival inovasi, akan meminimalkan distorsi informasi kemajuan daerah yang sering dipandang sebelah mata.

Otonomi Awards juga hadir sebagai stimulan daerah agar mengembangkan karya kreasinya. Inilah mengapa metode yang diusung adalah kompetisi. Daerah diarahkan untuk terus berkembang dengan menempatkan dalam ruang yang beratmosfer persaingan. Bukankah sudah menjadi siklus hidup, bahwa dengan persaingan (yang berlandas norma-norma positif tentunya) akan menumbuhkan semangat belajar dan bergerak maju yang lebih terbuka dan progresif?.

Tapi, ruang yang dikonstruksi The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) lebih dari sekadar perlombaan. Sebuah festival tepatnya. Arena yang menghadirkan lebih dari iklim kompetitif semata, karena juga membawa daerah dalam ranah kebersamaan yang dilandasi semangat berkemajuan. Semangat



yang membawa daerah menjadi pembelajar. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap daerah yang berpartisipasi adalah para pemenang.

Otonomi Awards memang ditujukan tidak hanya sebagai ruang munculnya beragam inovasi, akan tetapi juga mengarahkan agar tercipta diskursus antarsesama pelaku pembangunan. Pertukaran informasi, transfer pengetahuan dan terciptanya efek penularan yang dianggap baik adalah substansi dari setiap rangkaian kegiatan. Terlebih jika terjadi penumbuhkembangan program menjadi sesuatu yang lebih baik.





Bab 2

Catatan Kemenangan Daerah

Otonomi Awards untuk
Daerah Terbaik

Ranking dan
Peraih Otonomi
Awards 2012

Otonomi Awards untuk Daerah Terbaik

HASIL akhir penilaian Otonomi Awards (OA) 2012 merekomendasikan program-program inovasi 23 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai nominasi dan peraih penghargaan. Pada tahun ini, 11 kategori diapresiasi kepada daerah yang berprestasi dalam mengembangkan program-program inovasinya.

Dalam bingkai FIPO, pelaksanaan OA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada daerah yang mampu membuat kemajuan. Kegiatan ini sengaja didesain untuk kompetisi tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya mendorong sinergisitas pemerintah daerah agar mengupayakan kemajuan secara bebas melalui otonomi.

Pada dasarnya, walau dirancang sebagai ajang kompetisi, pelaksanaan OA bukanlah kejuaraan (*championship*) tetapi festival. Festival mengedepankan karya sedangkan kejuaraan lebih bersifat umum. Dalam OA, istilah juara tidak dikenal, tetapi istilah program paling inovatif.

Setelah tahapan penilaian rampung dan nilai telah terakumulasi seluruhnya, maka penetapan nominasi dalam tiap kategori diambil dari lima nilai tertinggi di



tiap kategori. Daerah yang memiliki nilai tertinggi dari tiap kategori tersebut layak mendapatkan penghargaan trofi OA. Sedangkan pemenang dari masing-masing *Special Category* merupakan kandidat atau nominasi peraih *grand category* atau *grand awards* di tiap parameter. Jadi masing-masing parameter terdiri dari beberapa nominasi.

Sebagai contoh, pada parameter kehidupan ekonomi lokal terdapat tiga kategori, yaitu kategori pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan ekonomi lokal, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi kabupaten dan kota sebagai pemenang pada tiap kategori tersebut akan menjadi nomine peraih *grand category* atau *grand award*. Daerah yang paling terbaik dan paling inovatiflah yang akan mendapatkan trofi *grand award*.

Selain ketiga parameter tersebut di atas, FIPO juga mengangkat parameter khusus yaitu pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan yang sekaligus juga sebagai kategori yang berhak atas satu trofi OA. Pada parameter ini tidak terdapat *Grand Category* karena hanya terdapat satu kategori saja.

Selain itu, FIPO juga menyiasati adanya program inovatif yang dianggap paling inspiratif atau terunik/*distinguish* di setiap daerah. Kategori inspiratif merupakan program yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan atau program yang memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari: 1) ide genius khas lokal, 2) asas manfaat jangka pendek dan jangka panjang, 3) administrasi atau jaminan payung hukum yang memadai, 4) komitmen anggaran, 5) jangkauan wilayah, 6) *multiplier effect*, 7) jumlah penerima manfaat, dan sebagainya.

Tabel 2

Nomine dan Peraih OA 2012 Parameter Kehidupan Ekonomi Lokal			
KATEGORI	NOMINE	PROGRAM	PERAIH
Pertumbuhan Ekonomi Lokal	Kepulauan Selayar	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Kepulauan Selayar
	Bantaeng	Bantaeng Menuju Destinasi Wisata	
	Luwu	Pengembangan Rumput Laut	
	Barru	Instalasi Pembenihan	
Pemerataan Ekonomi Lokal	Bone	Pangkalan Pendaratan Ikan	Bantaeng
	Bantaeng	Penguatan Modal Kerja Tanpa Bunga	
	Luwu Timur	Pengembangan Pasar Rakyat	
	Kepulauan Selayar	Penguatan Lembaga Keuangan Mikro	
Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Pangkep	Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Padi	Luwu Utara
	Wajo	Bantuan Ekonomi Produktif Pertanian	
	Luwu Utara	Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir	
	Bantaeng	Kabupaten Benih Berbasis Teknologi	
	Luwu Timur	Pemberdayaan Dan Pengembangan UKM	
Bulukumba	Sarjana Membangun Desa	Show Room Sapi	
Barru	Show Room Sapi		

Tabel 3

Nomine dan Peraih OA 2012 Parameter Pelayanan Publik			
KATEGORI	NOMINE	PROGRAM	PERAIH
Layanan Pendidikan	Jeneponto	Sekolah Unggulan untuk Generasi Pabbaba	Jeneponto
	Gowa	Punggawa D'emba	
	Takalar	Beasiswa untuk Pelajar Miskin Berprestasi	
	Palopo	Kelas Internasional	
	Bantaeng	Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu	
Layanan Kesehatan	Luwu utara	Arisan Jaga (Jamban Keluarga)	Luwu Utara
	Bantaeng	Peranan CSO dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan	
	Sinjai	Pelibatan Masyarakat Dalam Peningkatan Layanan Rumah Sakit	
	Enrekang	Puskesmas Ber-ISO	
	Makassar	Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO	
Layanan Administrasi Dasar Kependudukan dan Perizinan	Luwu Timur	Layanan Prima Paripurna	Luwu Timur
	Palopo	Layanan Perizinan Prima	
	Bantaeng	KPTSP	
	Maros	Layanan Perizinan Terpadu	
	Bulukumba	Unit Mobile Pelayanan Administrasi Kependudukan	

Tabel 4

Nomine dan Peraih OA 2012 Performa Politik Lokal			
KATEGORI	NOMINE	PROGRAM	PERAIH
Akuntabilitas Publik	Parepare	Perencanaan Anggaran Berbasis Masyarakat	Parepare
	Palopo	Gabungan Organisasi Wanita Penggerak Posyandu	
	Luwu Timur	Desa Paripurna	
	Gowa	Partisipasi Teknologi Tepat Guna	
	Luwu Utara	Partisipasi Pembangunan Pasar Sehat	
Partisipasi Publik	Makassar	Obudsman, Layanan Pengaduan Publik	Makassar
	Parepare	Pengaduan Publik Melalui Website	
	Maros	SMS Centre	
	Palopo	SMS Publik	
	Luwu Utara	Warung Demokrasi	

Tabel 5

Nomine dan Peraih OA 2012 Pengelolaan Lingkungan Hidup			
KATEGORI	NOMINE	PROGRAM	PERAIH
Pengelolaan Lingkungan Hidup	Maros	Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas)	Maros
	Pangkep	Pengeboran Air Bawah Tanah Dalam	
	Parepare	Pengelolaan Sampah Organik	
	Luwu	Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas)	
	Kepulauan Selayar	Penyulingan Air Laut untuk Air Minum	

Tabel 6

Nomine dan Peraih OA 2012 Kategori Pengentasan Kemiskinan dan Inspiratif			
KATEGORI	NOMINE	PROGRAM	PERAIH
Pengentasan Kemiskinan	Enrekang	Pembinaan Rumah Tangga Miskin	Enrekang
	Wajo	Bantuan Sapi untuk Keluarga Miskin	
	Pangkep	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	
	Makassar	Bantuan Hukum untuk Keluarga Miskin	
	Barru	Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan	
Inspiratif/Distinguish	Kepulauan Selayar	Membangun Selayar dari Desa	Kepulauan Selayar

Tabel 7

Peraih Grand Award OA 2012	
PARAMETER	PERAIH
Kehidupan Ekonomi Lokal	Bantaeng
Layanan Publik	Luwu Utara
Performa Politik Lokal	Parepare



Ranking dan Peraih Otonomi Awards 2012

Penentuan peraih trofi Otonomi Awards (OA) 2012 didasarkan pada tiga komponen utama penilaian, yaitu inovasi, survei publik, dan eksisting data. Ketiga komponen inilah yang menjadi dasar perangkaan.

Jika OA pada tahun-tahun sebelumnya, FIPO memberikan apresiasi pada tiga parameter, yaitu kehidupan ekonomi, pelayanan publik, dan performa politik, serta parameter khusus pengelolaan lingkungan hidup, tahun ini pada penilaian OA 2012 FIPO menambah satu lagi parameter khusus yaitu pengentasan kemiskinan. Berikut rincian peraih penghargaan dan nominasi dalam ajang OA 2012.

A. Parameter Kehidupan Ekonomi

1. Kategori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pembangunan perekonomian suatu daerah. Keberhasilan pembangunan jika diukur dengan indikator ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya.



Dalam penilaian FIPO pertumbuhan ekonomi tidak hanya melihat angka statistik pertumbuhan ekonomi tetapi juga eksisting data. Berdasarkan komponen penilaian inovasi ada empat isu strategis dalam kategori ini, yaitu pendapatan daerah dan masyarakat, investasi, kesempatan kerja, dan suprastruktur-infrastruktur pertumbuhan ekonomi.

Keempat isu strategis inilah yang menjadi tolok ukur setiap program inovasi yang diajukan daerah. Setiap program harus mengusung minimal satu dari isu strategis tersebut, sehingga program yang diajukan dapat diketahui *entry point* penilaiannya.

Tabel 8

Isu Strategis Kategori Pertumbuhan Ekonomi		
Kategori/ Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Daerah dan Masyarakat	Apakah pendapatan daerah juga diikuti dengan pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita penduduk.
	Investasi	Apakah pertumbuhan investasi atau industri berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
	Kesempatan Kerja	Apakah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga berkorelasi dengan meningkatnya kesempatan kerja.
	Suprastruktur– Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ● Se jauh mana memenuhi aspek kreatif, strategis, produktif dan sustainable, proyek pengembangan maupun pembangunan pusat pertumbuhan baru bagi perdagangan, industri dan jasa. ● Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian seperti pelabuhan laut, bandar udara, ketersediaan fasilitas pergudangan, dan jaringan distribusi dan transportasi yang lancar.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan program Peningkatan Produktivitas Pertanian. Program yang menekankan pada isu strategis *suprastruktur – infrastruktur pertumbuhan ekonomi* ini, berhasil mengumpulkan nilai 617 mengungguli Kabupaten Bantaeng (563), Bone (555), Luwu (530), dan Barru (503).

Kurangnya ketersediaan pangan dalam daerah, membuat citra Selayar sebagai daerah rawan pangan tetap melekat. Pada awalnya mayoritas masyarakat Selayar, lebih menekuni bekerja sebagai nelayan dan pekerja kebun. Sedangkan, bertani sawah masih kurang diminati.

Kondisi inilah yang coba diatasi kabupaten yang dikenal dengan sebutan “tana doang” ini, dengan terobosan pemenuhan stok pangan daerah melalui program peningkatan produktivitas pertanian khususnya padi. Beberapa kebijakan strategis sebagai bukti komitmen pemerintah, diantaranya pencetakan sawah baru dan penyuluhan pertanian, bantuan alsintan, bantuan bibit dan pupuk, serta pembangunan saluran irigasi.

Dimulai tahun 2008, pemerintah daerah (pemda) membangun inisiatif mendorong masyarakat memanfaatkan lahan persawahan yang ada. Hingga tahun 2011 total pencetakan sawah baru mencapai 1087,630 hektar.

Perlahan tapi pasti, hasilnya pun cukup memuaskan. Jumlah produksi padi tahun 2011, sudah mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat dalam daerah. Jumlah produksi tahun 2011 telah melebihi kebutuhan beras masyarakat Selayar. Kebutuhannya beras masyarakat Selayar tahun 2011 adalah 14.681 ton sedangkan produksi mencapai 14.725 ton, surplus 44 ton.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Bantaeng menawarkan program Bantaeng Menuju Destinasi Wisata dengan isu strategis *suprastruktur – infrastruktur pertumbuhan ekonomi*.

Kota wisata masih sangat jarang ditemukan di Indonesia padahal kebutuhan wisata masyarakat sangat tinggi. Selain itu, memajukan pariwisata secara langsung atau tidak langsung mampu memajukan ekonomi masyarakat. Menangkap peluang tersebut, pemda Bantaeng menggarap program yang mampu memenuhi kebutuhan wisata baru bagi masyarakat. Menjadikan Bantaeng tempat tujuan, bukan sekadar tempat transit belaka.

Untuk membuat Bantaeng menjadi kawasan wisata yang representatif maka hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah menggenjot pembangunan infrastruktur. Selain memberi kenyamanan bagi masyarakat juga memberi kesan baik bagi pengunjung yang datang. Sejak tahun 2008 pembangunan fasilitas pariwisata mulai dikembangkan secara bertahap. Produk wisata yang ditawarkan ada tiga, yakni wisata alam, wisata budaya dan wisata pantai. Dengan variasi wisata, pengunjung memiliki beragam pilihan ketika mendatangi daerah ini. Pembangunan pusat-pusat wisata berarti membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, menambah penghasilan dan mengurangi pengangguran. Kedatangan wisatawan membuat roda perekonomian semakin terpacu, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Kabupaten Bone, dengan program Pangkalan Pendaratan Ikan. Isu strategisnya adalah *suprastruktur – infrastruktur pertumbuhan ekonomi*.

Secara geografis Kabupaten Bone memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan, kabupaten yang berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu kabupaten terluas yakni 4,559 km².



Bone memiliki daerah pantai yang sangat panjang yang menyusuri Teluk Bone. Dari 27 kecamatan yang ada di Bumi Arung Palakka ini, 10 diantaranya adalah kecamatan pesisir. Sayangnya hal tersebut tidak didukung dengan sarana yang memadai.

Menghadapi kondisi tersebut berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan yang ada, salah satunya adalah memaksimalkan pembangunan infrastruktur perikanan. Sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memulai perencanaan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Lonrae.

Pembangunan infrastruktur PPI Lonrae terdiri dari fasilitas pokok, fungsional, dan fasilitas penunjang. Selain pembangunan PPI di Lonrae telah dibangun juga empat PPI dalam skala kecil yaitu PPI Ancu, PPI Bulu-Bulu, PPI Pattiro Sompe, dan PPI Lamurukung. PPI Lonrae efektif beroperasi sejak awal tahun 2011. Walaupun hanya mampu memenuhi 63% dari target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan, namun karena adanya perbaikan infrastruktur program ini telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Luwu, dengan program Pengembangan Rumput Laut. Isu strategisnya adalah *pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat*.

Kabupaten Luwu menjadi kabupaten sentra pengembangan rumput laut untuk wilayah Luwu dan sekitarnya. Budi daya rumput laut tidak terlalu sulit ditangani nelayan karena sudah menjadi sumber mata pencaharian di samping menjadi nelayan. Selain itu, tanah Luwu memiliki garis pantai sepanjang 139 km dan menjangkau 11 kecamatan pesisir.

Saat ini Kabupaten Luwu adalah penghasil rumput laut terbesar ke-2 di Sulawesi Selatan. Karenanya pemerintah Kabupaten Luwu dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan produksi rumput laut melalui serangkaian penyaluran bantuan baik yang didanai APBN maupun APBD.

Program pengembangan rumput laut merupakan upaya untuk mem-*back up* kegiatan nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan membina kelompok nelayan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, fasilitasi bantuan pusat, dan pemberian bantuan dari pemda. Petani/nelayan yang akan dibantu adalah mereka yang tergabung dalam kelompok. Dilakukan pula pembinaan dan pelatihan teknis bagi kelompok petani rumput laut untuk peningkatan kualitas dan produksi rumput laut. Efeknya, terjadi peningkatan produksi rumput laut dari tahun ke tahun. Tahun 2010 produksi rumput laut sebanyak 374.770 ton (183.202 ton *euchema* dan 191.568 ton *gracillaria*), dan tahun 2011 mencapai 451.120 ton (229.021 ton *euchema* dan 222.099 ton *gracillaria*).

Kabupaten Barru, dengan program Instalasi Perbenihan. Isu strategisnya adalah *pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat*.

Latar belakang keberadaan program ini adalah kelangkaan benih di musim

tanam untuk pertanian padi di Kabupaten Barru, tingginya permintaan benih padi, baik di Kabupaten Barru maupun permintaan dari luar. Dalam rangka memenuhi permintaan dan kebutuhan benih lokal pun dirasa perlu adanya instalasi perbenihan yang melakukan pembinaan terhadap para petani penangkar untuk memaksimalkan dan memobilisasi usaha perbenihan.

Instalasi ini dibangun tahun 2007, dan mulai berproduksi tahun 2009. Pada tahun 2011, Instalasi Perbenihan Bottolampe telah mampu menyumbang PAD yang telah mencapai Rp 1 miliar dari hasil penjualan benih. Selain melakukan prosesing benih unggul berkualitas, instalasi ini juga bekerjasama dan membina kelompok-kelompok tani penangkar dalam rangka memenuhi kebutuhan instalasi perbenihan untuk penyediaan benih padi di Kabupaten Barru dan permintaan dari kabupaten lain. Saat ini instalasi membina sekitar 12 kelompok tani penangkar dengan luas area penangkaran sekitar 105 Ha.



Tabel 9

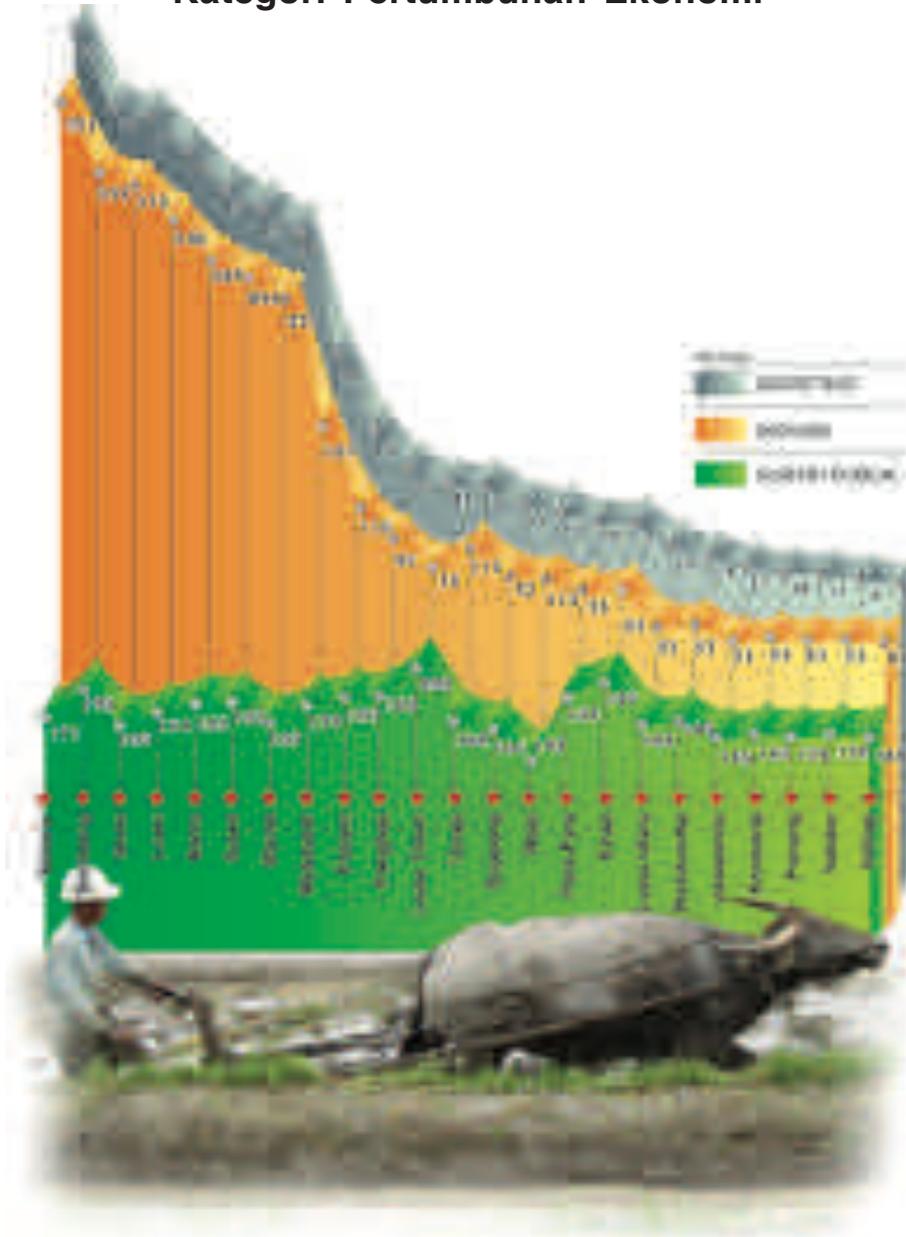
**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Pertumbuhan Ekonomi**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	EKSISTING	TOTAL
1	Selayar	171.125	433.015	12.969	617.109
2	Bulukumba	167.638	55.770	19.331	242.739
3	Bantaeng	192.406	357.981	12.302	562.690
4	Jeneponto	155.906	56.540	16.982	229.428
5	Takalar	158.594	58.850	6.035	223.479
6	Gowa	182.906	293.095	13.503	489.504
7	Sinjai	197.469	59.620	6.960	264.049
8	Maros	166.844	294.663	11.535	473.041
9	Pangkep	185.156	98.120	15.809	299.086
10	Barru	182.625	306.818	13.381	502.823
11	Bone	169.013	375.045	11.027	555.085
12	Soppeng	161.406	98.890	11.360	271.656
13	Wajo	143.219	114.290	13.399	270.908
14	Sidrap	159.531	57.310	4.534	221.375
15	Pinrang	155.875	60.390	10.554	226.819
16	Enrekang	158.469	58.080	10.412	226.960
17	Luwu	173.938	340.230	15.821	529.989
18	Toraja	168.438	113.520	6.366	288.324
19	Luwu Utara	168.500	62.700	14.466	245.666
20	Luwu Timur	208.125	61.160	25.315	294.600
21	Makassar	178.906	187.440	11.947	378.293
22	Parepare	187.656	61.930	18.686	268.272
23	Palopo	186.594	118.140	16.519	321.253



Grafik 1

Ranking Kabupaten/Kota Kategori Pertumbuhan Ekonomi



2. Kategori Pemerataan Ekonomi

Konsep pemerataan ekonomi menekankan pada pemberian kesempatan seluruh masyarakat dalam menerima dan mengelola akses ekonomi. Artinya, semakin banyak masyarakat yang merasakan hasil pembangunan dan berpartisipasi dalam proses penguasaan ekonomi maka akan berdampak pada kualitas taraf hidup masyarakat banyak secara menyeluruh.

Mendorong daerah dalam memberikan kesempatan yang sama di antara masyarakatnya dalam mengelola sumber dan potensi ekonomi secara merata yang mereka miliki, merupakan tujuan FIPO memberikan penilaian pada kategori ini.

Tabel 10

Isu Strategis Kategori Pemerataan Ekonomi		
Kategori/Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Pemerataan Ekonomi	Distribusi Pendapatan	Sejauh mana pendapatan terdistribusi secara merata diantara kelompok-kelompok masyarakat (kebijakan penataan penciptaan kesempatan yang sama bagi usaha sektor formal maupun sektor nonformal).
	Akses Modal	Seberapa jauh masyarakat dari kelas sosial yang berbeda mendapatkan kemudahan akses bagi permodalan
	Sarana Prasarana	Seberapa jauh upaya pemerintah kabupaten/kota mengatasi kesenjangan kemampuan usaha masyarakat akibat perbedaan ketersediaan sarana prasarana penunjang perekonomian.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Bantaeng menghadirkan program Penguatan Modal Kerja Tanpa Bunga, dengan isu strategis *akses modal*. Total perolehan nilai kabupaten yang terkenal dengan sebutan “butta toa” ini adalah 579, mengungguli Kabupaten Luwu Timur (560), Kep.Selayar (537), Pangkep (521), dan Wajo (491).

Pemerintah Kabupaten Bantaeng memandang perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha melalui wadah kelompok usaha mikro. Tidak hanya meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota kelompok.

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok maka pemerintah daerah memfasilitasi modal kerja bagi kelompok usaha mikro melalui kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Keunggulan program yang dimulai sejak tahun 2008 ini adalah pelaku usaha tidak dibebankan bunga alias modal usaha tanpa jasa, dengan jangka waktu

pengembalian modal adalah satu tahun yakni setiap tanggal 15 Desember.

Terdapat dua kategori bantuan untuk modal tanpa bunga ini yaitu untuk perorangan dan kelompok yang anggarannya bersumber dari APBD. Tahun 2009 total 187 kelompok dan perorangan, tahun 2010 bantuan digulirkan kembali kepada 134 kelompok dan perorangan, dan pada tahun 2011 kepada 76 kelompok dan perorangan. Usaha-usaha kecil yang dahulunya kekurangan modal sekarang mulai memperlihatkan kemampuan dalam permodalan sehingga dapat meningkatkan produksinya.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Luwu Timur mengadakan program Pengembangan Pasar Rakyat, dengan isu strategis *sarana prasarana*.

Minimnya sarana transaksi untuk pendistribusian barang dan jasa di kecamatan, serta distribusi pendapatan yang tidak merata, melatarbelakangi hadirnya program pengembangan pasar rakyat. Pembangunan dan renovasi pun mulai dilakukan sejak tahun 2009. Sampai dengan tahun 2012, sembilan kecamatan telah tersentuh program ini dengan menelan anggaran mencapai Rp14,4 miliar.

Pasar yang telah dibangun ataupun direnovasi, penempatan los/kiosnya tidak menimbulkan keributan karena pedagang yang telah menempati los/kios yang masih bersifat darurat sebelumnya tetap berhak menempati posisi itu kembali. Selain itu, pedagang bebas menempati los/kiosnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan program Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Isu strategisnya adalah *akses modal*.

Kesulitan yang dialami masyarakat nelayan memperoleh akses modal dari perbankan menginisiasi pemerintah bersama Coremap, membentuk lembaga ekonomi di setiap desa pesisir. Lembaga ini merupakan wadah yang disiapkan bagi masyarakat untuk mengakses pinjaman modal usaha. Pengelolaannya dipusatkan di setiap desa (91 desa pesisir).

Syarat keanggotaan LKM adalah masyarakat desa setempat. Anggota wajib membayar iuran pokok Rp10.000 dan iuran wajib Rp 5.000/bulan. Hal lainnya yang disampaikan kepada masyarakat adalah, bunga kredit usaha sebesar 1% dengan mensyaratkan adanya jaminan ketika melakukan peminjaman, dengan besaran maksimal pinjaman adalah Rp 2 juta (tergantung analisis kelayakan usaha). Waktu pengembalian pinjaman selama 10 bulan. Melalui program ini selain membantu penguatan modal usaha masyarakat, sekaligus menjadi alternatif profesi masyarakat keluarga nelayan.

Kabupaten Pangkep dengan program Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Padi. Isu strategisnya adalah *sarana prasarana*.



Potensi Kabupaten Pangkep bidang pertanian khususnya sektor persawahan cukup besar. Namun sulit dimaksimalkan karena kondisi alam yang tidak mendukung (sawah tadah hujan dan sumber air yang terbatas). Karena itu sejak tahun 2005, pemerintah daerah melakukan inisiatif pemberian bantuan handtraktor dan mesin pompa air kepada kelompok tani.

Mekanisme yang diterapkan adalah masyarakat diwakili ketua kelompok masing-masing mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian untuk mendapatkan bantuan handtraktor dan mesin pompa air. Dinas memverifikasi proposal yang ada sekaligus melakukan tinjauan kelayakan untuk mendapatkan bantuan handtraktor atau mesin pompa air. Setelah dianggap layak untuk menerima maka handtraktor/mesin pompa air akan didistribusikan kepada kelompok tani. Teknis pengelolaan di setiap kelompok tani berbeda-beda, pemerintah hanya menentukan patokan harga sewa maksimal handtraktor sehingga anggota kelompok (pemakai jasa) tidak terlalu terbebani.

Beda halnya dengan penggunaan jasa mesin pompa air. Anggota kelompok mengeluarkan sewa setelah panen selesai. Bentuk pungutan sewa dalam bentuk gabah, setiap menghasilkan 5 karung hasil produksi padi, maka keluar 1 karung sebagai ganti sewa mesin pompa. Semua keuntungan dari hasil pungutan sewa handtraktor/mesin pompa air dipersiapkan untuk membeli alat atau jasa perbaikan mesin, bahkan membeli handtraktor/mesin pompa air yang baru.

Keseriusan pemerintah dalam menggarap program ini nampak dari komitmen anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan bantuan handtraktor sebesar Rp 2,4 miliar pada 2010, dan meningkat tahun 2011 menjadi Rp 2,5 miliar, hingga tahun ini pemerintah telah menetapkan dalam APBD 2012 sebanyak Rp 3,3 miliar.

Kabupaten Wajo dengan program Bantuan Ekonomi Produktif Pertanian. Isu strategisnya adalah *sarana prasarana*.

Peningkatan produksi pertanian sulit dilakukan karena kondisi lahan tadah hujan yang seringkali terlambat diolah karena kekurangan sarana. Dengan memberikan stimulasi berupa dana subsidi, dapat membantu petani-petani dalam percepatan pengolahan lahannya. Ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

Program ini adalah program pemberdayaan melalui sharing antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengadaan sarana handtraktor bagi pertanian. Sharing tersebut adalah pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 6 juta dan Rp 7 juta per kelompok untuk uang muka pembelian handtraktor, sedangkan masyarakat bersedia secara bersama-sama dalam kelompok masing-masing menambahkan pembayaran sebanyak Rp 12 juta.

Prosesnya adalah, kelompok tani yang berminat untuk mengadakan traktor melalui mekanisme sharing tersebut mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pertanian dan Peternakan dilengkapi dengan kesediaan untuk menambah pembayaran sebesar Rp 12 juta. Proposal tersebut kemudian dilakukan verifikasi

oleh Dinas Pertanian dan Peternakan. Setelah lulus verifikasi, dilakukan pembukaan rekening kelompok di Bank BPD, dan dinas mentransfer dana sebesar Rp 6 juta / Rp juta. Berdasarkan surat kesediaan untuk menambahkan pembayaran, kelompok juga mentransfer dana yang disepakati berdasarkan kesediaan tersebut. Setelah itu baru dilakukan proses pembelian. Proses pembelian ini bisa difasilitasi dinas, atau dilakukan secara langsung kelompok masing-masing.

Tabel 11

**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Pemerataan Ekonomi**



KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	EKSISTING	TOTAL
1	Selayar	137.686	383.910	15.617	537.213
2	Bulukumba	126.572	145.680	15.558	287.810
3	Bantaeng	157.653	415.680	6.087	579.420
4	Jeneponto	122.122	112.080	11.341	245.543
5	Takalar	129.186	66.720	2.402	198.309
6	Gowa	144.256	113.760	7.769	265.784
7	Sinjai	155.169	69.240	12.104	236.514
8	Maros	129.625	110.400	7.500	247.525
9	Pangkep	147.575	360.825	12.909	521.309
10	Barru	143.925	65.040	20.249	229.214
11	Bone	131.775	109.560	2.898	244.233
12	Soppeng	130.900	64.200	9.905	205.005
13	Wajo	115.900	352.950	21.743	490.593
14	Sidrap	134.300	63.360	8.899	206.559
15	Pinrang	119.854	123.840	9.932	253.625
16	Enrekang	131.250	61.680	8.650	201.580
17	Luwu	133.250	335.250	17.366	485.866
18	Toraja	130.325	108.720	7.864	246.909
19	Luwu Utara	132.825	107.880	17.457	258.162
20	Luwu Timur	164.125	361.275	34.769	560.169
21	Makassar	130.775	62.520	13.346	206.641
22	Parepare	136.050	60.840	30.249	227.139
23	Palopo	146.950	107.040	8.708	262.698



3. Kategori Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber ekonomi potensial melalui alih teknologi dan penerapan teknologi tepat guna. Pemberdayaan bukan hanya ditujukan pada individu semata tetapi juga kepada lembaga-lembaga yang eksis di masyarakat.

Titik sentral dari kategori pemberdayaan ekonomi terdiri dari empat isu strategis, yaitu potensi dan problem ekonomi lokal, ekonomi lemah dan ekonomi lokal, pemberdayaan lembaga ekonomi lokal, serta kapasitas ekonomi rakyat.

Tabel 12

Isu Strategis Kategori Pemberdayaan Ekonomi		
Kategori/Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Pemberdayaan Ekonomi	Potensi dan Problem Ekonomi Lokal	Menggali, mengembangkan, dan memberdayakan potensi/sentra ekonomi guna mengatasi problematika ekonomi lokal.
	Ekonomi Lemah dan Ekonomi Lokal	Mengatasi problem yang dialami pelaku ekonomi lokal yang memiliki keterbatasan penguasaan faktor-faktor produksi yang merupakan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Hal ini menyangkut pembekalan teknis keahlian, keterampilan, manajerial, akses pasar modal dan kemitraan usaha.
	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Lokal	Pendirian atau pemberdayaan terhadap lembaga ekonomi seperti lembaga keuangan, koperasi, lumbung desa, badan usaha milik desa, maupun institusi kolektif ekonomi lokal lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.
	Kapasitas Ekonomi Rakyat	Peningkatan kapasitas ekonomi rakyat yaitu peningkatan kemampuan produksi ekonomi rakyat lokal secara umum, atas mata pencaharian yang digelutinya, dengan berbagai fasilitas penunjang ekonomi lokal.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Luwu Utara menginisiasi program Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir, dengan isu strategis *pemberdayaan lembaga ekonomi lokal*. Kabupaten Luwu Utara mengumpulkan nilai 639, mengungguli Kabupaten Bantaeng (630), Luwu Timur (627), Bulukumba (594), dan Barru (541).



Keberadaan koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) di kabupaten penghasil kakao ini, merupakan lembaga ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya di wilayah pesisir, berupa pemberian pinjaman modal usaha berdasarkan konsep syariah (tanpa bunga).

Sejak didirikan 2003 lalu, koperasi LEPP mengalami banyak kendala. Sejumlah penerima pinjaman modal usaha menyalahgunakan dana dan tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya banyak di antara mereka yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Kondisi tersebut tidak membuat pengurus berhenti menjalankan koperasi, bahkan kondisi ini menjadi pelajaran berharga untuk mengawal koperasi LEPP menjadi lebih baik.

Tahun 2008 pemerintah kembali mendorong penguatan program, dengan memberikan suntikan dana hibah sebagai modal penyegaran koperasi LEPP. Pengurus terus melakukan upaya untuk menemukan solusi yang tepat dengan mengubah pola pemberian pinjaman. Tahun 2010, pemberian modal berupa uang tunai beralih pada pemberian pinjaman sistem nota, hingga sampai pada solusi koperasi menyediakan barang secara langsung sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap pengambilan barang, masyarakat boleh meminjam dan tidak dikenakan biaya tambahan atas nilai pinjaman tersebut.

Usaha lainnya yang dikembangkan adalah koperasi pertanian yang memenuhi kebutuhan anggotanya seperti alat-alat pertanian, bibit, pupuk, dan pestisida. Ada pun jangkauan program tidak hanya fokus di daerah pesisir saja, tetapi masyarakat dataran tinggi.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Bantaeng, dengan program Kabupaten Benih Berbasis Teknologi. Isu strategisnya adalah *potensi dan problem ekonomi lokal*.

Titik tolak dari program, karena melihat tingginya ketergantungan petani terhadap bibit unggul baik itu padi, jagung maupun talas dengan biaya produksi yang sangat besar. Kondisi lahan di Bantaeng juga tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan, dan ternyata harga benih unggul lebih besar dibandingkan dengan hasil produksi. Dengan jeli, pemerintah daerah menjawab permasalahan yang ada dengan memaksimalkan potensi melalui pengembangan benih unggul tersebut.

Salah satu tujuan dasar program ini adalah memandirikan petani, memberi keterampilan dan pengetahuan baru yang memanfaatkan teknologi sehingga lebih berdaya dan mandiri. Ketergantungan terhadap benih dapat diminimalisir. Harga yang tinggi tentu akan memberi pendapatan lebih bagi petani.

Kabupaten Luwu Timur dengan inovasi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM. Isu strategisnya adalah *potensi dan problem ekonomi lokal*.

Program ini menitik beratkan pada upaya untuk memberdayakan UKM/

IKM agar memiliki daya saing yang kuat. Secara teknis, UKM/IKM terlebih dahulu diikuti dalam pelatihan-pelatihan seperti penggunaan peralatan, kewirausahaan, perkoperasian, peningkatan kualitas produk, dan pembuatan produk seperti coklat, makanan berbahan sagu, dan sebagainya.

Dalam hal pemasaran produk, UKM/IKM diikutsertakan dalam pameran-pameran di tingkat provinsi maupun nasional di Jakarta. Mereka difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan sertifikasi eksportir barang serta pemajangan produk di outlet UKM/IKM yang disediakan pemerintah setempat.

Kabupaten Bulukumba dengan program Sarjana Membangun Desa. Isu strategisnya adalah *pemberdayaan lembaga ekonomi lokal*.

Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan program pemberdayaan kelompok tani ternak yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan peternak, sehingga dapat mandiri dan mampu mengembangkan usaha budidaya ternak secara berkelanjutan.

Program SMD diperuntukkan untuk sarjana-sarjana peternakan dan kedokteran hewan yang menganggur, dengan tujuan untuk memberdayakan sarjana sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok tani ternak yang didampingi. Sarjana sebagai pendamping bagi para petani, selain memberikan pengetahuan tentang bagaimana melakukan pemeliharaan ternak dengan baik, pendamping juga ikut serta bersama petani dalam mengelola ternak.

Keuntungan dari program SMD adalah petani dapat menjual ternak dari hasil pengembangbiakannya, beberapa petani masih memanfaatkan tenaga ternak untuk mengolah sawahnya. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kotoran ternak sebagai kompos dan biogas. Pupuk kompos yang dihasilkan bahkan telah dikomersialkan.

Kabupaten Barru, dengan program *Show Room Sapi*. Isu strategisnya adalah *potensi dan problem ekonomi lokal*.

Program *Show Room Sapi* (SRS) pada dasarnya merupakan perkandangan sapi dengan tujuan meningkatkan upaya peternakan sapi secara terintegrasi. *Show room* adalah sebuah konsepsi, bisa juga sebuah *branding* atau kemasan untuk menunjukkan bahwa ada pola dan standar yang berbeda dengan perkandangan biasa yang dilakukan masyarakat selama ini. Melalui SRS sapi dijadikan sebagai komoditas ekonomis yang dapat bernilai untuk investasi.

Pola SRS merupakan solusi bagi masyarakat yang memiliki modal namun tidak mempunyai waktu untuk mengembangkan usaha. Sebagai sebuah program pemberdayaan dalam pelaksanaannya tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi swadaya masyarakat yang ada, maupun potensi sumber daya alam. Program ini juga memberdayakan petugas-petugas pemerintah di lapangan melalui intensifikasi teknologi inseminasi, pengobatan, pengolahan limbah, teknologi pakan ternak.



Dengan optimalisasi program ini, dapat menyerap tenaga kerja serta membangun silaturahmi antara pemodal-peternak melalui pola kemitraan usaha. Antara pemodal, pemerintah dan pasar diintegrasikan dalam sebuah pola konsorsium, sehingga pemasaran ternak dan hasil lainnya menjadi lebih efektif.

Secara khusus kriteria SRS, tersedia kandang koloni kapasitas minimal 10 ekor, tersedia lahan HMT minimal 1 ha, tersedia tempat pengolahan limbah, tersedia sarana produksi ternak (Sapronak), pemanfaatan limbah pertanian, tersedia obat-obatan, penerapan teknologi dan manajemen peternakan, tersedianya jaringan informasi produksi dan pemasaran.

Pada program ini pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk pembentukan *show room* sapi dengan dunia usaha yang bisa menjadi partner pembentukan kandang. Hasilnya hingga tahun 2011 telah terbentuk sekitar 30 unit *show room* sapi dengan kapasitas rata-rata 10 ekor sapi per kandangnya. Berdasarkan hasil sensus sapi, Kabupaten Barru menduduki urutan ke-6 populasi sapi terbanyak dengan populasi 53.201 ekor per Mei 2011.



Tabel 13
Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Pemberdayaan Ekonomi

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	EKSISTING	TOTAL
1	Selayar	130.240	127.000	13.789	271.029
2	Bulukumba	123.180	457.740	13.396	594.316
3	Bantaeng	147.740	471.150	11.072	629.962
4	Jeneponto	116.040	107.040	10.482	233.562
5	Takalar	121.660	146.520	2.336	270.516
6	Gowa	136.740	60.840	11.357	208.937
7	Sinjai	156.560	177.600	12.119	346.279
8	Maros	126.160	369.330	6.223	501.713
9	Pangkep	139.560	352.275	21.047	512.882
10	Barru	135.880	387.105	18.227	541.212
11	Bone	131.200	107.880	3.766	242.846
12	Soppeng	124.900	61.680	9.510	196.090
13	Wajo	115.980	63.360	22.987	202.327
14	Sidrap	128.800	312.945	13.441	455.186
15	Pinrang	114.454	123.840	13.619	251.913
16	Enrekang	120.860	386.820	15.201	522.881
17	Luwu	129.547	181.800	17.320	328.667
18	Toraja	126.480	125.520	10.538	262.538
19	Luwu Utara	125.860	489.030	23.848	638.738
20	Luwu Timur	159.220	423.660	43.936	626.816
21	Makassar	130.960	116.080	24.197	271.237
22	Parepare	138.120	127.200	18.710	284.030
23	Palopo	137.540	385.020	9.700	532.260

Grafik 3

Ranking Kabupaten/Kota Kategori Pemberdayaan Ekonomi



B. Parameter Pelayanan Publik

1. Kategori Layanan Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu bagaimana meningkatkan harkat dan martabat manusia. Peran tersebut dapat diwujudkan bilamana lembaga pendidikan sebagai pencetak generasi penerus mampu mengatasi tantangan global sebagai konsekuensi dari berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, lembaga pendidikan dituntut mampu menghasilkan kualitas SDM yang kreatif dan inovatif.

Merujuk pada Undang-Undang pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dunia pendidikan mempunyai peranan penting sebagai pencetak generasi penerus, demi kemajuan suatu daerah bahkan suatu bangsa. Untuk itu sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya, kesamaan akses mendapatkan pendidikan, kualitas SDM pendidikan, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Atas dasar ini, penilaian inovasi FIPO pada kategori layanan pendidikan berpijak pada lima isu strategis yaitu, aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata), ketercukupan SDM, sarana prasarana pendidikan, manajemen dan sistem pendidikan, komitmen anggaran pendidikan, dan partisipasi penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 14

Isu Strategis Kategori Layanan Pendidikan		
Kategori/Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Layanan Pendidikan	Aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata)	Bagaimana pemerintah memberikan kesempatan yang sama atas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya di semua wilayah yang ada. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga di negeri ini. Karenanya ketersediaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang terjangkau, murah, berkualitas menjadi sangat bernilai artinya.
	Ketercukupan SDM, Sarana, Prasarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Rasio tenaga pendidik dengan mengukur seberapa besar intensitas interaksi personal guru dan murid yang akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar.• Rasio sarana dan prasarana, lebih melihat ketersediaan penunjang pendidikan dilihat dari

Kategori/ Indikator	Isu Strategis	Penekanan
		sisi keterjangkauan dan pemerataan secara geografis kependudukan. Disisi lain, besaran anggaran pendidikan akan mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam menjalankan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya.
	Managemen dan Sistem Pendidikan (<i>Quality</i>)	Bagaimana upaya pemerintah kabupaten/kota menciptakan mekanisme pendidikan yang memiliki output berdaya saing tinggi yang dapat mengakomodasi kecerdasan lokal. Di banyak daerah umumnya menggagas program sekolah plus, kelas akselerasi, atau pun sekolah unggulan.
	Komitmen Anggaran Pendidikan Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan	Alokasi anggaran pendidikan melalui APBD atau melalui sumber dari pendanaan lain. Pemerintah pusat telah mengubah sistem pendidikan dengan menawarkan pola yang lebih aspiratif seperti Manajemen Berbasis Sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah semestinya mengapresiasikannya.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Jeneponto mencanangkan program Sekolah Unggulan untuk Generasi Pattabba pada kategori layanan pendidikan dengan isu strategis *manajemen dan sistem pendidikan*. Total nilai Kabupaten Jeneponto adalah 663, disusul Gowa (609), Takalar (579), Palopo (575), dan Bantaeng (573).

Sekolah Patta'ba merupakan sekolah andalan Kabupaten Jeneponto yang memiliki tingkat kecerdasan akademik siswanya di atas rata-rata, tak terkecuali kecerdasan akhlak dan perilakunya. Hal tersebut disebabkan karena proses seleksi penerimaan siswa baru sangat ketat, kemudian ditempa proses pembelajaran yang maksimal dengan nilai-nilai kearifan lokal setelah siswa masuk di sekolah Patta'ba.

Harapan pemerintah dari program sekolah Patta'ba sebenarnya adalah supaya sekolah ini dapat melahirkan alumni pencetak calon pemimpin berkualitas masa depan, sehingga mampu bersaing baik lokal, nasional maupun internasional.

Selama Program ini dicetuskan pemerintah melalui Dinas Pendidikan tahun 2007 hingga sekarang, tercatat sudah tereplikasi kepada sembilan sekolah dalam bentuk kelas dengan istilah kelas Patta'ba. Sekolah yang telah menerapkan kelas Patta'ba hingga sekarang adalah SMAN 1 Binamu, SMAN 2 Binamu, SMAN 1 Tamalatea, SMAN 1 Batang, SMAN 1 Kelara, SMAN 1 Bangkala Barat, SMAN 1 Bangkala, SMAN 1 Bontoramba, SMAN 1 Turatea.

Program sekolah Patta'ba cukup berhasil, terbukti 100 persen siswa lulus



ujian nasional dan lulus perguruan tinggi negeri, hingga ada yang mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi Australia dan Jepang. Torehan prestasi dari berbagai lomba akademik tingkat lokal maupun nasional juga telah diraih.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Gowa dengan program Punggawa D'Emba. Isu strategisnya adalah *manajemen dan sistem pendidikan*.

Program ini merupakan upaya pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang aktif di kelas. Punggawa D'Emba Education Program (PDEP) menggunakan sistem *moving class* (kelas berpindah) dengan fasilitas audio visual dengan tujuan utama meningkatkan kualitas guru dan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, memiliki keterampilan hidup, positif mindset, dan jiwa nasionalisme yang tinggi, serta memahami kebudayaan lokal.

Pada awal program, diselenggarakan pelatihan bagi guru-guru tentang format *moving class* dan penggunaan perangkat audio visual. Setiap guru yang telah mendapatkan pelatihan diminta untuk melakukan pelatihan yang sama kepada semua guru-guru di sekolahnya.

Mata pelajaran yang menggunakan pembelajaran audio visual difokuskan pada mata pelajaran yang masuk dalam Ujian Akhir Nasional. Konsep materi mata pelajaran tersebut dibuat guru sekolah yang telah ditunjuk dalam suatu tim sedangkan inputnya ke dalam *software* dibuat oleh I-Solution sebagai mitra dalam pembelajaran audio visual tersebut.

Jumlah sekolah dengan PDEP sampai dengan tahun anggaran 2011 adalah 145 sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah. Target Pemda Gowa hingga tahun 2015 akan menerapkan PDEP di semua sekolah (539 Sekolah) di Kabupaten Gowa.

Kabupaten Takalar, dengan program Beasiswa untuk Pelajar Miskin Berprestasi. Isu strategisnya adalah *aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata)*.

Pada tahun 2010, anggaran yang dikucurkan dari APBD untuk mengawal program ini sebesar Rp 400 juta yang tersalur ke 1500 siswa miskin berprestasi. Pada 2011 meningkat menjadi Rp 500 juta ke 2000 siswa.

Selain anggaran dari APBD, Dinas Pendidikan juga bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Sadakah kecamatan untuk memberikan bantuan peralatan sekolah kepada murid SD. Bantuan ini berupa pakaian seragam, sepatu, tas, dan alat tulis. Sumber dana yang digunakan untuk membelikan peralatan murid tersebut bersumber dari infak dan sadakah guru-guru, kepala sekolah dan jajarannya dalam Dinas Pendidikan.

Kota Palopo dengan program Kelas Internasional. Isu strategisnya adalah



managemen dan sistem pendidikan.

Kelas internasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Palopo dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. Program ini adalah layanan pendidikan dengan kelas khusus yang menggunakan standar nasional dan standar internasional.

Layanan kelas internasional bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bermutu tinggi yang diakui dunia internasional agar lulusannya memiliki lisensi internasional melalui sertifikasi ujian internasional yang berafiliasi dengan *University of Cambridge Internasional Examination*. Siswa lulusan kelas ini akan memiliki dua ijazah, ijazah berstandar nasional dan ijazah berupa sertifikat ujian internasional dari *University of Cambridge* yang dapat dipergunakan untuk mendaftar bebas tes di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan University of Cambridge, di dalam maupun di luar Indonesia.

SMAN 1 Palopo yang memiliki *school sister* SMAN 1 Yogyakarta sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi untuk membuka kelas internasional merupakan satu-satunya sekolah di Sulawesi Selatan, dan satu dari dua sekolah di Indonesia bagian timur yang membuka kelas internasional. Karena itulah program ini mewakili dimensi Kota Palopo sebagai kota tujuan pendidikan, di mana siswanya tidak hanya berasal dari kota Palopo tetapi juga dari luar kota bahkan luar provinsi.

Kabupaten Bantaeng, dengan program Bantuan Pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu. Isu strategisnya adalah *aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata)*.

Melihat problema yang dihadapi siswa khususnya siswa kurang mampu di tingkatan sekolah menengah maka dianggap penting untuk memberi bantuan pendidikan sebagai upaya meringankan beban siswa dan orang tua. Seleksi dilakukan untuk siswa berprestasi di seluruh sekolah menengah di Kabupaten Bantaeng, dalam bidang akademik maupun seni dan olahraga. Sedang untuk siswa tidak mampu, sekolah mengajukan nama-nama siswa kurang mampu dalam segi ekonomi. Selanjutnya Dinas Pendidikan bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap data tersebut.

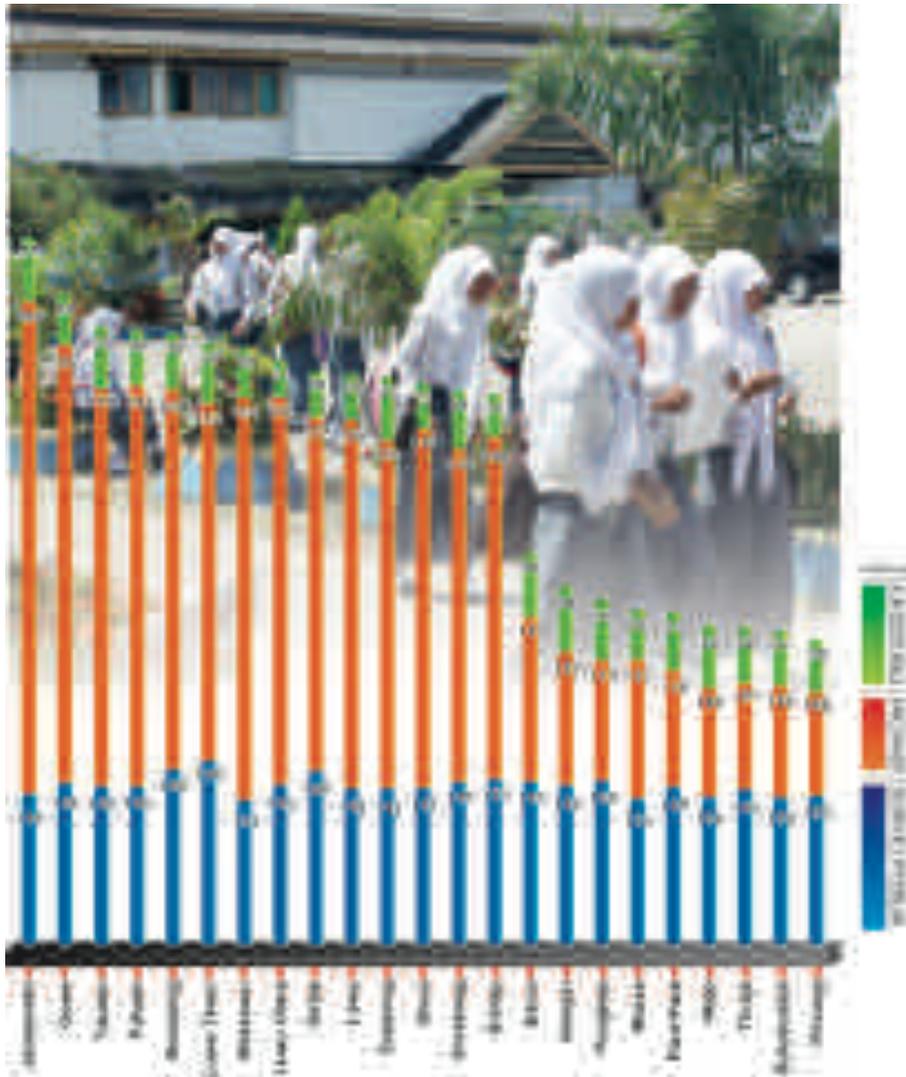
Tahun 2010 jumlah siswa yang dibantu berjumlah 300 siswa dengan bantuan Rp 450.000/siswa, di tahun 2011 meningkat baik untuk jumlah penerima maupun besaran bantuan menjadi Rp 465.000/siswa untuk 320 siswa. Sumber anggaran program ini berasal dari APBD Kabupaten Bantaeng.



Tabel 15**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Layanan Pendidikan**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	EKSISTING	TOTAL
1	Selayar	145.292	127.200	59.816	332.308
2	Bulukumba	132.467	106.200	50.663	289.330
3	Bantaeng	160.258	361.500	51.687	573.445
4	Jeneponto	137.500	468.525	56.629	662.654
5	Takalar	143.283	379.095	56.581	578.959
6	Gowa	149.417	415.620	44.265	609.301
7	Sinjai	159.525	336.600	42.280	538.405
8	Maros	133.133	131.400	44.778	309.311
9	Pangkep	149.525	113.760	56.383	319.668
10	Barru	148.733	156.600	58.180	363.513
11	Bone	143.192	340.800	40.590	524.582
12	Soppeng	142.533	330.000	57.120	529.653
13	Wajo	134.975	102.000	57.762	294.737
14	Sidrap	151.267	325.590	37.039	513.896
15	Pinrang	133.092	100.320	49.812	283.224
16	Enrekang	148.767	316.320	52.234	517.321
17	Luwu	142.148	349.965	41.266	533.379
18	Toraja	140.838	101.160	51.611	293.609
19	Luwu Utara	144.550	370.290	31.489	546.329
20	Luwu Timur	169.975	338.415	53.441	561.831
21	Makassar	130.808	384.360	43.330	558.498
22	Parepare	143.983	109.560	53.644	307.187
23	Palopo	145.767	381.150	48.194	575.111

Grafik 4
Ranking Kabupaten/Kota
Kategori Layanan Pendidikan



2. Kategori Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tubuh yang sehat akan berimplikasi pada produktivitas seseorang maupun kelompok. Kesehatan tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan penduduk, namun sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan program pembangunan suatu daerah. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah berdasarkan situasi derajat kesehatan.

Beberapa program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk diantaranya adalah peningkatan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah, yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan, serta penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, secara luas pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada kategori ini, ada lima isu strategis yang diajukan FIPO sebagai komponen dalam penilaian inovasi, yaitu aksesibilitas, ketercukupan SDM, sarana, prasarana, sistem perlindungan kesehatan, komitmen anggaran kesehatan, dan partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan.

Tabel 16

Isu Strategis Kategori Layanan Kesehatan		
Kategori/Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Layanan Kesehatan	Aksesibilitas (mudah, mudah, terjangkau dan merata)	Apakah pemerintah kabupaten/kota berhasil memunculkan serangkaian inisiatif dan terobosan inovatif untuk membuat ketersediaan layanan yang semakin murah, mudah, terjangkau dan merata.
	Ketercukupan SDM, Sarana, Prasarana Kesehatan	Kebijakan dan strategi pemerintah kabupaten/kota dalam mengatasi problem ketersediaan tenaga medis dan paramedis, sarana dan prasarana kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan.
	Sistem Perlindungan Kesehatan	Jaminan kesehatan masyarakat terutama kalangan bawah masih terbebani mahalanya biaya kesehatan.
	Komitmen Anggaran Kesehatan	Komitmen anggaran di bidang kesehatan sedikit banyak bisa mencerminkan bantuan bagi masyarakatnya.
	Partisipasi Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan tentu banyak inovasi yang bisa ditampilkan pemerintah daerah. Sebagai contoh, optimalisasi sistem informasi kesehatan maupun optimalisasi sarana prasarana kesehatan bisa memunculkan varian inovasi yang ujungnya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Luwu Utara menempati urutan pertama untuk kategori layanan kesehatan pada isu strategis *partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan* melalui program Arisan Jaga (Jamban Keluarga). Kabupaten Luwu Utara mengumpulkan nilai 651, disusul Kabupaten Bantaeng (645), Sinjai (620), Enrekang (615), dan Kota Makassar (594).

Kabupaten yang memiliki luas wilayah 7.502,58 km² ini pada dasarnya belum dipadati pemukiman penduduk, sehingga peluang masyarakat buang air di sembarang tempat sangat terbuka. Kesadaran masyarakat pun tentang upaya menjaga kesehatan lingkungan masih rendah, yang didukung kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membangun WC/jamban. Menghadapi kondisi tersebut pemerintah dengan menerapkan skema partisipatif kemudian menginisiasi program Arisan Jaga (Jamban Keluarga).

Arisan Jaga adalah arisan yang dilakukan masyarakat setempat, dengan tujuan hasil arisan dipersiapkan untuk membeli bahan dan alat, untuk membangun jamban (WC). Besarnya setoran tergantung kesepakatan masing-masing kelompok masyarakat yang dikumpul dan dilot setiap bulannya.

Agar program ini dapat berjalan maksimal, pemerintah melibatkan berbagai pihak, dalam bentuk MoU, seperti kepala SKPD terkait, para camat, dan kepala puskesmas. Dinas Pekerjaan Umum (PU) misalnya, menjadikan kepemilikan jamban sebagai syarat mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan berbagai upaya pemerintah, hasilnya cukup menggembirakan, tercatat sudah sembilan desa di Kabupaten Luwu Utara berstatus bebas buang air di sembarang tempat (ODF).

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Bantaeng mengajukan program Peranan CSO dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, dengan isu strategis *partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan*.

Kematian ibu masih menjadi momok bagi masyarakat. Kendalanya, sebagian besar masyarakat menganggap masalah konsultasi, pemberian gizi sampai persalinan dan pra persalinan ke bidan atau rumah sakit tidaklah penting. Seperti di Kabupaten Bantaeng, pada tahun 2010 kematian ibu mencapai sebelas orang. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan merancang program pencegahan kematian ibu hamil dengan bekerjasama beberapa organisasi perempuan berbasis agama atau *Civil Society Organisation* (CSO) yaitu Fatayat NU, Aisyiyah dan dibantu PKK.

Ada dua hal yang mendasari mengapa kerjasama dengan organisasi keagamaan dianggap jalan keluar bagi pencegahan kematian ibu hamil. Pertama, karena tendensi keagamaan, masyarakat lebih mudah diberi pemahaman. Kedua, memaksimalkan peran masyarakat dalam membangun kesadaran kesehatan di

lingkungan karena masih kurangnya tenaga kesehatan di tingkat desa.

Program ini telah dilakukan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bantaeng di tiga desa percontohan program, yaitu Desa Rappoa, Biangkeke dan Lumpungan. Awalnya, Dinas Kesehatan memberi pelatihan kepada kader desa dan kader CSO. Kader ini dibantu bidan menyusun program berkesinambungan, dan secara bertahap memberi pemahaman dan pembinaan kepada ibu-ibu hamil yang ada di desa. Hasilnya, tahun 2011 jumlah kematian ibu hamil berkurang drastis menjadi tiga kasus kematian.

Kabupaten Sinjai dengan program Pelibatan Masyarakat dalam Peningkatan Layanan Rumah Sakit. Isu strategisnya adalah *partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan*.

Dalam meningkatkan pelayanan seringkali ada gap antara penyedia layanan dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai mencoba membuka diri untuk mendengar apa yang diinginkan pasien dan keluarganya, mengenai kebutuhan pelayanan berdasarkan hak-hak dasar pasien. Diadakan dialog antara manajemen rumah sakit dengan keluarga pasien untuk menangkap aspirasi, keluhan-keluhan mereka terhadap pelayanan rumah sakit di RSUD Sinjai.

Diseminasi bentuk-bentuk pelayanan yang semakin baik di RSUD Sinjai telah berkembang sedemikian rupa dari masukan-masukan warga melalui ruang-ruang publik yang diprogramkan secara berkala oleh manajemen dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di RSUD Sinjai. Dari pengembangan ruang publik ini pula yang menjadi latar belakang adanya layanan kegawatdaruratan, seperti peningkatan pelayanan Instalasi Gawat Darurat dan adanya *Emergency 118* yang bertugas melayani masyarakat Sinjai dalam kondisi gawat darurat, di dalam kota maupun luar kota yang *stand by 24 jam* berdasarkan telepon/panggilan masyarakat.

Kabupaten Enrekang dengan program Puskesmas ber-ISO. Isu strategisnya adalah *sistem perlindungan kesehatan*.

Optimalisasi Pelayanan kesehatan pada masyarakat sangat dibutuhkan, sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meskipun Enrekang bukan daerah kota besar tetapi memiliki keseriusan dan komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke pelosok.

Tahun 2009, tiga puskesmas diantaranya puskesmas Baraka, Maiwa, Anggeraja yang diajukan mendapatkan sertifikat ISO (*International Organisation for Standardization*) 9001:2008. Proses audit setiap enam bulan sekali oleh tim lembaga sertifikasi internasional (SAI) pun rutin dilakukan. Melihat



dampak yang baik, tahun 2011 pemda kembali mengajukan dua puskesmas berstandar ISO, yaitu puskesmas Sudu dan Kabere. Sebagai syarat PKM ISO adalah pemenuhan sumber daya manusia yang memadai misalnya penyediaan dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya untuk membantu memaksimalkan pelayanan kesehatan. Puskesmas di Baraka misalnya, telah membuat terobosan yaitu melakukan program Pendidikan (konseling) Kesehatan Ibu dan Anak.

Kota Makassar dengan program Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO. Isu strategisnya adalah *aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata)*.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah perihal yang terus menjadi fokus perhatian pemerintah. Seperti pada kategori kesehatan misalnya, puskesmas terus didorong untuk meningkatkan eksistensi dan peranannya sebagai sebenar-benarnya pusat kesehatan bagi masyarakat.

Diawali pada tahun 2007, pemerintah kota menerapkan pola manajemen pengelolaan puskesmas yang lebih profesional melalui proses sertifikasi manajemen mutu ISO (*International Organisation for Standardization*). Puskesmas Bara-Barayya yang ditunjuk sebagai *pilot project*, secara garis besar memperlihatkan kemajuan menggembirakan. Tak heran jika tahun-tahun berikutnya, program sertifikasi ISO ini telah direplikasi pada tujuh puskesmas lainnya.

Peningkatan mutu yang semakin maju, tentu akan sangat berpengaruh pada kepuasan masyarakat. Stigma pelayanan rendah yang selama ini melekat pada puskesmas perlahan mulai luntur, berganti dengan pelayanan berkualitas. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Masyarakat terbantu dengan pelayanan yang lebih dekat, murah dan berkualitas, sedang pemerintah terbantu dengan pengeluaran dana yang minim karena subsidi yang kecil.



Tabel 17**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Layanan Kesehatan**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	EKSISTING	TOTAL
1	Selayar	208.495	103.200	30.262	341.957
2	Bulukumba	187.855	328.875	30.182	546.912
3	Bantaeng	235.850	374.950	33.990	644.790
4	Jeneponto	193.260	331.263	30.871	555.393
5	Takalar	204.502	350.138	25.700	580.339
6	Gowa	215.080	102.500	24.306	341.886
7	Sinjai	239.765	343.863	36.563	620.191
8	Maros	195.628	281.013	39.622	516.262
9	Pangkep	220.508	283.800	25.345	529.653
10	Barru	212.528	91.300	36.721	340.548
11	Bone	203.715	151.500	23.512	378.727
12	Soppeng	197.070	88.500	38.921	324.491
13	Wajo	191.493	274.225	32.839	498.556
14	Sidrap	227.275	332.113	29.185	588.572
15	Pinrang	189.239	91.300	18.756	299.295
16	Enrekang	219.685	359.400	36.184	615.269
17	Luwu	203.708	134.000	26.935	364.643
18	Toraja	209.873	92.000	31.956	333.829
19	Luwu Utara	207.367	391.938	51.475	650.780
20	Luwu Timur	243.253	141.000	43.453	427.706
21	Makassar	195.648	354.375	43.886	593.909
22	Parepare	214.945	92.000	50.139	357.084
23	Palopo	216.630	263.300	62.052	541.982

Grafik 5

Ranking Kabupaten/Kota Kategori Layanan Kesehatan



3. Kategori Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan

Administrasi sebagai proses penyelenggaraan kebijaksanaan secara spesifik dioperasionalkan dalam konteks upaya mengurangi/menghilangkan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pelayanannya. Administrasi yang baik akan mengoptimalkan tercapainya tujuan ataupun mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

Pada kategori ini, layanan administrasi dibedakan menjadi dua, yaitu layanan administrasi kependudukan dan administrasi perizinan. Secara umum, keduanya fokus pada kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi dengan tujuan terbentuknya manajemen pelayanan untuk keperluan perizinan dan kependudukan yang lebih efektif dan efisien. Penilaian inovasi yang dilakukan FIPO terhadap layanan administrasi kependudukan dan perizinan menekankan pada dua isu strategis yaitu, aksesibilitas layanan serta jaminan keadilan dan sistem pelayanan.

Tabel 18

Isu Strategis Kategori Layanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan		
Kategori/Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Layanan Administrasi	Aksesibilitas Layanan Kependudukan dan Perizinan	Apakah program (cepat, mudah, murah, memunculkan efektivitas, efisiensi) serangkaian terobosan inovatif untuk membuat layanan administratif semakin cepat, mudah, dan murah.
	Jaminan Keadilan dan Sistem Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana jaminan keadilan akses pelayanan? Adakah jaminan transparansi yang terbebas dari distorsi pelayanan oleh birokrasi? <ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah langkah yang dilakukan pemda untuk membangun <i>sustainability</i> perubahan pelayanan administrasi publik. (a) langkah teknis, yaitu upaya menjaga kesinambungan perubahan pelayanan dari sisi keandalan teknis pelayanan administrasi dasar, baik untuk SDM yang menjalankannya maupun dari sisi fasilitas. (b) langkah <i>customer input sustainability</i>, berupa upaya pemda untuk tetap mempertahankan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi dasar. (c) langkah yuridis, yaitu upaya pemda menjaga <i>sustainability</i> perubahan melalui dikeluarkannya produk hukum daerah untuk menjamin langkah teknis, maupun langkah <i>customer input</i>. (d) <i>financial sustainability</i>, yaitu upaya pemda untuk konsisten memberikan dukungan anggaran untuk menjalankan perubahan layanan.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Luwu Timur dinilai berhasil dalam Layanan Prima Paripurna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Isu strategis program ini adalah *aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, efisiensi)*. Luwu Timur menempati urutan pertama dengan total nilai 816, diikuti Palopo (750), Bantaeng (621), Maros (604), dan Bulukumba (588).

Kemudahan mengurus perizinan merupakan upaya yang diwujudkan KPPT untuk mendukung visi kabupaten menuju kabupaten agro industri. Sentuhan program memfokuskan pelayanan terbaik bagi masyarakat, seperti kemudahan, cepat, tidak berbelit-belit, dan gratis.

Setiap pemohon yang datang mengurus perizinan dimanjakan dengan berbagai layanan fasilitas. Dilakukan pula pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat. Pihak KPPT melayani langsung bagi pemohon baru maupun perpanjangan. Pendaftaran dilakukan di lapangan dengan mengisi formulir pendaftaran/perpanjangan sedang proses penyelesaian di kantor. Setelah selesai, surat izin di antar langsung ke pemohon. Perkembangan yang signifikan pun terjadi pada jumlah perizinan yang ditangani. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya 8 jenis perizinan, pada tahun 2011 meningkat menjadi 40 jenis perizinan.

Dalam hal pelayanan, sudah selayaknya jika masyarakat tidak perlu lagi menunggu lebih lama komitmen pemerintah. Jadi inovasi yang ditawarkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini merupakan wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pemerintah.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kota Palopo mengandalkan program Layanan Perizinan Prima melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), dengan isu strategis *aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, efisiensi)*.

Konsep penyelenggaraan pelayanan KPT adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

Keberadaan KPT sejak tahun 2007 mendukung tumbuhnya iklim investasi di Kota Palopo. Jumlah perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010 KPT melayani 14 jenis perizinan, jumlah perizinan yang dikeluarkan mencapai 6.870 izin, tahun 2011 masih dengan jenis perizinan yang sama jumlah perizinan yang dikeluarkan mencapai 8.162 izin. Bertambahnya jumlah perizinan yang dikeluarkan disebabkan penerapan

layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Kabupaten Bantaeng mengajukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), dengan isu strategis *aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, efisiensi)*.

KPTSP hadir sejak tahun 2009 dengan melayani sepuluh jenis perizinan. Tiga dari sepuluh jenis perizinan tersebut telah digratiskan yaitu SIUP, TDP, dan IUI. Pelayanan yang diberikan pun telah transparan dan akuntabel, disertai layanan tambahan antar berkas bagi masyarakat yang belum mengambil perizinannya, sedang lama waktu pelayanan atau penerbitan izin telah maksimal.

Kabupaten Maros dengan program Layanan Perizinan Terpadu. Isu strategisnya adalah *aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, efisiensi)*.

Butta Salewangang melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) mengusung program Layanan Perizinan Terpadu dengan jumlah layanan 19 jenis perizinan. Dari 19 jenis perizinan tersebut 17 diantaranya telah digratiskan.

Bergabungnya Penanaman Modal dengan KPTSP sejak tahun 2011 diharapkan semakin mempermudah bagi masyarakat pada umumnya dalam mengurus perizinan, dan kemudahan bagi investor pada khususnya dalam berinvestasi.

Kabupaten Bulukumba dengan program Unit *Mobile* Pelayanan Administrasi Kependudukan. Isu strategisnya adalah *aksesibilitas layanan (cepat, mudah, murah, efektivitas, efisiensi)*.

Masih banyaknya masyarakat Bulukumba yang belum memiliki dokumen kependudukan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan itu sendiri dan keberadaan tempat tinggal yang jauh dari ibukota kabupaten, mendukung lahirnya program ini. Hal ini juga menjadi sarana bagi pemerintah dalam upaya mendekatkan diri secara langsung kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang maksimal.

Mekanisme yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengunjungi langsung desa yang masyarakatnya telah mengusulkan untuk membuat KTP dan KK. Pelayanan yang diberikan dianggap cukup maksimal karena mobil layanan sendiri telah dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk kepentingan pembuatan KTP dan KK.



Tabel 19

**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Layanan Administrasi dan Perizinan**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	TOTAL
1	Selayar	279.085	127.200	406.285
2	Bulukumba	249.825	338.085	587.910
3	Bantaeng	307.650	313.260	620.910
4	Jeneponto	252.180	102.840	355.020
5	Takalar	255.340	128.880	384.220
6	Gowa	275.610	131.400	407.010
7	Sinjai	303.465	103.680	407.145
8	Maros	265.248	338.625	603.873
9	Pangkep	288.390	128.880	417.270
10	Barru	275.465	104.520	379.985
11	Bone	261.985	128.880	390.865
12	Soppeng	262.095	105.360	367.455
13	Wajo	251.010	106.200	357.210
14	Sidrap	283.317	109.560	392.877
15	Pinrang	222.840	333.270	556.110
16	Enrekang	286.830	125.520	412.350
17	Luwu	274.910	148.200	423.110
18	Toraja	265.460	103.680	369.140
19	Luwu Utara	272.959	111.240	384.199
20	Luwu Timur	320.925	494.835	815.760
21	Makassar	257.785	159.120	416.905
22	Parepare	283.090	110.400	393.490
23	Palopo	284.090	466.395	750.485



Grafik 6

**Ranking Kabupaten/Kota
Kategori Layanan Administrasi Kependudukan
dan Perizinan**



C. Parameter Performa Politik

1. Kategori Partisipasi Publik

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan maupun proses implementasi dan evaluasi merupakan isu yang masih sulit untuk terwujud dalam era otonomi. Pelibatan dalam berbagai level kebijakan itulah yang selama ini kita kenal dengan istilah partisipasi. Konsepsi ini tidak sekadar merupakan keterlibatan masyarakat dalam prosedural demokrasi yang hanya terdefinisi dalam pemenuhan hak politik untuk memilih. Tetapi, konsepsi partisipasi sejatinya juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan, terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan.

Konsep partisipasi sendiri telah dikenal sejak tahun 1970-an, namun dalam pelaksanaannya, masih belum ditemukan sebuah format yang tepat. UU No.25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) menegaskan salah satu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, secara yuridis format partisipasi masyarakat telah mendapatkan ruang yang cukup memadai.

Terkait kategori partisipasi publik, FIPO menekankan pada tiga isu strategis, yaitu proses pembangunan (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi), proses penganggaran publik, dan proses pembuatan kebijakan daerah.

Tabel 20

Isu Strategis Kategori Partisipasi Publik		
Kategori/ Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Partisipasi Publik	Proses Pembangunan (perencanaan, implementasi, dan evaluasi)	Partisipasi publik dalam pembangunan perencanaan menyoroti inisiatif program pemerintah yang secara aktif berusaha memfasilitasi monitoring dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.
	Proses Penganggaran Publik	Masyarakat didorong ikut dalam pemrograman pembangunan dan dalam penganggaran publik. Dalam hal ini disoroti inisiatif program pemerintah kabupaten/kota yang secara aktif berusaha memfasilitasi masyarakat dalam proses penganggaran publik. Partisipasi dapat diwujudkan dalam proses penganggaran APBD, dan atau hanya proyek tertentu saja.
	Proses Pembuatan Kebijakan Daerah	<ul style="list-style-type: none">● Penilaian difokuskan pada inisiatif/program pemerintah kabupaten/kota secara aktif berusaha memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah dan kebijakan publik strategis lainnya.● Contoh: perda-perda dan regulasi lainnya.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kota Parepare, melalui program Perencanaan Anggaran Berbasis Masyarakat, dengan isu strategis *proses penganggaran publik*, berhasil mengumpulkan nilai 722, mengungguli Kota Palopo (696), Kabupaten Luwu Timur (635), Gowa (597), dan Luwu Utara (583).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) sepatutnya menjadi ajang fasilitasi kebutuhan masyarakat melalui kewenangan pemerintah. Esensi musrembang sangat jelas, yaitu ruang dialog dan transfer pemikiran dalam rangka mempersiapkan program yang substansial. Namun, Musrembang seringkali hanya menjadi even tahunan yang dilaksanakan hanya untuk menunaikan tanggungan, menggugurkan kewajiban, tanpa dibarengi niat dan tujuan dalam mewujudkan pembangunan.

Sejak tahun 2010, Pemerintah Kota (pemkot) Parepare mendesain program Musrembang yang jauh lebih partisipatif, merata, dan berkeadilan. Modelnya, selain membagi anggaran dalam pagu sektoral yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) anggaran juga dibagi dalam pagu wilayah dalam hal ini kelurahan. Musrembang partisipatif berbasis masyarakat ini efektif diterapkan pada tahun 2011.

Pagu wilayah yang diberikan merata kepada setiap kelurahan pada tahun 2011 berjumlah Rp 1,06 miliar yang diperoleh dari pembagian merata 22 kelurahan. Standar dana ini yang dijadikan plafon anggaran maksimal setiap kelurahan dalam menyusun program. Dalam dua kali masa penerapan Musrembang, menunjukkan progres menggembirakan. Dari sisi partisipasi dan kehadiran masyarakat jauh lebih maksimal, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelum penerapan Musrembang Partisipatif ini. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat program yang diusulkan lebih mewakili aspirasi dan menyentuh problema yang dialami bersama.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kota Palopo dengan program Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Penggerak Posyandu. Isu strategisnya adalah *proses pembangunan (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)*.

Melihat kondisi posyandu di Kota Palopo yang memprihatinkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam posyandu, yang berujung pada tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat, membuat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB) mengumpulkan GOW (terdiri dari darma wanita tiap SKPD, sekolah, perguruan tinggi, dan DPRD) untuk melibatkan mereka dalam bentuk pembinaan posyandu.

Setiap dharma wanita membina satu posyandu. Bentuk pembinaan yang dilakukan dharma wanita diantaranya penyuluhan kesehatan dan penyuluhan



terkait SKPD yang membawahi, pemantauan, memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa keberadaan posyandu itu penting untuk masyarakat, serta pembinaan kader posyandu.

Bantuan-bantuan yang diberikan dharma wanita untuk tiap posyandu yang dibina tergantung kemampuan dari masing-masing dharma wanita. Diantaranya kasur, timbangan, meja, kursi, bantal, sumbangan dana, seragam untuk kader posyandu bahkan ada dharma wanita yang membangun gedung posyandu. Sejak tahun 2009 - 2011 tercatat 137 posyandu yang telah dibina GOW.

Kabupaten Luwu Timur dengan program Desa Paripurna. Isu strategisnya adalah *proses pembangunan (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)*.

Pembinaan desa yang belum maksimal, baik dari segi administrasi maupun kualitasnya sumber daya manusianya serta belum tertatanya kehidupan masyarakat secara komprehensif melatarbelakangi program ini. Mekanisme yang diterapkan yaitu melakukan koordinasi dengan semua camat untuk menetapkan 3 desa perkecamatan yang akan menjadi sasaran pembinaan tahap I 2011-2012, kemudian menetapkan indikator kinerja tiap SKPD dalam rangka pembinaan. Koordinasi antar SKPD pun dilakukan untuk menginventarisasi lembaga kemasyarakatan yang akan menjadi sasaran pembinaan.

Sepanjang tahun 2011 pembinaan langsung di lapangan telah dua kali dilaksanakan. Untuk mengevaluasi perkembangan desa binaan pun dilakukan rapat secara periodik minimal satu kali per triwulan. Targetnya pada tahun 2015, seluruh desa di Bumi Batara Guru sudah paripurna. Paripurna yang dimaksudkan yaitu, sumber daya manusianya, administrasinya, kelembagaan masyarakatnya, dan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Gowa dengan program Partisipasi Teknologi Tepat Guna. Isu strategisnya adalah *proses pembangunan (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)*.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja menjadi latar belakang program ini. Teknologi tepat guna yaitu ada alat bantu yang dipakai untuk merubah sesuatu untuk menjadi barang jadi, dengan kata lain adanya teknologi ini meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memaksimalkan pekerjaan.

Pemerintah berperan sebagai penyedia teknologi, tetapi sepenuhnya dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Adapun aspek-aspek penerapan teknologi tepat guna yang menjadi bagian dari partisipasi masyarakat Kabupaten Gowa yaitu, aspek pengolahan pangan, pemanfaatan energi, pengelolaan infrastruktur, lingkungan, dan kemampuan ekonomi.

Kabupaten Luwu Utara dengan program Partisipasi Pembangunan Pasar Sehat. Isu strategisnya adalah *proses pembangunan (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)*.

Keinginan masyarakat melalui kelompok untuk memiliki tempat khusus pemasaran jenis sayur sehat yang bebas dari pestisida difasilitasi pemerintah melalui program ini. Kelompok Tani Irama Cangkul dan Kelompok Wanita Tani melakukan pembuatan pupuk organik, pestisida alami dan budidaya sayur organik berdasarkan hasil kesepakatan kontrak kerja antara pemda Luwu Utara dengan kelompok tersebut.

Awalnya hasil produksi sayur dipasarkan kepada masyarakat sekitar, di rumah sakit dan beberapa rumah pejabat seperti bupati dan wakil bupati serta pegawai lingkup pemda Luwu Utara. Kemudian pada tahun 2011 program ini dikuatkan kembali yang diprakarsai penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai representasi dari pemerintah bersama masyarakat membangun pasar khusus sebagai tempat penjualan berbagai jenis sayur yang bebas dari zat kimia. Pembangunan pasar dilakukan secara bergotong royong antara Kelompok Tani Irama Cangkul dan Kelompok Wanita Tani. Masyarakat sudah dapat mengakses pasar sebagai tempat jual beli sayur sehat. Adanya pasar sehat ini meningkatkan penghasilan masyarakat khususnya petani, tercatat sebanyak 23 anggota kelompok tani yang menjadi penjual aktif dipasar tersebut.



Tabel 21

**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Partisipasi Publik**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	TOTAL
1	Selayar	273.691	308.655	582.346
2	Bulukumba	236.218	89.400	325.618
3	Bantaeng	282.424	106.200	388.624
4	Jeneponto	234.298	90.240	324.538
5	Takalar	250.564	89.400	339.964
6	Gowa	283.149	313.440	596.589
7	Sinjai	308.073	90.240	398.313
8	Maros	260.700	89.400	350.100
9	Pangkep	283.151	88.560	371.711
10	Barru	275.519	87.720	363.239
11	Bone	262.347	86.880	349.227
12	Soppeng	255.049	86.040	341.089
13	Wajo	230.733	85.200	315.933
14	Sidrap	252.240	81.840	334.080
15	Pinrang	219.252	82.680	301.932
16	Enrekang	252.958	84.360	337.318
17	Luwu	257.523	83.520	341.043
18	Toraja	252.471	81.840	334.311
19	Luwu Utara	263.356	319.320	582.676
20	Luwu Timur	315.851	319.320	635.171
21	Makassar	253.489	82.680	336.169
22	Parepare	280.155	441.495	721.650
23	Palopo	269.669	426.240	695.909



2. Kategori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang dimintai pertanggungjawaban meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Mekanisme yang akuntabel akan memperlihatkan sejauhmana pemerintahan berjalan, bagaimana perencanaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, bagaimana kebijakan, dan bagaimana penyusunan dan penggunaan anggaran publik diketahui secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian ciri-ciri pemerintah yang akuntabel adalah pemerintahan yang mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, dan adanya sarana publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan perilaku kerjanya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program.

Dalam bingkai FIPO indikator akuntabilitas publik dikaitkan dengan beberapa isu strategis, yakni transparansi, akses informasi, sanitari birokrasi, pengaduan masyarakat, serta responsivitas dan tanggungjawab aparat.

Tabel 22

Isu Strategis Kategori Akuntabilitas Publik		
Kategori/ Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Akuntabilitas Publik	Transparansi	Transparansi merupakan perwujudan <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i> menjadi bagian utama parameter pertanggungjawaban publik (tujuan: mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat).
	Akses Informasi	Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Akses informasi masyarakat ini menyangkut akses pasif dan

Kategori/ Indikator	Isu Strategis	Penekanan
		akses aktif. Akses pasif dimaksudkan sebagai keterbukaan dan ketersediaan informasi, data, dan dokumen publik yang seharusnya disediakan pemerintah ketika masyarakat mencarinya. Sementara akses aktif diartikan sebagai upaya aktif pemerintah daerah atas inisiatif dan kesadaran sendiri (<i>good will</i>) dalam menyebarluaskan informasi publik.
	Sanitari Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanitari birokrasi diarahkan pada kualitas, integritas, dan akseptabilitas pejabat publik beserta aparatnya dalam melayani masyarakat. ● Untuk mengukur hal ini dilihat bagaimana kebijakan pimpinan daerah dalam proses rekrutmen perangkat birokrasi baik proses penerimaan pegawai maupun penempatan pejabat-pejabatnya. Mekanisme tes kompetensi atau fit and proper test menjadi contoh upaya yang bisa terapresiasi, disamping upaya pemberantasan KKN.
	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Mekanisme pengaduan masyarakat yang diapresiasi tentunya mekanisme yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, bersejajar dengan semangat kemudahan akses informasi, memberikan tekanan profesionalisme aparat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. ● Mekanisme pengaduan masyarakat ini tentu akan sangat inovatif dengan standar baku yang implementatif yang digariskan (berbingkai hukum jelas) dan dijalankan secara tegas oleh daerah.
	Responsivitas dan Responsibilitas Aparatur	Perlunya transparansi di daerah, sehingga semua pihak baik masyarakat maupun jajaran birokrasi bisa saling mengawasi manakala ada gejala terjadinya KKN dalam proses pemerintahan.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kota Makassar mengusung program Ombudsman, Layanan Pengaduan Publik, sebagai inovasi pada kategori akuntabilitas dengan isu strategis *pengaduan masyarakat*. Melalui program ini Kota Makassar berhasil menempati urutan pertama dengan perolehan nilai 626, disusul Kota Parepare (624), Kabupaten Maros (563), Kota Palopo (373), dan Kabupaten Luwu Utara (338).

Pada saat ini, Ombudsman menjadi fenomena global, sebagai lembaga pengaduan pelayanan administrasi yang buruk. Ombudsman tidak bersaing dengan pengadilan, dan bukan pula pengadilan. Peran lembaga ini lebih sebagai lembaga yang mendorong pemerintah untuk memperbaiki pelayanannya. Secara umum lembaga Ombudsman dipahami bukan sebagai lembaga yang memberikan keputusan yang mengikat secara hukum, melainkan lembaga yang memberikan rekomendasi.



Ombudsman Kota Makassar (OKM) yang mulai aktif berjalan sejak tahun 2009 merupakan lembaga independen yang didirikan sebagai lembaga yang mampu menjembatani masyarakat Makassar dengan pemerintah Kota Makassar, baik itu mengenai pelayanan publik.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik telah menangani 27 kasus di Tahun 2009, 77 kasus pada tahun 2010, dan 61 kasus pada tahun 2011. Berbagai rekomendasi pun telah disampaikan ke lembaga-lembaga pemerintahan kota dan dunia usaha.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kota Parepare dengan program Pengaduan Publik Melalui *Website*. Isu strategisnya adalah *pengaduan masyarakat*.

Program Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat juga terus dikembangkan. Di bawah koordinasi humas, pemerintah menjembatani keluhan, tanggapan, saran dan masukan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Melalui SMS, *website* dan telepon keluhan masyarakat diteruskan kepada walikota untuk diteruskan ke dinas yang membidangi permasalahan tersebut.

Dalam waktu paling lama lima hari kerja, keluhan masyarakat harus segera diatasi dinas. Dinas juga wajib untuk melaporkan apa yang telah dikerjakan dari penanganan keluhan, setelahnya laporan ini akan diteruskan kepada masyarakat melalui SMS dan juga diumumkan di *website*.

Kabupaten Maros dengan program SMS *Center*. Isu strategisnya adalah *pengaduan masyarakat*.

Menyadari akan kebutuhan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan aduannya, pemerintah Kabupaten Maros kemudian berinovasi dengan membuka layanan SMS *Center*. Masyarakat mengirimkan SMS ke nomor 0811 411 0 666 atau dengan mengakses *website* Kabupaten Maros www.maroskab.go.id.

Pusat Data Elektronik (PDE) sebagai pelaksana program bertanggung jawab untuk meneruskan SMS ke SKPD terkait permasalahan yang diadukan. Kepala dinas (SKPD) bertanggung jawab menjawab aduan dari masyarakat. Di setiap SKPD memiliki staf administrasi yang bertugas mengecek data elektronik termasuk SMS aduan masyarakat yang masuk. Setiap minggunya semua SMS di laporkan ke bupati. Aduan yang dianggap penting dan mendesak langsung ditindaklanjuti. Setiap bulannya dilaksanakan rapat koordinasi antara bupati dengan seluruh SKPD dengan salah satu agendanya adalah menyampaikan SMS aduan masyarakat selama sebulan. Sebagai tindak lanjut, bupati kemudian menanyakan kepada SKPD yang bersangkutan tentang hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat tersebut.

Kota Palopo mengajukan program dengan isu strategis *pengaduan masyarakat* melalui SMS Publik.

Awalnya sistem pengaduan yang diterapkan adalah mengirimkan SMS langsung ke Walikota Palopo, banyaknya pengaduan yang masuk kemudian membuat pemerintah berinisiatif bekerja sama dengan surat kabar lokal yaitu Palopo Pos untuk menerbitkan setiap aduan terhadap pelayanan publik. Palopo Pos kemudian meneruskan setiap aduan yang masuk ke walikota/humas/SKPD terkait masalah yang diadukan.

Melalui program ini masyarakat dapat secara langsung melakukan pengaduan yang dialamatkan ke Palopo Pos dan melihat tanggapan ataupun respons dari lembaga pemerintah terkait masalah yang diadukan.

Kabupaten Luwu Utara dengan program Warung Demokrasi. Isu strategisnya adalah *pengaduan masyarakat*.

Banyak diskusi-diskusi yang berkembang dimasyarakat yang tidak mendapat respons dari pemerintah karena wadah untuk mempertemukan antara masyarakat dengan penentu kebijakan memang tidak tersedia. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Forum Masyarakat Luwu Utara (FAKTA).

Pelaksanaan kegiatan selalu dimulai dari pertemuan pengurus untuk membicarakan isu aktual yang akan menjadi pembahasan dalam diskusi. Mengundang berbagai kalangan seperti, pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif) lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.

Sebelum proses diskusi berlangsung maka terlebih dahulu diberikan kesempatan bagi pihak pemerintah memberikan materi pengantar sesuai dengan tema diskusi yang dilaksanakan. Melalui forum inilah peserta/masyarakat bisa bertanya langsung berbagai hal terkait tema diskusi, selanjutnya pihak pemerintah menjawab atau mengklarifikasi pertanyaan atau tanggapan dari peserta diskusi. Proses tanya jawab antara pemerintah dengan masyarakat yang tidak hadir tetap dapat berlangsung melalui telepon, karena ada fasilitas program *live* interaktif oleh radio Adira FM yang bertugas menyiarkan langsung pelaksanaan diskusi tersebut. Forum ini melahirkan berbagai rekomendasi atau masukan dari masyarakat kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.



Tabel 23**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Akuntabilitas Publik**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	TOTAL
1	Selayar	169.069	102.300	271.369
2	Bulukumba	141.310	106.500	247.810
3	Bantaeng	169.500	136.950	306.450
4	Jeneponto	138.063	103.350	241.413
5	Takalar	144.931	104.400	249.331
6	Gowa	170.146	153.750	323.896
7	Sinjai	188.896	133.800	322.696
8	Maros	154.951	408.375	563.326
9	Pangkep	171.201	107.550	278.751
10	Barru	163.556	108.600	272.156
11	Bone	153.833	156.900	310.733
12	Soppeng	156.313	135.900	292.213
13	Wajo	132.847	104.400	237.247
14	Sidrap	145.361	101.250	246.611
15	Pinrang	124.974	153.750	278.724
16	Enrekang	151.861	102.300	254.161
17	Luwu	155.868	100.200	256.068
18	Toraja	148.229	131.700	279.929
19	Luwu Utara	158.451	180.000	338.451
20	Luwu Timur	196.181	101.250	297.431
21	Makassar	156.049	469.688	625.736
22	Parepare	172.424	451.688	624.111
23	Palopo	167.111	206.250	373.361



Grafik 8

Ranking Kabupaten/Kota Kategori Akuntabilitas Publik



D. Parameter Lingkungan Hidup

Pembangunan yang saat ini dikembangkan pemerintah Indonesia adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu suatu bentuk pembangunan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Dituntut inisiatif pemerintah daerah untuk mengintegrasikan seluruh kepentingan dalam pembangunan dengan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pelestarian (pengendalian) lingkungan hidup, sebenarnya merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (pasal 13-14). Ditegaskan pula, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah wajib melestarikan lingkungan hidup.

Pada dasarnya lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan yang berujung pada kerusakan lingkungan menyebabkan kondisi lingkungan tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tidak hanya proses alam, namun aktivitas manusia pun dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Tabel 24

Indikator dan Isu Strategi Parameter Lingkungan Hidup			
Parameter Khusus	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Lingkungan Hidup	Akses (<i>Equity</i>) Penggunaan <i>Natural Capital</i>	Kesamaan akses terhadap penggunaan sumber material, seperti persawahan, perkebunan, air, dll.	<ul style="list-style-type: none"> ● Setiap upaya daerah dalam penciptaan kesamaan akses bagi setiap masyarakat terhadap penggunaan sumber daya. Argument pentingnya <i>equity</i> adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan, terutama agar penggunaan sumber daya alam sebagai kebutuhan hidup tidak merusak lingkungan itu sendiri. ● Contoh: pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), listrik tenaga bayu (angin), dll.
		Kesamaan kesempatan konsumsi energi	
		Pemberdayaan penggunaan dan pengelolaan <i>natural capital</i> bagi masyarakat kecil	
	Integrasi Pengelolaan Lingkungan	Harmonisasi kepentingan industri, ekonomi masyarakat dan lingkungan (<i>public private and community partnership</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ● Inisiatif dan upaya yang dikembangkan pemda untuk mengintegrasikan seluruh kepentingan dalam pembangunan dengan pelestarian lingkungan.

Parameter Khusus	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
		Mediasi perbedaan kepentingan antara industri, masyarakat dan pemerintah	Pemda bisa bertindak sebagai mediator, regulator, dan pendukung dari setiap upaya-upaya ini. Kerjasama permanen antara kepentingan dalam pembangunan untuk mengindahkan lingkungan menjadi poin penting dalam indikator ini. ● Contoh: gerakan penanaman sejuta pohon, gerakanbersih lingkungan, hutan kota, dll.
		<i>Environment mainstreaming and sounding</i> dalam setiap kebijakan pembangunan daerah	
Kelestarian (<i>Sustainability</i>) <i>Natural Capital</i>		Perlindungan praktik <i>indigenous</i> masyarakat lokal yang arif dan besahabat terhadap lingkungan. Perlindungan budaya dan masyarakat asli daerah	● Upaya-upaya yang dilakukan pemda untuk mengelola lingkungan secara spesifik pengelolaan sumber daya alam, yaitu seluruh kekayaan yang berasal dari alam, berupa material dan energi, dan tempat kembalinya ke alam (Meadows, 1998). <i>Natural capital</i> dalam konteks ini juga diperluas dengan pengertian <i>human and social capital</i> dalam masyarakat lokal, terutama yang mendukung pelestarian dan ramah lingkungan. ● Contoh: pemanfaatan limbah menjadi bio energi, pengelolaan air kotor menjadi air bersih.
		Upaya perlindungan situs-situs bersejarah	
		Upaya daur ulang material alam, buatan, dan energi	
		Pengelolaan sampah ramah lingkungan	
		Manajemen polusi	
		Upaya pelestarian hutan/ pegunungan, sungai, udara (atmosfir), dan material lainnya	
		Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan dan <i>renewable</i>	
		Upaya penghematan energi	
		Pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati	
		Pengelolaan air yang ramah lingkungan	

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Maros mengusung program Kelompok Masyarakat Pengawas, dengan isu strategis *pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati*. Maros menempati urutan pertama dengan total perolehan 575, diikuti Kabupaten Pangkep (574), Kota Parepare (570), Kabupaten Luwu (539), dan Kabupaten Kepulauan Selayar (531).

Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir memberikan kontribusi cukup besar pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi. Dengan panjang garis pantai 31 km, Maros memiliki potensi sumber daya kelautan yang menjanjikan di sektor perikananannya maupun pelestarian hutan bakau (*mangrove*). Sayangnya potensi tersebut sulit dikembangkan karena seringnya terjadi pengerusakan, mulai dari penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan bom serta obat-obatan, konflik areal penangkapan antar nelayan, dan penebangan hutan bakau.

Sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi sumber daya kelautan, sejak tahun 2008 dibentuklah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Kabupaten Maros yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perikanan, Kelautan, dan peternakan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda, kelompok ini secara bertahap mampu meningkatkan kesadaran nelayan (masyarakat) untuk menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Pangkep mengajukan program Pengeboran Air Bawah Tanah Dalam. Isu strategisnya adalah *kesamaan akses terhadap penggunaan sumber material, seperti persawahan, perkebunan, air, dll*.

Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki kondisi alam yang menjadi penyebab sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, apalagi pada musim kemarau. Sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan air hujan ataupun air sungai yang tidak layak pakai/minum. Hal ini membuat pemerintah daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi berinisiatif melaksanakan program Pengeboran Air Bawah Tanah Dalam.

Mekanisme program masyarakat yang memasukkan proposal kepada Dinas Pertambangan dan Energi, selanjutnya di verifikasi lapangan tentang kelayakan penerima bantuan sumur bor, berdasarkan penelitian dan letak wilayahnya. Setelah merampungkan kelengkapan administrasi dan kelayakan wilayah atau objek pengeboran, pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi menyerahkan barang pompa sumur bor beserta kelengkapannya kepada masyarakat penerima manfaat.

Tim Dinas Pertambangan juga melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan pengeboran dilapangan hingga selesai. Selanjutnya, Masyarakat secara swadaya berusaha menyiapkan pipa saluran air ke rumah masing-masing. Operasionalisasinya di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada kelompok, termasuk iuran perbulan dari penerima manfaat. Saat ini jumlah sumur bor yang dihibahkan kepada masyarakat sudah berada di empat titik dengan kapasitas satu titik dapat menjangkau 30 rumah tangga.

Kabupaten Luwu dengan program Kelompok Masyarakat Pengawas. Isu strategisnya adalah *pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati*.

Kabupaten Luwu memiliki wilayah perairan dengan garis pantai yang panjang namun memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengontrolnya. Hal tersebut kemudian membuat pemerintah berinisiatif untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam upaya pencegahan praktik-praktik *illegal fishing*. Upaya ini terimplementasi melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Pokmaswas Kabupaten Luwu terdiri dari nelayan-nelayan di beberapa desa pesisir yang bekerja secara swadaya di bawah pembinaan Bidang Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Laut Dinas Perikanan dan Kelautan. Adanya pokmaswas diharapkan dapat menekan praktik-praktik *illegal fishing* dan perusakan (potensi) sumber daya di laut maupun pesisir.

Kota Parepare mengajukan program Pengelolaan Sampah Organik, dengan isu strategis *pengelolaan sampah ramah lingkungan*.

Banyaknya sampah yang mesti dikelola agar tidak mencemari lingkungan yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat menjadi latar belakang dirintisnya program ini pada tahun 2008. Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai *leading sector* program, melibatkan Dinas Kebersihan, kecamatan dan kelurahan, PT. Lun Siva, dan masyarakat umum melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Ada dua model pengolahan sampah yang dilakukan; pengolahan secara mesin/pabrik, yaitu sampah organik yang terdiri dari daun-daun di cacah melalui mesin dan kemudian diaduk dengan pupuk kandang, di keringkan dan dihaluskan dengan mesin kemudian dikarungkan/dikepak. Pengolahan ini dilakukan langsung di TPA akhir dengan kapasitas 200 kg per hari.

Model kedua pengolahan sampah yang dilakukan adalah melalui budidaya cacing. Pupuk ini dibuat dengan mengembangbiakkan cacing dalam tumpukan sampah organik, cacing-cacing tersebut akan menguraikan sampah organik dan akhirnya menghasilkan kotoran. Inilah yang menjadi pupuk kompos, kemudian dikemas. Pengolahan kompos cacing ini tersebar di 24 tempat. Penggunaan kompos cacing disebar merata di setiap pemukiman tingkat RW di Kota Parepare.

Selain menjaga kelestarian lingkungan, adanya program pengolahan sampah organik telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan menyumbangkan PAD walaupun dalam skala kecil, Rp 11 juta pada tahun 2010 dan Rp 19 juta pada tahun 2011.

Kabupaten Selayar dengan program Penyulingan Air Laut untuk Air Minum. Isu strategisnya adalah *kesamaan akses terhadap* penggunaan sumber material, seperti persawahan, *perkebunan, air, dll.*

Selayar sebagai kabupaten kepulauan memiliki kondisi geografis yang menyebabkan masyarakatnya sulit untuk mengakses air bersih. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2008 dimulailah program Penyulingan Air Laut Untuk Air Minum. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang bermukim di daerah pulau.

Sejak dulu untuk memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat Kabupaten Selayar hanya mengandalkan air hujan untuk dikonsumsi. Namun tidak semuanya bisa memanfaatkan hal tersebut karena ada sebagian daerah Kepulauan Selayar yang mengalami curah hujan sangat rendah. Selain itu, pada dasarnya air hujan kurang sehat untuk dikonsumsi.

Hingga sekarang mesin penyuling sudah tersebar di 16 desa kepulauan yang berada di empat kecamatan. Mekanisme yang diterapkan yaitu, masyarakat setempat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk diprogramkan pembangunan sumber air bersih (penyulingan air). Selanjutnya pemerintah melakukan tinjauan lokasi (survei kelayakan), lokasi yang dianggap layak maka akan ditindak lanjuti dengan pembangunan sarana penyulingan air laut menjadi air minum. Adanya program ini dianggap mampu mendekatkan akses bagi masyarakat sekitar untuk menikmati air bersih.



Tabel 13**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Lingkungan Hidup**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	EKSISTING	TOTAL
1	Selayar	196.783	304.463	29.983	531.228
2	Bulukumba	180.228	120.000	12.519	312.747
3	Bantaeng	225.671	71.000	20.941	317.613
4	Jeneponto	176.813	71.700	19.537	268.049
5	Takalar	185.403	69.600	7.913	262.916
6	Gowa	173.704	102.500	17.321	293.525
7	Sinjai	220.972	148.000	22.042	391.014
8	Maros	198.821	351.763	24.482	575.066
9	Pangkep	224.587	300.475	48.555	573.617
10	Barru	211.660	72.400	28.237	312.297
11	Bone	187.216	295.175	14.408	496.799
12	Soppeng	192.423	308.025	11.320	511.768
13	Wajo	169.276	73.100	9.137	251.513
14	Sidrap	193.406	73.800	68.651	335.858
15	Pinrang	161.300	71.000	22.099	254.399
16	Enrekang	183.560	103.200	31.442	318.202
17	Luwu	196.872	336.188	6.416	539.476
18	Toraja	200.402	278.400	7.229	486.031
19	Luwu Utara	200.463	120.000	52.859	373.321
20	Luwu Timur	235.368	74.500	0.920	310.789
21	Makassar	192.680	74.500	15.319	282.499
22	Parepare	205.734	310.138	54.553	570.425
23	Palopo	214.660	88.500	66.345	369.506

Grafik 9

Ranking Kabupaten/Kota Kategori Lingkungan Hidup



E. Parameter Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah nyata yang dihadapi pemerintah saat ini yang sifatnya multidimensional, bukan hanya menyangkut rendahnya pendapatan tetapi juga terkait dengan tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Di era otonomi, penanganan isu pengentasan kemiskinan menjadi strategis. Setiap daerah dituntut untuk memiliki strategi dan kebijakan dalam penanganan pengentasan kemiskinan. Karena faktor wilayah dan budaya ikut menyebabkan permasalahan kemiskinan menjadi beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat. Sehingga penerapan standar/indikator kemiskinan dan *design* kebijakan pengentasan kemiskinan pun tidak dapat diterapkan secara seragam.

Dalam skema FIPO, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak dilihat dari turunnya angka penduduk miskin secara statistik semata. Lebih dari itu, pengentasan kemiskinan merupakan integrasi pendekatan dan penanganan kemiskinan yang mengacu pada empat indikator yang dinilai cukup layak untuk mengakomodasi dimensi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan, yaitu (1) perbaikan taraf ekonomi masyarakat miskin, (2) perbaikan kapabilitas fungsional masyarakat miskin, (3) perbaikan tingkat inklusi sosial dan partisipasi masyarakat miskin, dan (4) perbaikan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan.

Tabel 26

Indikator dan Isu Strategi Parameter Pengentasan Kemiskinan			
Parameter Khusus	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
Pengentasan Kemiskinan	Perbaikan Taraf Ekonomi Masyarakat Miskin	Perbaikan pendapatan masyarakat miskin (peningkatan daya beli, kesempatan kerja, dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat miskin)	<ul style="list-style-type: none"> ● Upaya penguatan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat miskin. Lembaga ekonomi yang kuat bukan hanya meningkatkan pendapatan dan daya beli tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Merupakan hal paling mendasar diperkuat guna meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli, serta membuka kesempatan kerja. ● Contoh: penguatan lembaga koperasi unit desa (KUD), badan usaha milik desa (BUMDes), ataupun lembaga ekonomi pesisir.

Parameter Khusus	Indikator	Isu Strategis	Penekanan
	Perbaikan Kapabilitas Fungsional Masyarakat Miskin	Perbaikan kualitas hidup (<i>capability to functioning</i>)	Kemiskinan bukan hanya faktor ekonomi tetapi juga sosial karena itu perlu memberikan ruang sosial yang lebih luas bagi masyarakat miskin sehingga dapat mengembangkan diri.
		Perbaikan perlindungan/keamanan sosial	Apakah ada jaminan berlangsungnya interaksi sosial dan perlindungan bagi masyarakat miskin atas segala bentuk-bentuk diskriminasi.
	Perbaikan Tingkat Inklusi Sosial dan Partisipasi Masyarakat Miskin	Perbaikan pelibatan masyarakat miskin	Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat miskin adalah tanggung jawab pemerintah meski demikian diperlukan adanya upaya-upaya pelibatan partisipasi masyarakat miskin.
		Perbaikan tingkat inklusi sosial	Apakah ada perbaikan inklusi sosial sehingga masyarakat miskin secara perlahan dapat melakukan identifikasi dan menemukan solusi atas kemiskinannya.
	Perbaikan Alokasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan	Perbaikan keberpihakan anggaran terhadap masyarakat miskin (perbaikan alokasi anggaran untuk pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pembinaan sosial)	Komitmen anggaran pemerintah daerah adalah salah satu kunci penting pengentasan kemiskinan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain adanya anggaran untuk jangka masyarakat miskin) panjang atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.

⌘ Pemenang Otonomi Awards 2012

Kabupaten Enrekang memiliki konsep tersendiri dalam menangani warga miskinnya melalui program Pembinaan Rumah Tangga Miskin. Program ini terkait dengan isu strategis *perbaikan tingkat inklusi sosial*. Total nilai Kabupaten Enrekang adalah 384, melampaui Kabupaten Wajo (340), Pangkep (324), Barru (315), dan Kota Makassar (316).

Keberadaan program pembinaan rumah tangga miskin merupakan program

pemberdayaan. Tujuannya agar peran masyarakat miskin lebih dikuatkan sehingga mampu secara mandiri mempercepat peningkatan kesejahteraannya.

Teknis pelaksanaan program ini dimulai dari pendataan dan verifikasi orang miskin calon binaan. Kemudian hasilnya ditindak lanjuti dengan pertemuan beberapa pihak swasta terkait (BNI, BRI, Bank Sulselbar, Telkom) dan semua SKPD. Pada kesempatan tersebut, pemerintah membagi rumah tangga miskin binaan pada masing SKPD dan lembaga swasta terlibat.

Bentuk pembinaannya pun bervariasi misalnya, pemberian kebutuhan pokok untuk sementara waktu, rehabilitasi rumah/pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan ternak, modal usaha ekonomi produktif, dan bantuan bibit pertanian. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat binaan.

⌘ Program Inovatif Daerah Nominasi

Kabupaten Wajo dengan program Bantuan Sapi untuk Keluarga Miskin. Isu strategisnya adalah *perbaikan keberpihakan anggaran terhadap masyarakat miskin*.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui pemberian bantuan langsung tunai dianggap tidak memberdayakan, justru menciptakan ketergantungan. Fenomena pemberian bantuan langsung tunai selama ini malah menimbulkan kericuhan, tidak tepat sasaran dan berpotensi menjadi lahan korupsi. Karenanya skema pemberdayaan dapat menjadi alternatif.

Di Kabupaten Wajo, pemberdayaan bagi masyarakat miskin berlangsung melalui program bantuan ekonomi produktif pengembangan ternak sapi untuk masyarakat miskin. Untuk memberdayakan masyarakat miskin, ternak sapi dianggap sebagai instrumen yang tepat, karena sapi tidak lagi dipandang sebagai tabungan masa depan, akan tetapi telah berubah menjadi komoditas ekonomis yang bernilai tinggi.

Berdasarkan asumsi tersebut, memberikan bantuan bergulir untuk beternak sapi dianggap akan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin memiliki aset ekonomis, memiliki tabungan dan strategi usaha yang baik, dalam jangka waktu yang dapat ditentukan, masyarakat miskin dapat mengembalikan bantuan bergulir yang diberikan pemerintah. Pemerintah pun dapat melangsungkan upaya-upaya pemberdayaan berkelanjutan meski dengan anggaran yang terbatas.

Kabupaten Pangkep mengadakan program Bedah Rumah tidak Layak Huni dengan isu strategis *perbaikan kualitas hidup*.

Program yang dilaksanakan sejak tahun 2008 ini memanfaatkan sharing anggaran APBN dan APBD yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Penerima manfaatnya diseleksi dari setiap desa dengan menggunakan angket indikator kemiskinan. Diprioritaskan bagi masyarakat yang kondisi rumahnya



sudah rusak berat dan tidak ada sumber pendapatan atau pun keluarga yang bisa menjamin perbaikan rumah. Untuk tahun anggaran 2011 sebanyak 101 rumah yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Labbakkang, Ma'rang, dan Liukang Tupabbiring Utara mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah atau bedah rumah.

Kota Makassar dengan program Bantuan Hukum untuk Keluarga Miskin. Isu strategisnya adalah *perbaikan perlindungan/keamanan sosial*.

Kota Anging Mammiri memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang sedang menghadapi kasus hukum pidana maupun perdata (kecuali kasus narkoba). Bantuan hukum dianggap perlu karena setiap penduduk memperoleh hak yang sama di depan hukum, sehingga menciptakan asas keadilan, terlebih lagi dengan maraknya kasus dan kriminalisasi hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

Perlunya bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut kemudian direspons Pemerintah Kota Makassar melalui Peraturan Wali Kota No. 63 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu. Pemerintah menyediakan tim bantuan hukum (Keputusan Walikota Makassar No. 183.1.05/030/Kep/I/2011, menetapkan Pembentukan Tim Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu Tahun 2011 yang terdiri dari 15 orang, yakni 1 koordinator dan 14 anggota) yang terdiri dari para advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum kepada penduduk yang tidak mampu.

Kabupaten Barru dengan program Pilot Proyek Penanggulangan Kemiskinan. Isu strategisnya adalah *perbaikan pelibatan masyarakat miskin dan perbaikan tingkat inklusi sosial*.

Pilot Proyek Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK PAKET) adalah *microfinance project* yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Barru sejak tahun 2004. Visi program PIK PAKET adalah "Berbuat Bersama Menanggulangi Kemiskinan" yang bermakna bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak yang dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan hidupnya berdasarkan standar lokal.

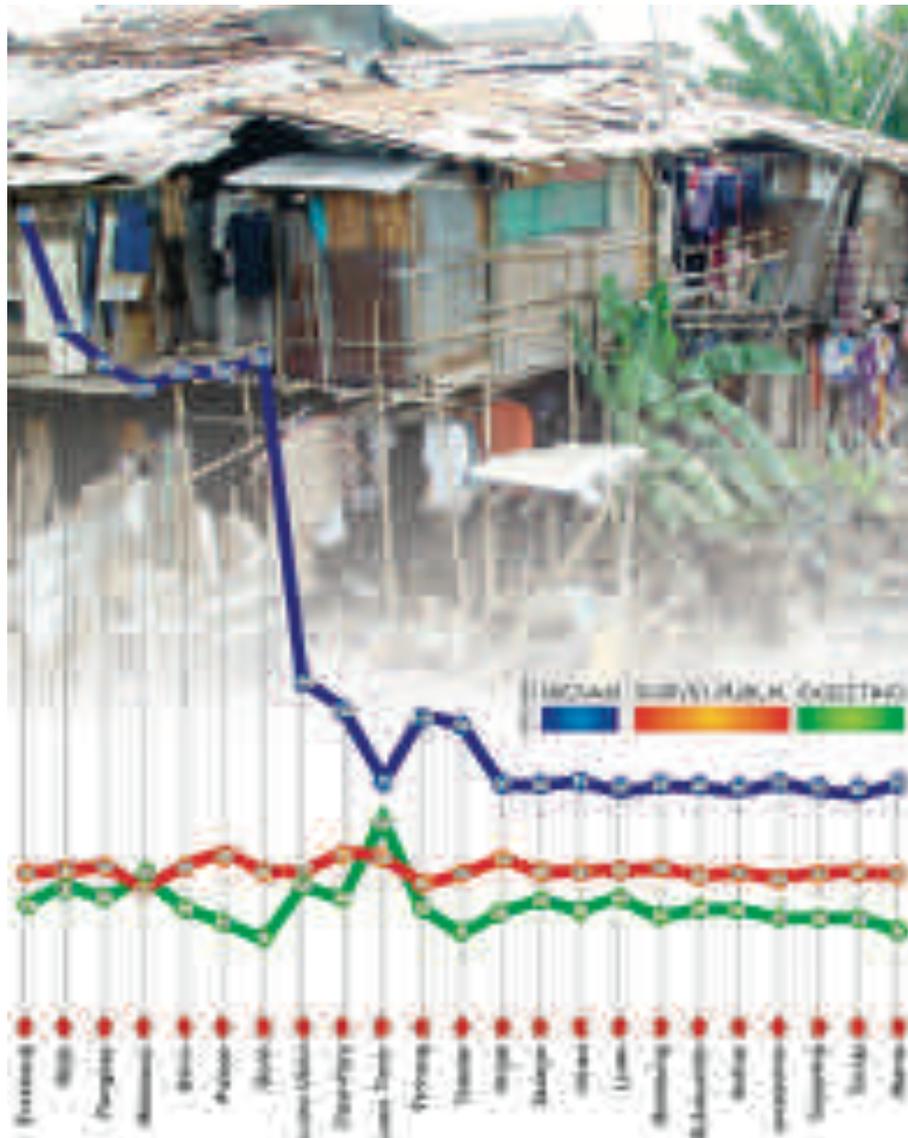
Tahapan pelaksanaan kegiatan PIK PAKET meliputi, persiapan sosial masyarakat, identifikasi masalah dan potensi masyarakat, pelatihan, serta penghantaran sumber daya berupa penyaluran dana pinjaman langsung masyarakat (PLM) dengan mekanisme pengembalian sumber daya melalui mekanisme kelompok. Sejak tahun 2004, program yang sumber dananya berasal dari APBD kabupaten ini telah mengakomodir 28 kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Tabel 27**Nilai Kabupaten/Kota
Kategori Pengentasan Kemiskinan**

KODE	KAB/KOTA	SURVEI	INOVASI	EKSISTING	TOTAL
1	Selayar	26.559	68.200	18.459	113.218
2	Bulukumba	25.243	67.500	14.085	106.828
3	Bantaeng	28.673	68.900	10.738	108.311
4	Jeneponto	24.104	70.300	10.403	104.807
5	Takalar	25.720	97.600	4.0998	127.419
6	Gowa	27.627	71.000	13.005	111.631
7	Sinjai	32.979	68.900	12.160	114.039
8	Maros	25.271	69.600	5.6233	100.495
9	Pangkep	28.417	272.867	22.755	324.039
10	Barru	27.627	269.700	17.946	315.273
11	Bone	26.887	276.700	2.1290	305.716
12	Soppeng	26.865	66.100	9.6800	102.645
13	Wajo	24.069	291.050	24.562	339.680
14	Sidrap	26.196	65.400	13.526	105.122
15	Pinrang	21.082	102.500	14.511	138.094
16	Enrekang	24.047	343.400	16.139	383.586
17	Luwu	27.257	65.400	18.877	111.534
18	Toraja	27.122	64.700	10.354	102.176
19	Luwu Utara	26.688	120.000	24.848	171.535
20	Luwu Timur	34.075	71.0000	49.754	154.829
21	Makassar	26.666	261.850	27.717	316.233
22	Parepare	30.607	106.000	18.282	154.889
3	Palopo	29.427	268.250	10.099	307.776

Grafik 10

Ranking Kabupaten/Kota Kategori Pengentasan Kemiskinan





Bab 3

Best Practices

Otonomi Awards 2012

Berawal dari Keterbatasan

Kuatkan Modal Kerja tanpa Bunga

**Berdayakan Masyarakat Melalui
Koperasi Sistem Syariah**

Patta'ba Sekolah Unggulan Berbasis ESQ

Parisai Panjaga, Solusi Kesehatan Lingkungan

Tak Ada Kata Sulit dalam Pelayanan

**Transformasi Musrembang, Khasanah Baru
Metode Perencanaan**

Ombudsman, Awasi Pelaksanaan Layanan Publik

Pokmaswas bukan Sekadar Penjaga Pantai

**Entaskan Kemiskinan,
Maksimalkan Potensi Masyarakat**

**Kebijakan Pagu ADD,
Inspirasi Pertumbuhan
Ekonomi Desa**

Kabupaten Kepulauan Selayar

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Pertumbuhan Ekonomi

Berawal dari Keterbatasan

Peneliti: **DASMAN**

Butuh waktu dan jarak yang jauh untuk memperoleh suplai beras dari kabupaten tetangga. Apalagi masyarakat di daerah kepulauan masih terus mengalami kekurangan stok pangan. Hal inilah yang mendorong pemerintah kepulauan Selayar, melakukan terobosan inovasi di bidang pertanian dengan mengelola dan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mencetak sawah.

Usaha pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar patut diapresiasi. Merasa tidak mampu mencukupi kebutuhan beras dalam daerah, dijadikan semangat tersendiri mengembangkan lahan pertaniannya sebagai sumber produksi padi.

Kepulauan Selayar bukanlah daerah penghasil beras di Sulawesi Selatan. Secara geografis, kabupaten dengan luas 903,50 kilometer persegi itu, berada di daerah pesisir. Struktur tanahnya berbatu dan kering, meskipun ada wilayahnya memiliki tanah subur. Masalah lainnya, wilayah kepulauan sebagian mengalami



kekurangan curah hujan. Keterbatasan yang ada, tidak mematahkan semangat berinovasi. Justru jadi pemicu dalam mengatasi keterbatasan dengan membuat variasi program.

Sejak tahun 2006, program peningkatan produksi padi dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Semua dinas diberi tanggung jawab sesuai kapasitasnya. Pada tahun yang sama dikeluarkan surat keputusan tim koordinasi SKPD oleh bupati. Sebanyak lima SKPD dilibatkan diantaranya Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Selayar.

Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat. Apalagi masyarakat setempat masih asing pada pengembangan budidaya padi. Perlu upaya pembiasaan dan pembelajaran teknik mengolah sawah dikalangan masyarakat berpenduduk 122.055 jiwa itu.

Kegigihan pemerintah menjalankan program, dibuktikan dengan berjalannya berbagai rangkaian program diantaranya, perluasan area sawah (pencetakan sawah baru). Tujuannya mengatasi keterbatasan luas lahan agar produksi dapat meningkat secara signifikan.

Lokasi pengembangan persawahan tersebut terletak pada empat kecamatan yaitu kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontoharu, dan Bontosikuyu. Pada empat lokasi inilah pemerintah menginisiasi masyarakat dengan pencetakan sawah baru. Prosesnya pun tak berbelit. Masyarakat yang berminat, cukup membentuk kelompok tani dan mengajukan permohonan ke pemerintah. Lahan yang dianggap layak untuk lokasi persawahan, berdasarkan survei lapangan calon petani dan calon lahan (CPCL), akan segera dilakukan pencetakan sawah yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah.

Selama tiga tahun, pemerintah berhasil mencetak sawah masyarakat seluas



986 hektar, dengan anggaran miliaran rupiah. Tak sebatas mencetak sawah saja, masyarakat juga diajarkan pengetahuan teknik bertani yang baik sehingga menghasilkan tanaman padi yang baik.

Keseriusan pemerintah Kepulauan Selayar dalam bidang pertanian terus berlanjut. Pembagian alat mesin pertanian (alsintan) diberikan dalam bentuk hibah, dengan harapan memudahkan petani dalam proses pengolahan sawah.

Pemerintah tak hanya berpikir kuantitas, tapi juga kualitas produksi padi. Pemberian pupuk dan bibit unggul sebagai bukti upaya tersebut. Program ini rutin dilakukan, tidak tanggung-tanggung bantuan pupuk pada alokasi anggaran 2011 sebanyak 360 ton, sedangkan bantuan bibit unggul sebanyak 10 ton. Bantuan ini didistribusikan kepada petani secara adil tanpa ada pengutan biaya.

Sarana prasarana pendukung pertanian pun menjadi fokus perhatian pemerintah. Khususnya pada sektor fisik. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pertanian seperti bendungan, jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi desa, serta pembangunan jalan usaha tani, terus dilakukan.

Hasilnya menggembirakan. Selayar tak lagi bergantung kepada daerah tetangga dalam memenuhi kebutuhan beras. Bahkan surplus beras sebanyak 44 ton. Akumulasi produksi padi Selayar meningkat dari tahun 2010, sebanyak 13.738 ton. Sedangkan tahun 2011 sebanyak 14.725 ton beras. Sedangkan kebutuhan beras masyarakat Selayar tahun 2011 hanya 14.681 ton.

Mampu mengatasi keterbatasan merupakan hal spektakuler. Meski harus diakui jumlah produksi padi Selayar masih kalah bila disandingkan daerah lainnya di Sulsel. Namun capaian dan terobosan program menjadi kelebihan tersendiri.

Asas manfaat program pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Bukan hanya bagi petani, tetapi juga kepada masyarakat sekitarnya. Hasil produksi padi dalam daerah membantu masyarakat setempat. Mereka tidak perlu mendatangkan beras dari luar, yang tentunya berdampak pada harga lebih murah.

Komitmen pemerintah Selayar melakukan penguatan program sangat tepat. Berbagai kebijakan dikeluarkan sebagai bentuk dukungan program mampu menyentuh berbagai aspek. Penyelesaian kebutuhan petani dari hulu hingga hilir terpenuhi, demi upaya peningkatan produksi beras masyarakat.

Tantangan program, komitmen anggaran maupun asas manfaat, menempatkan program tersebut berada pada posisi puncak pada kategori pertumbuhan ekonomi. Secara akumulasi, Selayar meraih total nilai tertinggi 617 poin. Nilai tersebut merupakan gabungan dari tiga bagian penilaian, diantaranya nilai inovasi sebanyak 171 poin, nilai survei publik 433 poin dan nilai eksisting 13 poin. (*)

Kabupaten Bantaeng

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Pemerataan Ekonomi

Kuatkan Modal Kerja tanpa Bunga

Peneliti: SAIFUL RIJAL YUNUS

Kendala umum pelaku ekonomi adalah modal usaha. Tak memandang mereka yang baru memulai, atau taraf pengembangan usaha, modal selalu menjadi penghalang untuk berkembang.

Ekonomi kerakyatan telah lama didengungkan proklamator kita bung Hatta agar dijadikan visi perekonomian nasional. Nyatanya, monopoli perekonomian tak juga bisa dihindari, ekonomi hanya dimiliki mereka yang telah “besar” saja. Padahal dengan berdayanya perekonomian di tingkatan dasar, memberi pijakan kuat bagi negara. Contoh di krisis ekonomi 14 tahun silam, pelaku ekonomi kecil dan menengah tetap mampu bertahan di tengah krisis ekonomi.





Sayangnya, seperti pada julukannya yaitu pelaku usaha kecil dan mikro (U K M) , sumberdaya yang dimiliki juga tergolong “seadanya” juga. Sedikit dari mereka yang mampu berkembang pesat dengan keterbatasan

yang dimiliki. Bahkan tidak sedikit yang mundur atau gulung tikar bila tak ada pendampingan atau dukungan manajerial yang berkesinambungan,

Melalui dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah Kabupaten Bantaeng mencoba mengatasi masalah yang dihadapi dengan program penguatan modal kerja tanpa bunga. Program yang diinisiasi sejak tahun 2008 ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan peran dan eksistensi bagi pelaku usaha kecil dan menengah, memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini juga melibatkan beberapa dinas lain seperti dinas pertanian, dinas tenaga kerja dan dinas perindustrian dan perdagangan. Menggandeng dinas-dinas lain tentu akan memudahkan saat program berjalan, sebab permasalahan yang dihadapi pelaku program bisa langsung terkoordinasi dan didampingi dinas terkait. Misalnya, peningkatan kapasitas ditangani langsung dinas tenaga kerja, pelatihan dan proses kemasan produk ditangani dinas perindustrian dan perdagangan, serta sejumlah dinas lainnya.

Pada program bantuan modal, terdapat dua kategori pelaku usaha yang menjadi objek program, yakni usaha perorangan dan kelompok. Syarat utama penerima program harus mempunyai usaha awal. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan pelaku menerima program.

Proses mendapatkan bantuan tidaklah rumit. Cukup melampirkan surat bukti usaha dari kepala desa atau lurah. Dinas koperasi melakukan survei langsung ke pemohon untuk melihat layak tidaknya mendapatkan bantuan, serta mengukur kemampuan besaran modal yang akan diberikan berupa modal tanpa bunga.

Di awal program, ada 187 pelaku usaha mendapat bantuan modal. Mereka tersebar di berbagai jenis usaha, seperti perbengkelan, jual beli hasil bumi, barang campuran, konveksi, keripik pisang, rumput laut, anyaman atap, chips jagung,

keripik wortel, pertukangan, peternakan, kerajinan bambu, industri kasur, sayur mayur dan lain-lain.

Bantuan modal yang diberikan berjangka waktu satu tahun. Medio pembayarannya bertenggat waktu 15 Desember. Keleluasaan pembayaran juga diberikan dengan tidak memberi patokan maksimal jumlah cicilan. Hal ini dimaksudkan karena fluktuasi usaha terus terjadi, sehingga pemberian batasan angsuran akan mengurangi modal serta mengganggu semangat kerja.

Di lain sisi, pemerintah tetap memberi dan melakukan pendampingan kepada mereka. Monitoring ini dilakukan secara berkala untuk memantau kesulitan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Satu catatan penting dari program ini, bahwa pinjaman yang diberikan itu tidak dibebankan biaya bunga atau tambahan sama sekali. Dengan kata lain, sebesar apa pinjaman yang diberikan, sejumlah itu pula yang dikembalikan. Meski tanpa dibebankan adanya bunga, pemerintah tetap mewanti-wanti dalam pengembalian dengan memberi sanksi kepada mereka yang telat.

Tahun kedua program, pemerintah kembali mendistribusikan bantuan modal kepada 134 pelaku usaha, dan tahun 2011 diberikan kepada 76 kelompok dan perorangan. Selama tiga tahun pemberian bantuan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp630 juta yang kesemuanya bersumber dari dana daerah.

Awal program, ada kekhawatiran bantuan akan macet seperti pada program bantuan yang sama. Apa lagi tipikal masyarakat kita selalu ingin dibantu dan menganggap bantuan pemerintah tidak perlu dikembalikan. Namun, semua kekhawatiran itu terjawab tuntas sampai pada tahun ketiga pemberian bantuan. Semua terbayar lunas dan tidak ada satu pun yang masuk dalam kategori macet.

Kondisi ini tidak tercipta begitu saja. Perhatian pemerintah melakukan pendampingan dan pengawasan serta kebijakan untuk memberikan bantuan kepada yang layak, merupakan kunci sukses program tersebut.

Hasil dari program pun memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Usaha-usaha kecil yang dulu sangat kesulitan dalam meningkatkan produksinya telah teratasi sedikit demi sedikit, lokasi dan tempat usaha juga telah tertata dan menarik. Ragam produksi makanan ringan dan kerupuk serta industri kreatif lainnya mulai tumbuh dan berkembang. Beberapa pelaku usaha mampu mencapai keuntungan jauh dari omzet sebelumnya.

Hasil Penilaian FIPO pada kategori pemerataan ekonomi, menempatkan daerah yang dipimpin Nurdin Abdullah, sebagai peraih award. Bantaeng meraih nilai total 579 poin, disusul Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 560 poin dan diurutan ketiga Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 537 poin. Kabupaten Pangkep menempati urutan keempat dengan total poin 521, disusul Kabupaten Wajo 491 poin sebagai nominator kelima. (*)



Kabupaten Luwu Utara

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Pemberdayaan Ekonomi

Berdayakan Masyarakat Melalui Koperasi Sistem Syariah

Peneliti: **DASMAN**

Kehidupan ekonomi masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan. Kesulitan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masih kerap terjadi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Luwu Utara, berinisiatif mengangkat taraf hidup ekonomi dengan melibatkan masyarakat. Menemukan jalan keluar atas masalah ekonomi yang dihadapinya.

Tertinggal secara ekonomi, Luwu Utara punya kiat tersendiri membangun ekonomi, khususnya masyarakat yang bermukim di daerah pesisir. Program pemberdayaan masyarakat koperasi pesisir sistem syariah adalah cara yang



dipilih untuk merealisasikan upaya tersebut.

Di mulai sejak tahun 2003, kabupaten yang memiliki luas wilayah 7.502,58 kilometer persegi, mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan program pemberian pinjaman modal usaha melalui



Koperasi Pesisir. Tujuannya untuk mengatasi keterbatasan modal usaha di kalangan masyarakat. Selain itu, inisiatif pemerintah mengembangkan program ini, merupakan upaya membuka lapangan kerja, menekan angka pengangguran yang berkontribusi pada perbaikan pemerataan ekonomi, di kalangan masyarakat miskin.

Program pemberdayaan Koperasi Pesisir merupakan bagian program lembaga ekonomi pengembangan pesisir (LEPP). Terletak di kota Masamba dan daerah Malangke Barat. Dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Modal tersebut diberikan dalam bentuk hibah. Meskipun penggunaannya tetap diawasi agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hanya saja dalam pelaksanaan program ini belum berjalan maksimal.

Beberapa tahun kemudian, Koperasi Pesisir sebagai pengelola mengalami kekurangan modal. Akhirnya pada 2007, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), juga sebagai dana hibah. Bukan hanya bantuan modal, pemerintah juga membantu pembangunan kantor cabang dan gudang distributor.

Sejak Koperasi Pesisir menangani penyaluran dana modal usaha, pengelola melakukan berbagai terobosan, seperti kemudahan masyarakat menjadi anggota koperasi. Calon anggota cukup mendaftarkan diri dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan mengisi formulir pendaftaran. Hanya menunggu satu hingga dua hari kartu anggota segera dicetak.

Torobosan pada teknik penyaluran modal cukup unik. Anggaran yang dikururkan pemerintah dari APBD, tidak langsung diberikan kepada masyarakat (nasabah). Tetapi dikelola Koperasi Pesisir dengan cara yang berbeda dengan koperasi pada umumnya. Harapannya agar anggaran dapat terdistribusi secara adil dan tepat sasaran.

Operasionalisasi penyaluran mengalami beberapa perubahan sistem. Awalnya Koperasi Pesisir menerapkan sistem penyaluran pinjaman modal dalam bentuk uang tunai. Namun dianggap kurang efektif karena masih ditemukan penggunaan modal tidak sepenuhnya dibelanjakan untuk menjalankan usaha. Hanya membeli kebutuhan konsumtif, yang berakibat usaha tidak berjalan.

Pertimbangan tersebut dijadikan alasan pihak pengelola koperasi mengubah sistem pinjaman dengan mengkonversi dalam bentuk barang. Semua kebutuhan usaha nasabah disiapkan koperasi, seperti kebutuhan pokok, sarana pertanian, dan alat kebutuhan nelayan. Keuntungannya, selain harganya murah, juga menawarkan pembelian dengan sistem kredit tanpa ada kenaikan harga sebelumnya. Semua bentuk pinjaman, koperasi menerapkan sistem tanpa bunga (sistem syariah). Upaya ini juga merupakan cara menghambat rentenir yang kerap merugikan masyarakat.

Berbagai variasi program dilakukan Koperasi Pesisir, menyediakan kebutuhan usaha masyarakat misalnya usaha kios. Masyarakat yang punya keinginan membuka usaha kios seperti jual beli kebutuhan pokok akan terlayani. Koperasi telah menyiapkan jenis barang kebutuhan usaha masyarakat. Kemudahan diberikan koperasi adalah setiap pembelian barang dalam jumlah banyak, akan diantar langsung ke tempat pelanggan.

Teknis pembayarannya pun dipermudah, nasabah yang masuk anggota diberi keringanan berupa pemberian pinjaman bagi yang belum mampu membayar tunai. Rentan waktu pelunasan dari satu hingga tiga minggu. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan akan dibagi kepada anggota setiap akhir tahun. Semakin besar jumlah transaksi, maka jatah pembagian sisa hasil usaha juga lebih banyak. Hingga sekarang penerima manfaat usaha kios tidak hanya berfokus ke daerah pesisir, tetapi sudah menjangkau masyarakat dataran tinggi.

Demikian halnya pada sektor penyediaan sarana pertanian. Animo masyarakat mengolah lahan pertanian cukup besar sehingga koperasi memanfaatkan peluang itu. Menyiapkan sarana pertanian untuk masyarakat. Sarana pertanian yang disiapkan seperti bibit jagung, pupuk dan pestisida. Sistem pembayarannya dilakukan setelah hasil panen terjual.

Sektor yang lainnya adalah pengembangan peternakan. Koperasi membeli ternak seperti sapi dan itik petelur. Sebanyak 12 ekor sapi dan 50 ekor unggas berupa itik petelur dibagi kepada masyarakat untuk dipelihara. Pembagiannya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Masing-masing mendapatkan 50 persen antara pihak koperasi dengan masyarakat peternak.

Bidang industri, koperasi memproduksi perahu fiber sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan dan petani rumput laut. Masyarakat yang berminat disiapkan berbagai variasi bentuk dan harga. Ada 4,5 juta hingga 5,5 juta per unit. Khusus bagi anggota, proses pembayarannya dipermudah dengan mengansur paling lama 12 bulan. Produksi yang dihasilkan sudah dipasarkan dalam maupun di luar kabupaten. Program pembangunan industri ini juga telah

mampu menyerap tenaga kerja dari alumni sekolah menengah kejuruan (SMK).

Program industri lainnya adalah membangun pabrik penyulingan nilam. Koperasi membeli hasil budidaya nilam masyarakat dengan harga yang fluktuatif dengan kisaran Rp3-4 ribu per kilo, disesuaikan dengan kualitas nilamnya.

Selain itu, koperasi juga melakukan kegiatan sosial. Setiap tahun di bulan ramadan, koperasi melakukan pasar amal. Belajar dari pengalaman, memasuki bulan ramadan harga kebutuhan pokok naik sehingga pengelola koperasi rutin menggelar operasi pasar dengan harga murah.

Agar program ini mampu berjalan eksis, pemerintah bersama pihak koperasi melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anggota. Sedangkan transparansi pengelolaan koperasi juga menjadi fokus perhatian. Setiap tahun melakukan rapat anggota dan evaluasi perkembangan program. Termasuk secara rutin, pihak pengelola koperasi mengadakan rapat dengan dewan pembina, menerima masukan bersifat konstruktif.

Program inovasi inilah mengantarkan kabupaten penghasil kakao itu, mengungguli nilai kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Sebanyak tiga kriteria penilaian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) menempatkan Luwu Utara meraih nilai tertinggi sebanyak 639 poin, disusul Bantaeng dengan total 630 poin, Luwu Timur dengan total 627 poin, Bulukumba sebesar 454 poin, dan Barru 541 poin. (*)



Kabupaten Jeneponto

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Layanan Pendidikan

Patta'ba Sekolah Unggulan Berbasis ESQ

Peneliti: **DASMAN**

Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang cerdas intelektual, emosional dan spiritual (ESQ). Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan menjadi wadah ideal untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini, dilakukan pemerintah Kabupaten Jeneponto, membangun sekolah dengan sistem pembinaan pendidikan secara komprehensif.

Setiap daerah selalu menjadikan peran pendidikan sebagai lokomotif utama penggerak pembangunan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kondisi berbeda ditemukan di Jeneponto,



pemerintah membangun sekolah yang mendorong penggabungan antara pengembangan iptek dan penanaman karakter moral anak, berdasarkan nilai kearifan lokal. Alasannya, pengetahuan harus memiliki batas nilai, agar manusia memanfaatkannya pada jalur yang benar.

Kabupaten Jeneponto memang bukan sebagai daerah percontohan pengembangan pendidikan di Sulawesi Selatan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, daerah pemilik luas wilayah 903,35 kilometer persegi ini, punya inisiatif program pengembangan kualitas pendidikan melalui sekolah Patta'ba. Definisi sederhana, sekolah Patta'ba adalah sekolah unggulan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) berada dalam satu tempat, melakukan pembinaan khusus pada pengembangan akademik dan pembinaan moral.

Didirikan sejak tahun 2007, sekolah Patta'ba berada di pusat kota sehingga masyarakat lebih mudah mengakses lokasinya. Sekolah ini diharapkan mampu melahirkan alumni yang siap berkompetisi di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sekaligus menjadi aset generasi bangsa berkualitas.

Sekolah Patta'ba, semua peserta didiknya merupakan siswa berprestasi pilihan. Proses seleksi masuk cukup ketat dengan berbagai persyaratan, misalnya predikat anak minimal peringkat lima besar di sekolah asal, mampu membaca Alquran, lulus tes bahasa Inggris, dan tes pengetahuan umum. Siswanya tidak hanya dari dalam kabupaten Jeneponto, tetapi ada dari Bantaeng dan Takalar.

Kedisiplinan siswa sekolah Patta'ba cukup besar. Meski lokasi sekolah tidak berpagar, tetapi tidak dijadikan peluang oleh siswa untuk bolos atau berkeliaran di luar jam belajar. Fasilitas ruang belajar sudah menggunakan teknologi seperti laptop dan LCD (infokus). Suasana belajar diatur agar tidak membosankan, sewaktu-waktu siswa belajar di luar kelas, melakukan pengamatan lingkungan sesuai materi pelajaran.

Sekolah Patta'ba memiliki tenaga pengajar yang direkrut dari guru beberapa sekolah di Jeneponto. Syaratnya memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional (mengajar). Kemampuan bahasanya pun jadi pertimbangan utama, misalnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Guru dikelas diharuskan menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah Patta'ba berbeda dengan metode sekolah pada umumnya. Suasana kelas dikelola dengan sangat baik dan menyenangkan. Jadwal belajar waktu pagi, fokus materi pengembangan diri, misalnya diskusi dengan menggunakan bahasa Inggris dan Arab khusus hari Selasa, Rabu dan Kamis. Waktu sore digunakan proses belajar mengajar mata pelajaran reguler (mata pelajaran ujian nasional). Menunggu mata pelajaran berikutnya, siswa tidak perlu meninggalkan sekolah. Pemerintah menyiapkan makan siang untuk siswa dan gurunya.

Hampir sama pada pembinaan pengembangan spiritual. Setiap hari siswa diarahkan ke Masjid, membaca Alquran sebelum salat duhur dimulai. Selanjutnya

mendengarkan kultum (kuliah tujuh menit) dari para siswa, digilir setiap hari per orang. Khusus pada hari Jumat, siswa dijadwalkan belajar tadarus Alquran.



Fokus

pemerintah lainnya yaitu penyediaan fasilitas asrama. Disiapkan bagi siswa yang ingin tinggal di sekitar sekolah, apalagi rumah tempat tinggal orang tua siswa jauh dari lokasi sekolah. Termasuk bagi siswa kelas III, diwajibkan tinggal dalam asrama mengikuti bimbingan belajar menyambut persiapan ujian nasional.

Uniknya lagi, di area sekolah Patta'ba dibangun sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) untuk anak berkebutuhan khusus (cacat). Tujuannya, membiasakan proses interaksi di sekolah antara anak cacat dengan normal. Keuntungannya, bagi anak cacat terbangun rasa percaya diri, sedangkan yang normal belajar menghargai kekurangan orang lain.

Hingga sekarang pemerintah mereplikasi sekolah Patta'ba kepada sembilan sekolah tingkat SMA dalam bentuk kelas. Sekolah yang ditunjuk melaksanakan program kelas Patta'ba yaitu SMAN 1 Binamu, SMAN 2 Binamu, SMAN 1 Tamalatea, SMAN 1 Batang, SMAN 1 Kelara, SMAN 1 Bangkala Barat, SMAN 1 Bangkala, SMAN 1 Bon toramba, dan SMAN 1 Turatea. Meski sistem pembelajaran kelas Patta'ba, belum sepenuhnya diberlakukan layaknya di sekolah Patta'ba.

Mekanisme program kelas Patta'ba pada dasarnya hampir sama dengan sekolah Patta'ba. Mulai seleksi masuk calon siswa, sarana prasarana, hingga proses belajar mengajar. Keseriusan pemerintah nampak, setiap tahun mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Hasilnya cukup menggembirakan, prestasi pada lomba akademik dan ekstrakurikuler banyak diraih. Demikian juga, alumni yang mendaftar di perguruan tinggi negeri, lulus 100 persen, termasuk mendapatkan beasiswa keperguruan tinggi Australia dan Jepang.

Program inovasi inilah yang mengantarkan Kabupaten Jeneponto meraih nilai tertinggi yaitu 663 poin. Disusul Gowa 609 poin, Takalar 579 poin, Palopo 575 poin, dan Bantaeng 573 poin. (*)

Kabupaten Luwu Utara

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Layanan Kesehatan

Parisai Panjaga, Solusi Kesehatan Lingkungan

Peneliti: **DASMAN**

Membiasakan masyarakat menjaga kebersihan harus segera dilakukan. Utamanya kebersihan lingkungan dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkomitmen mengupayakan hal tersebut. Mendorong masyarakatnya menyiapkan jamban pada rumah masing-masing, sebagai tempat buang air besar anggota keluarga.

Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) merupakan salah satu target prioritas program pemerintah kabupaten Luwu Utara. Di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, pelaksanaan STBM merupakan upaya menjaga keberhasilan lingkungan dari tinja manusia. Caranya, mengimbau masyarakat membuang air



besar di jamban.

Upaya tersebut, sebagai bentuk partisipasi masyarakat, menjaga kesehatan lingkungan, sekaligus menjadi tindakan preventif pemerintah, terjadinya penyebaran berbagai macam penyakit di masyarakat.

Diakui, kecenderungan masyarakat di daerah masih melakukan BABS, disebabkan belum memiliki jamban keluarga. Apalagi yang bermukim di sekitar pantai, aliran sungai dan daerah pegunungan. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui bahaya BABS terhadap kesehatan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi besarnya biaya pembangunan jamban menjadi penghambat masyarakat membuat jamban keluarga.



M e n g a t a s i keterbatasan anggaran m a s y a r a k a t , pemerintah berinisiatif menawarkan program arisan jamban keluarga (Parisai Panjaga). Program Parisai Panjaga merupakan upaya pengadaan jamban, pada setiap rumah tangga dalam bentuk arisan. Tujuannya, agar semua rumah tangga mudah memiliki jamban.

Digagas pada 2007, program Parisai

Panjaga ditargetkan mencakup semua rumah tangga, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jamban keluarga, dalam lingkup Kabupaten Luwu Utara. Meskipun tidak bersifat wajib, tapi dengan adanya program ini memberikan keringanan bagi mereka yang kurang mampu.

Pada dasarnya, program Parisai Panjaga lebih menekankan pada upaya membangun kesadaran masyarakat dan rasa memiliki. Proses pelaksanaannya membutuhkan waktu dan pelibatan penuh masyarakat, mulai perencanaan, pembiayaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dibanding daerah lain, banyak bangunan jamban malah dibiayai dan dibangun pemerintah (MCK) namun tidak terpakai.

Lambat tapi pasti, pelaksanaan program Parisai Panjaga dikerjakan melalui beberapa tahapan. Diawali musyawarah analisis kebutuhan masyarakat melalui musyawarah masyarakat desa (MMD). Tahapan pelaksanaan MMD bertujuan memberi penyuluhan kesehatan melalui survei mawas diri. Khususnya kepada

keluarga yang rawan sanitasi dasarnya (rumah tidak memiliki jamban). Pada kesempatan ini pula, masyarakat diberikan pemahaman teknis pembuatan jamban, yaitu jarak ideal antara letak jamban dengan sumur harus berjauhan.

Selain itu pemerintah melibatkan berbagai pihak. Harapannya, pemahaman dan pendampingan dapat berjalan rutin dan efektif. Pihak yang dilibatkan, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menghadirkan tokoh masyarakat sebagai panutan di lingkungan sosial, berperan menggerakkan masyarakat sebagai pelaku utama, dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar sehingga tercipta suasana yang nyaman. Sedangkan partisipasi tokoh agama, memberi penguatan bahwa hidup bersih menjadi prinsip dasar orang beragama.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dilibatkan saat penyuluhan dilakukan. LSM diharapkan dapat berkontribusi mencerdaskan masyarakat. Berupa memberikan materi penyuluhan dan pendampingan di masyarakat.

Langkah berikutnya, membentuk kader di setiap desa sebanyak 328 orang. Fungsi kader yaitu mendata semua kelompok, sekaligus upaya pendampingan kepada kelompok di setiap dusun. Jumlah anggota perkelompok sesuai kebutuhan.

Pembangunan dilakukan secara bergilir berdasarkan hasil undian. Mereka yang mendapat kesempatan dibuatkan jamban merupakan anggota masyarakat yang naik undiannya. Semangat gotong royong dan saling membantu diperlihatkan antara sesama anggota. Meski terkadang harus membutuhkan tukang ahli. Peran pemerintah menyiapkan alat cetak gorong-gorong. Alat inilah digilir kepada setiap kelompok.

Program Parisai Panjaga juga melibatkan pihak pemodal. Masyarakat setempat yang memiliki kemampuan modal, ikut membiayai pembangunan jamban di setiap anggota kelompok arisan. Perannya, menyiapkan material dan membangun jamban di setiap kelompok. Keterlibatan pemodal tersebut, dapat mempercepat pengadaan jamban masyarakat. Pembayarannya dilakukan secara kredit, menunggu sampai uang arisan terkumpul dari semua anggota.

Masyarakat bebas memilih jenis dan tipe bangunan jamban pesanan. Beberapa variasi harga jamban, mulai harga Rp185 ribu hingga Rp850 ribu. Disesuaikan kemampuan anggota kelompok di masyarakat.

Agar program Parisai Panjaga dapat berjalan maksimal, pemerintah melibatkan berbagai pihak, seperti pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para camat, dan kepala puskesmas. Bentuk komitmen itu dituangkan pada nota kesepahaman (MoU), sebagai bentuk kesiapan dukungan menyukseskan program. Bahkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadikan syarat kepemilikan jamban, untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di masyarakat.

Motivasi dan penghargaan kepada masyarakat yang sukses meraih status bebas buang air sembarangan (ODF) diberikan dalam bentuk publikasi desa ODF dan pemberian cendera mata. Hasilnya, sejak program dimulai hingga

2011, tercatat sudah sembilan desa berstatus bebas buang air di sembarang tempat (ODF) dan sebanyak 616 kepala keluarga menjalankan program arisan jamban keluarga.

Komitmen pemerintah dan masyarakat, menyukseskan program terus berlanjut. Apalagi kebiasaan arisan di masyarakat sudah lama tertanam. Bahkan dikalangan masyarakat bersepakat, walaupun program Parisai Panjaga telah selesai, tapi masih berlanjut rencana program pembangunan lainnya, yang dilakukan masyarakat dari uang hasil arisan.

Program inovasi inilah mengantarkan kabupaten dengan luas wilayah 7.502,58 kilometer persegi itu, meraih award parameter layanan publik pada indikator kesehatan tahun monitoring dan evaluasi 2012. Adapun nilai Luwu Utara sebesar 650 poin yang diperoleh dari tiga bentuk penilaian yakni inovasi, survei publik dan eksisting data. Bantaeng menduduki peringkat kedua dengan nilai 645 poin, disusul Sinjai sebanyak 620 poin, dan Enrekang memiliki selisih 35 poin dari Luwu Utara. Sedangkan Makassar hanya mampu meraih 594 poin, namun sudah masuk dalam kategori nominasi. (*)

Kabupaten Luwu Timur

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Layanan Administrasi
Kependudukan dan Perizinan

Tak Ada Kata Sulit dalam Pelayanan

Peneliti: **A. MATTINGARAGAU**

“Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit, jika bisa dipercepat mengapa diperlambat”. Motto inilah sebagai landasan operasional layanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Luwu Timur.

Keberhasilan KPPT Luwu Timur meraih OA kategori layanan administrasi kependudukan dan perizinan tidak terlepas dari konsep layanan yang dikembangkan selama ini. Hal ini sesuai dengan visinya yang menitikberatkan pada pelayanan prima dan misinya dengan peningkatan pelayanan menyenangkan, peningkatan kualitas SDM profesional, dan peningkatan kinerja yang baik.

Secara operasional, KPPT menggaransi layanannya dengan berkomitmen



apabila dalam pelaksanaan layanan perizinan tidak tepat waktu, maka KPPT siap mengantarnya ke alamat masing-masing. Komitmen tersebut dikuatkan dengan mengusung konsep layanan jemput bola dengan pola layanan perizinan *mobile* ke masyarakat.

Armada ini melayani pemohon baru maupun perpanjangan secara langsung. Pendaftaran dilakukan di lapangan dengan mengisi formulir pendaftaran dan perpanjangan terlebih dahulu, sedang proses penyelesaian dilakukan di kantor. Setelah surat izin selesai dibuat, diantar langsung ke pemohon. Penyelesaian surat izin diupayakan satu hari kerja, misalnya izin gangguan, SIUP, tanda daftar perusahaan, tanda daftar gudang, industri, apotek, dan optik. Demikian juga jika ada kesalahan terjadi, KPPT siap memperbaikinya dengan mengganti surat izin tersebut.

Selain melayani administrasi perizinan, juga melakukan sosialisasi tentang persyaratan, mekanisme perizinan, biaya, jenis layanan yang ditawarkan, dan penyelesaiannya memakan waktu satu hingga tujuh hari kerja. Pelayanan langsung ini telah dilakukan sejak 2010 dengan menggunakan sepeda motor, namun sekarang telah menggunakan mobil.

Terobosan-terobosan lain yang dilakukan selama ini berupa penambahan layanan perizinan dan non perizinan, dari delapan jenis menjadi 40 jenis. Hal ini membuktikan keseriusan pemda dalam mempermudah dunia usaha dalam



mempereoleh pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu. Peningkatan layanan ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah dari waktu ke waktu.

Pemberian fasilitas layanan tambahan juga dilakukan dengan

menyiapkan alat baca yang memungkinkan masyarakat pemohon tidak bosan diruang tunggu. Sedangkan pemohon yang ingin menggandakan kelengkapannya, disiapkan mesin fotocopy.

Berdasarkan nilai akhir, Luwu Timur mengantongi nilai dengan total skor 815 poin, mengungguli empat daerah lainnya yang harus puas sebagai nominator,

masing-masing Kota Palopo 751 poin, Kabupaten Bantaeng 621 poin, Kabupaten Maros 604 poin, dan Kabupaten Bulukumba 588 poin.

Keberhasilan ini membuktikan tingginya komitmen KPPT memberikan layanan perizinan dan non perizinan, dengan berpegang teguh pada prinsip. Seperti kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian prosedur, kepastian waktu, kepastian hukum, kemudahan akses, dan layanan. (*)

Kota Parepare

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Partisipasi Publik

Transformasi Musreimbang, Khasanah Baru Metode Perencanaan

Peneliti: **SAIFUL RIJAL YUNUS**

Kota Parepare terpilih sebagai jawara baru pada kategori partisipasi publik dalam parameter performa politik lokal Otonomi Awards tahun keempat ini. Maju dengan metode perencanaan dan penganggaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musreimbang) yang beda dan inspiratif, memberikan khasanah baru.

Tak terbilang dekade Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musreimbang) menjadi media pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya, disamping merangkul keikutsertaan masyarakat itu sendiri, partisipasi



yang diberikan secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan, maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Namun jauh panggang dari api, musrembang nyatanya seringkali hanya menjadi “ritual” tahunan, atau sekadar penggugur kewajiban. Keterlibatan masyarakat masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari tahun ke tahun. Akibatnya, perencanaan program tidak mendapat asupan gagasan variatif. Alih-alih program berjalan sukses, terkadang program malah dirongrong sendiri masyarakat.

Ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola musrembang, seperti kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

Data menunjukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran Kota Parepare hanya sekitar 15- 20 persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrembang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Lebih parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunann lainnya semakin menurun.

Tidak terjaringnya program-program yang diajukan juga terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan postur anggaran, program yang bertentangan dengan norma hukum, atau tren dan prioritas pembangunan daerah tidak sesuai dengan program, dan beberapa faktor lainnya.

Merangkum semua masalah di atas dalam sebuah kerangka program yang holistik dan multisektor, didesainlah sebuah program perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif, adil dan merata. Desain program ini mengusahakan hak usul masyarakat dalam musrembang terserap dan terakomodasi. Model program ini memberi kepastian dan jaminan program dan penganggaran yang diajukan dapat terealisasi nantinya.

Dalam praktiknya, model musrembang ini memberi nominal plafon anggaran pada setiap kelurahan yang akan digunakan untuk merancang dan menganggarkan program tahunannya. Nominal anggaran ini disebut pagu wilayah, yang terbagi dalam dua proporsi. Proporsi pertama diambil dari 50 persen pagu wilayah ini dan dibagi merata pada setiap kelurahan yang pada tahun 2011 nominalnya 1,06 miliar per kelurahan. Sedang sisanya dibagi berdasarkan variabel yang ada di wilayah seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan sebagainya.

Pagu wilayah merupakan bagian koheren dari pagu indikatif. Pagu indikatif itu sendiri merupakan jumlah belanja langsung daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Nominal anggaran dari pagu indikatif ini yang dikategorisasi lagi dalam pagu wilayah, setelah sebelumnya dikeluarkan belanja dinas dan sektoral berdasarkan target dan pencapaian sebelumnya.



Pada dasarnya, program ini tidak merubah akumulasi anggaran daerah. Desain program hanya mendistribusi anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada dinas dan sektor, menjadi milik kelurahan untuk dianggarkan pada perencanaannya. Akan tetapi, pelaksanaan dan implementasi dari program yang diusulkan, tetap ditangani langsung dinas atau badan terkait.

Sebagai contoh, pada model musrembang sebelumnya, dinas atau badan memprogramkan gerakan seribu mesin jahit dari dana indikatif yang diberi merata pada setiap kelurahan. Padahal tidak semua wilayah membutuhkan bantuan mesin jahit. Sedangkan desain baru memberi kebebasan setiap wilayah memprogramkan kebutuhan, merancang sendiri program-program yang diperlukan, namun tidak melepaskan tanggung jawab dinas atau badan terkait.

Guna kelancaran program, pemerintah mengangkat dan menugaskan fasilitator di setiap kelurahan. Mereka bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam mengidentifikasi dan merancang program berdasarkan masalah yang dihadapi. Selain itu, fasilitator juga bertugas memverifikasi program agar tidak keluar dari norma dan aturan hukum yang berlaku.

Selain fasilitator kelurahan, juga terdapat Forum Delegasi masyarakat (FDM) pada tingkatan kecamatan yang bertugas mengawal program yang diusulkan hingga mampu terealisasi dalam pengesahan kota. Mereka terlibat dalam pelaksanaan forum Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan musrembang kota serta memberi masukan dalam rencana kerja daerah, dan diberi ruang mengonsultasikan pembahasan Rencana Anggaran Pencapaian dan Belanja Daerah (RAPBD) pokok dan perubahan.

Forum ini secara aktif melakukan pendampingan terhadap program yang telah diusulkan masyarakat agar terakomodir sesuai dengan formasi program awalnya. Memantapkan tujuan tersebut, sejak 2 Maret 2011 diterbitkan nota kesepahaman (MoU) antara eksekutif dengan legislatif. Persetujuan ini memberi jaminan hukum program yang diusulkan akan terealisasi maksimal dalam

pengesahan anggaran kota, dengan klausula tidak cacat hukum dan tidak melebihi plafon anggaran yang ditetapkan di setiap wilayah.

Dalam dua kali masa penerapan musrembang berbasis masyarakat ini, menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Dari sisi partisipasi dan kehadiran masyarakat jauh lebih maksimal, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Untuk perencanaan tahun 2010, penerapan model musrembang ini telah mampu mengakomodasi kurang lebih 80 persen usulan program masyarakat, setiap kelurahan meningkat 15 persen sampai 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedang akumulasi realisasi anggaran wilayah Kota Parepare berkisar 4 miliar rupiah sampai 7 miliar rupiah, pada rancangan tahun 2011 melonjak drastis sampai 15,9 miliar rupiah.

Apresiasi pada program ini menjadikan Parepare meraih poin tertinggi pada kategori partisipasi publik, dengan nilai 722 mampu mengungguli 22 kabupaten/kota lainnya. Disusul Kota Palopo dengan 696 poin, Luwu Timur 635 poin, Gowa 597 poin dan Luwu Utara dengan 583 poin pada pemeringkatan lima besar. (*)

Kota Makassar

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Akuntabilitas Publik

Ombudsman, Awasi Pelaksanaan Layanan Publik

Peneliti: **IHSANUL AMRI**

Pelayanan publik menjadi hal yang penting, utamanya terkait dengan akuntabilitas. Kota Makassar sejak 2008 berkomitmen untuk memberikan pengawasan terhadap layanan publik dengan terbentuknya Ombudsman Kota Makassar.

Visi otonomi daerah adalah terdorongnya kreasi dan inisiatif daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara mandiri. Kemandirian tersebut terlihat dan terimplementasikan pada sejauhmana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat berimplikasi pada adanya akuntabilitas publik.

Dalam konteks ini, Makassar sebagai kota besar di Indonesia, tengah





mengarah pada kosmopolitanisme kota yang kian marak dan dinamis. Tingkat pertumbuhan ekonomi Makassar berdasarkan BPS mencapai 9,83 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang demikian, praktis menem

patkan Makassar pada dinamika ekonomi yang strategis pada level nasional maupun global.

Pertumbuhan ini terlihat pada semakin maraknya kegiatan (jasa) layanan di Makassar di sektor publik maupun swasta. Sebagai kota metropolis yang berkembang pada akhirnya identik sebagai kota pelayanan.

Pada titik ini, apa yang membuat kelembagaan seperti Ombudsman menjadi penting? Ketika terjadi konflik antara publik dengan pemerintah atau swasta dalam konteks pelayanan, Ombudsman menjalankan peran sebagai lembaga yang memediasi persoalan tersebut.

Di Makassar, ombudsman diarahkan tidak saja untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, tetapi juga mengawasi praktik bisnis beretika. Hal ini tertuang dalam peraturan Walikota Makassar Nomor 07 tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar.

Sejak didirikan, Ombudsman Kota Makassar (OKM) telah menerima dan menangani kasus yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sebanyak 27 kasus telah ditangani terkait dengan 20 instansi publik dan 7 dari sektor bisnis dan swasta. Tahun 2010 meningkat menjadi 77 kasus dan tahun 2011 terdapat 240 pengaduan yang masuk. Kecenderungan peningkatan pada jumlah pengaduan yang masuk dari masyarakat, memberikan gambaran eksistensi Ombudsman telah dikenal masyarakat.

Saat ini Ombudsman tengah mendorong upaya yang lebih pro aktif dari instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan pengaduan terhadap pelayanan publik, dengan terbentuknya unit pengaduan masyarakat di instansi masing-masing. Mekanisme inilah yang harus ditempuh ke depan sebelum melakukan pengaduan ke Ombudsman.

Dari lima nominasi program pada kategori akuntabilitas publik, Ombudsman Kota Makassar memiliki kelembagaan dengan mekanisme dan manajemen yang paling profesional jika dibandingkan dengan program-program lain pada indikator yang sama.

Ombudsman Kota Makassar mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan penilaian FIPO pada penilaian inovasi dan survei publik. Nilai inovasi adalah nilai yang diperoleh dari peneliti yang mengukur tingkat inovasi dan kadar terobosan daerah atas program yang dibuatnya. Wawancara mendalam dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi pintu informasi bagi peneliti untuk menelusuri inovasi dan terobosan tersebut. Hasil dari wawancara mendalam ini kemudian dikonfirmasi kepada 10 penerima manfaat program melalui survei inovasi yang dirangkaikan dengan survei publik.

Hasilnya, skor Kota Makassar dari akumulasi untuk ke dua komponen penilaian tersebut adalah yang tertinggi yakni 626 poin, bersaing ketat dengan Kota Parepare dengan nilai 624 poin, disusul tiga pesaing lainnya yaitu Kabupaten Maros, Palopo dan Luwu Utara. (*)

Kabupaten Maros

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Lingkungan Hidup

Pokmaswas bukan Sekadar Penjaga Pantai

Peneliti: **ANDI RISDAWATI**

Peduli akan lingkungan perairan bukan hal mudah. Kabupaten Maros yang memiliki daerah pesisir memperlihatkan kepedulian tersebut melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

Maros sebagai kabupaten yang memiliki pesisir dengan panjang garis pantai sejauh 31 km. Garis ini melalui empat kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten tetangga Kota Makassar ini. Sebagai daerah pesisir, Maros memberikan kontribusi besar pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan.

Sayangnya potensi tersebut sulit dikembangkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya kelautan



dan perikanan. Berbagai tindakan pemanfaatan potensi yang dilakukan masyarakat, malah menimbulkan pengrusakan bagi hayati laut, mulai dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penggunaan bom serta obat-obatan, konflik areal penangkapan antarnelayan, dan penebangan hutan bakau.

Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah menganggap perlu adanya pengelolaan sumber daya laut, melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Kelompok ini diberi nama kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk tahun 2008.

Dasar pembentukan pokmaswas adalah Undang - undang (UU) No. 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Salah satu pasalnya (pasal 67) menyebutkan, masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Pokmaswas dibentuk di sejumlah desa yang memiliki wilayah laut seperti kelompok Sipakatau di Kecamatan Bontoa, Kelompok Nisombalia di Kecamatan Marusu, Kelompok Minasa Baji di Kecamatan Maros Baru, dan Kelompok Sejahtera di Kecamatan Lau.

Pokmaswas melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap nelayan dan penggunaan bom serta obat-obatan, pengawasan areal penangkapan, dan pengawasan terhadap hutan bakau. Jika Pokmaswas menemukan ada penyimpangan terhadap aturan tersebut, mereka berhak melakukan peringatan, bahkan melaporkan hal tersebut kepada dinas dan aparat berwenang, untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Pokmaswas Kabupaten Maros merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan yang melibatkan tokoh masyarakat, nelayan dan pemuda. Kelompok ini secara bertahap meningkatkan kesadaran nelayan (masyarakat) untuk menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan.

Inovasi lingkungan hidup terkait perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan Maros mendapat apresiasi tertinggi karena besarnya manfaat dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program. Meski jumlah kelompok tergolong kecil, namun keaktifan kelompok menjadi salah satu bagian yang memberikan nilai tinggi atas prestasi yang diraih Maros. Di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga membentuk Pokmaswas, hanya saja keaktifan mereka masih rendah.

Kelompok ini juga mengupayakan pelestarian mangrove. Selama ini pemerintah menggalakkan program penanaman mangrove, namun tidak disertai upaya pengawasan. Akibatnya jarang bibit mangrove yang telah ditanam dapat bertahan. Pokmaswas mendapat tugas tambahan melakukan pengawasan terhadap areal penanaman mangrove. Hasilnya luas areal kawasan mangrove terus meningkat. Tercatat luas areal penanaman mangrove hingga 2012 mencapai 284,7 Ha.

Tidak semua kelompok difasilitasi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pengawasan. Pemerintah juga belum memberikan anggaran khusus untuk pengelolaan Pokmaswas.

Namun kepedulian mereka akan lingkungan pesisir, tak menyurutkan niat mereka untuk berbuat yang terbaik bagi kelestarian lingkungan. Kerja keras mereka membuahkan hasil, The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) menganugerahkan penghargaan otonomi awards kategori pelestarian lingkungan hidup. Kabupaten Maros meraih nilai tertinggi sebesar 575 poin. Disusul Kabupaten Pangkep sebesar 574 poin, Parepare 570 poin, Luwu 539 poin, dan Selayar 531. (*)

Kabupaten Enrekang

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Pengentasan Kemiskinan

Entaskan Kemiskinan, Maksimalkan Potensi Masyarakat

Peneliti: **DASMAN**

Kemiskinan masih menjadi momok menakutkan sebagian daerah. Diperlukan formulasi tepat agar dapat teratasi secara tuntas. Pemerintah Enrekang, punya inisiatif tersendiri mengangkat taraf hidup masyarakatnya dari kemiskinan. Memulai dengan mengidentifikasi, siapa orang miskin, dimana orang miskin, dan mengapa mereka miskin.

Peran pemerintah daerah mengeluarkan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan harus segera dilakukan. Termasuk pelibatan berbagai pihak yang diharapkan mampu berkontribusi, memikirkan dan mengentaskan kemiskinan

yang ada. Pembinaan rumah tangga miskin (RTM), merupakan program yang dipilih pemerintah Enrekang sebagai solusi pengentasan kemiskinan daerahnya.

Program pembinaan RTM merupakan upaya kolaborasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, mengidentifikasi dan menemukan solusi, penyebab kemiskinan sehingga secara berlahan masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Pengalaman selama ini, masyarakat miskin hanya dijadikan objek program tanpa mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat .

Dimulai sejak 2010, RTM yang dibina adalah mereka yang telah memenuhi syarat kategori miskin, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS). Namun pendataan di masyarakat diserahkan kepada kelompok Dasawisma di setiap desa yang ditunjuk pemerintah. Koordinasi kegiatan ditangani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Konsep pembinaan masyarakat miskin yang dilakukan Enrekang cukup unik. Penentuan calon binaan dilakukan secara acak di setiap kecamatan, agar bantuan terdistribusi merata. Diprioritaskan bagi masyarakat sangat miskin dan rumahnya sudah tidak layak huni.



Pembinaannya tidak hanya difokuskan hanya salah satu dinas, tetapi semua satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dilibatkan. Setiap SKPD diberi tanggung jawab membina tiga atau lebih RTM, tergantung kemampuannya. Sebelum melakukan pendampingan, pimpinan SKPD diharapkan mengunjungi rumah binaan. Tujuannya, melihat langsung kondisi lokasi, sekaligus membuka ruang komunikasi untuk mencari solusi pembinaan yang efektif, kepada rumah tangga binaan.

Bahkan ada sebagian SKPD menginap di rumah tangga binaan. Sebagai bentuk kepe-

dulian sosial, merasakan sulitnya hidup miskin. Saat kunjungannya itu juga, rumah tangga binaan diberi beras dan kebutuhan pokok lainnya.

Sumber anggaran yang dipergunakan SKPD bervariasi, lebih banyak bersal dari bantuan partisipasi pejabat dan PNS di lingkungannya. Meskipun tetap dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tetapi nilainya masih kurang. Kantor Ketahanan Pangan misalnya, mengumpulkan anggaran melalui kebijakan program infak dan sadakah untuk pejabat dan staf kantor.

Selanjutnya pemerintah membangun kemitraan sosial. Menjalinkan kerja sama dengan pihak swasta utamanya badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) seperti BRI, BNI, Telkom, Bank Sulselbar. Termasuk melibatkan para pengusaha yang bermukim di dalam dan luar kabupaten.

Jenis bantuan bervariasi, disesuaikan kebutuhan dan potensi masyarakat binaan. Penyaluran bantuan diprioritaskan dalam bentuk modal usaha dan pembangunan dan rehabilitasi rumah. Modal tersebut digunakan membuka usaha, seperti warung makan dan kios. Melalui program inilah masyarakat miskin mampu mandiri secara ekonomi. Bahkan diharapkan, mereka mampu membantu masyarakat miskin lainnya.

Bentuk bantuan lainnya, pemberian ternak kambing. Jenis bantuan ini diberikan karena permintaan masyarakat binaan, karena kebiasaannya memang beternak. Apalagi potensi lahan peternakan sangat luas. Ternak diberikan untuk dikembangkan sebagai penopang ekonomi kebutuhan jangka panjang. Pemberian semua bentuk bantuan yang bersifat jangka panjang didiskusikan dengan keluarga miskin yang akan menjalankannya, sehingga bantuan modal usaha yang akan diberikan dapat berkembang sesuai yang diharapkan.

Sejak program digulirkan, pemerintah berhasil membina RTM sebanyak 67 rumah tangga. Menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Masyarakat yang telah terbina ini tetap dipantau perkembangan ekonominya.

Komitmen pemerintah memaksimalkan pembinaan masyarakat miskin terus berlanjut. Tahun 2012, pemerintah menganggarkan kembali kuota 129 RTM. Jumlah kuota ini akan dibagi rata kepada setiap SKPD. Konsep pembinaannya sama dengan tahun sebelumnya. Partisipasi pihak luar tetap terbuka yang ingin membina masyarakat miskin di Enrekang.

Upaya mengentaskan kemiskinan yang tepat sasaran inilah yang mengantarkan kabupaten berjuduk Massenrempulu, mengungguli nilai kabupaten lainnya. Berdasarkan tiga bentuk penilaian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yaitu inovasi, survei publik, dan eksisting data, Enrekang meraih nilai 384 poin. Disusul kabupaten Wajo 340 poin, Pangkep 324 poin, Makassar 316 poin, dan Barru 315 poin. (*)

Kabupaten Kepulauan Selayar

Peraih Otonomi Awards 2012 Kategori Inspiratif

Kebijakan Pagu ADD, Inspirasi Pertumbuhan Ekonomi Desa

Peneliti: **DASMAN**

Anggaran dana desa sebagian daerah, hanya digunakan pada kegiatan belanja rutin pemerintah desa. Berbeda halnya kabupaten Selayar, membelanjakan anggaran alokasi dana desa (ADD) sebagai belanja rutin, juga menyisihkan untuk belanja infrastruktur dasar tingkat desa.

Sebagian besar wilayah Kepulauan Selayar, tersebar di beberapa pulau. Pemerataan akses pembangunan hingga ke pelosok desa mutlak dilakukan. Khususnya pembangunan pada sektor fisik. Pada sisi lain, kebijakan otonomi daerah mendorong perubahan paradigma pembangunan yang selama ini berfokus



di kota, berangsur dikembalikan ke desa secara seimbang. Sebab, peran pedesaan dalam membantu peningkatan ekonomi dianggap cukup strategis. Apalagi didukung dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan penguatan peranan desa. Selain menjalankan roda pemerintahan tingkat desa, juga dilibatkan membuat program pembangunan fisik dan non fisik.

Kebijakan tersebut dibangun melalui konsep program Pagu Alokasi Dana Desa (PADD). Pelaksanaan PADD memberi peluang dan kesempatan bagi pemerintah desa, menjalankan peran yang lebih konkret dalam pembangunan di berbagai sektor.

Konsekuensi pemberlakuan program ini mengharuskan pemerintah menambah anggaran ADD di setiap desa. Upaya ini bertujuan memberi kesempatan kepada setiap desa mengelola dan menggunakan anggaran ADD



yang dimilikinya. Tidak hanya untuk belanja rutin tetapi sebagian besar dapat membiayai pembangunan pelayanan publik, sosial dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.

Besarnya anggaran ADD yang diterima di setiap desa, bersumber dari dana alokasi umum (DAU), sebanyak sepuluh persen, sebelum dikurangi belanja pegawai. Hal ini, memberi keuntungan tersendiri bagi setiap desa karena jatah anggaran ADD semakin besar. Kebijakan PADD yang diterapkan pemerintah Kepulauan Selayar merupakan langkah strategis. Kepentingan masyarakat lebih mudah terakomodasi.

Selain itu, pelibatan masyarakat secara penuh pada setiap rencana program menjadi syarat utama. Prosesnya, diawali melalui rapat pembahasan, melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh agama, masyarakat dan pemuda.

Anggaran program pembangunan di setiap desa, tidak akan dicairkan sebelum melakukan rapat bersama. Dibuktikan dengan hasil notulen rapat dan daftar

hadir peserta. Hasil kesepakatan rapat menjadi program final, untuk diajukan ke Badan Pemerintahan Desa (Bapemdes), sebagai pedoman penganggaran tahun tersebut.

Bukan hanya pada tahap perencanaan, masyarakat juga berpartisipasi saat pelaksanaan hingga evaluasi hasil pembangunan. Bahkan saat pembangunan dilakukan masyarakat berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan materinya. Besarnya partisipasi masyarakat tentu menguatkan rasa memiliki hasil pembangunan yang ada. Termasuk memanfaatkan dan menjaganya secara bersama.

Sejak program PADD diterapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pembangunan fisik di berbagai sektor telah diwujudkan, seperti pembangunan dan perintisan jalan, pembangunan pasar desa, drainase, posyandu, rehabilitasi tempat ibadah, sarana pemerintahan desa, sarana olahraga dan bendungan mini.

Salah satu pembangunan yang sangat terasa manfaatnya adalah, pengadaan sarana air bersih. Terletak di Desa Laiyolo Baru. Program air bersih merupakan program hasil kesepakatan masyarakat dan pemerintah desa. Apalagi desa tersebut sejak dulu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mandi, mencuci maupun memasak. Air bersih disalurkan ke rumah-rumah masyarakat, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke masyarakat. Jumlah penerima manfaatnya sebanyak 156 kepala keluarga yang tersebar di dua dusun.

Pengadaan sektor fisik lainnya adalah penyediaan ambulance desa di Desa Bonea Makmur. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengantisipasi keadaan gawat darurat medis. Apalagi desa tersebut terletak di daerah terpencil jauh dari puskesmas dan rumah sakit. Pemerintah desa menyiapkan tiga unit mobil yang siap 24 jam.

Komitmen pemerintah menjalankan program PADD terus berlanjut. Dibuktikan, setiap tahun anggaran ADD mengalami peningkatan. Selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2010, total ADD yang dibagi kepada semua desa sebanyak Rp697 juta. Meningkat pada tahun anggaran 2011, sebanyak Rp4,521 miliar. Sedangkan ADD 2012, menembus hingga Rp6,124 miliar. Program inovasi inilah yang mengantarkan kabupaten dengan luas wilayah 903,50 meter persegi itu, sebagai peraih award pada kategori inspiratif. (*)





Bab 4

Penutup

Seminar Nasional.

**Semarak
Malam Anugerah
Otonomi Awards 2012.**

Seminar Nasional



Pembicara Seminar Nasional. Dari kanan-kiri Arismunandar (Rektor Universitas Negeri Makassar), Prima Setiawan (National Advisor Program Kinerja USAID), Kartini Saade (Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan), Abdul Madjid Sallatu (moderator)

PENGANUGERAHAN Otonomi Awards 2012 diawali dengan seminar nasional yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) kepada pemerintah daerah dan

masyarakat Sulawesi Selatan. Seminar nasional dengan tema” Kesiapan Daerah Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dilaksanakan di Hotel Sahid Makassar pada 30 Juni 2012.

Peserta seminar berasal dari kalangan pemerhati bidang pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, Dewan Pendidikan Sulsel, guru dan mahasiswa. Pembicara antara lain Rektor Universitas Negeri Makassar, Arismunandar, Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kartini Sa’ade, National Advisor Program Kinerja USAID, Prima Setiawan, dan FIPO diwakili Dasman. Jalannya seminar dipandu Abdul Madjid Sallatu.

Pembahas pertama, Dasman, memaparkan indikator penilaian FIPO sebagai dasar mengukur tingkat inovatif suatu program pendidikan, di antaranya aksesibilitas (murah, mudah, terjangkau dan merata), ketercukupan SDM, sarana, prasarana, manajemen dan sistem pendidikan, serta komitmen anggaran.



Peneliti FIPO, Dasman memaparkan temuan program inovatif hasil monitoring dan evaluasi (monev) FIPO bidang Pendidikan sepanjang tahun 2011 dalam Seminar Nasional Kesiapan Daerah dalam Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Menurutnya penentuan program daerah sebagai sebuah program inovasi memang tidak mudah. Butuh proses seleksi panjang berdasarkan indikator FIPO. Bentuk seleksinya melalui beberapa tahapan, diantaranya; wawancara mendalam dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), observasi lapangan, eksisting data dan pleno program.

Sesuai dengan tema seminar, Dasman menguraikan beberapa program inovatif untuk indikator pendidikan pada masing-masing isu strategis, antara lain;

- 1) Manajemen dan Sistem Pendidikan. Temuan program inovatif antara lain, program *moving class* sistem pembelajaran teknologi. Program ini merupakan upaya pemda mewujudkan pembelajaran yang aktif dan efisien di kelas. Menggunakan sistem *moving class* (kelas berpindah) dengan fasilitas audio visual yang bertujuan meningkatkan kualitas



Panitia seminar nasional melayani registrasi peserta yang sebagian besar berasal dari pemerhati masalah pendidikan yang merupakan utusan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

guru dan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, memiliki keterampilan hidup, positif mindset, dan jiwa nasionalisme yang tinggi, serta memahami kebudayaan lokal. Temuan program lainnya adalah Sekolah Moral. Di sekolah ini, siswa memiliki kemampuan kognitif di atas rata-rata dan moral yang terbina. Alumninya diharapkan menjadi generasi penerus berkualitas. Sekolah ini telah membuka program siswa yang berkemampuan khusus, yakni menyatukan anak berkemampuan khusus (cerdas) dengan anak berkebutuhan khusus. Tujuannya agar terbangun rasa kepercayaan diri bagi anak berkebutuhan khusus tersebut.

2) Komitmen Anggaran. Program yang ditawarkan adalah beasiswa miskin berprestasi dan bantuan dana infaq pendidikan. Komitmen pemerintah pada program ini cukup besar buktinya setiap tahun anggaran terus meningkat. Anggaran yang dikucurkan dari APBD tahun 2010, sebesar Rp400 juta yang tersalur ke 1500 siswa miskin berprestasi. Sedangkan alokasi anggaran 2011, meningkat menjadi Rp500 juta ke 2000 siswa. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah kecamatan untuk memberikan bantuan peralatan sekolah kepada murid SD.

Di bagian akhir pemaparan, Dasman juga menyampaikan hasil survei publik terkait dampak pelaksanaan otonomi daerah pada pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Sulawesi Selatan, diantaranya;

1) Peningkatan efisiensi pelayanan pendidikan yang terkait dengan lokasi sekolah yang semakin mudah dijangkau dan merata. Sebanyak 23 persen responden menjawab sangat baik, dan 64 persen responden menjawab Baik. Sedangkan 3 persen responden menjawab sangat tidak baik dan 10 persen



Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof Dr Arismunandar, M.Pd membawakan materi "SPM dalam Pengembangan Kurikulum.

responden menjawab Tidak Baik.

2) Peningkatan efisiensi pelayanan pendidikan yang terkait dengan daya tampung sekolah semakin memadai. Sebagian besar responden mengapresiasi secara positif. Sebesar 18 persen menilai sangat baik dan 62 persen mengatakan baik. Sedangkan 17 persen responden menilai tidak baik dan hanya 3 persen menilai sangat tidak baik.

3) Peningkatan efisiensi pelayanan pendidikan dasar dan menengah terkait dengan biaya sekolah semakin terjangkau. Sebanyak 18 persen responden menilai sangat baik dan 62 persen menilai baik, sementara 16 persen menilai tidak baik dan hanya 4 persen menilai sangat tidak baik.

4) Kesesuaian alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Sebanyak 12 persen responden mengatakan sangat baik, dan 58 persen mengatakan baik. Sedangkan responden yang berpendapat tidak baik dan sangat tidak baik, masing-masing sebanyak 25 persen dan 5 persen.

5) Kesesuaian jumlah guru, jumlah sekolah dan dan prasarana pendidikan. Sebanyak 13 persen responden menilai sangat baik dan ada 56 persen responden menilai baik. Sedangkan responden yang menilai tidak baik sebanyak 27 persen dan sangat tidak baik sebesar 4 persen.



Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Dr Halide bersama Komisaris Utama PT. Media Fajar, HM Alwi Hamu dan para peserta seminar serius menyimak pemaparan materi dari narasumber.



Prima Setiawan National Advisor Program Kinerja USAID menguraikan materi Kerangka Regulasi terhadap Penerapan SPM Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dari gambaran di atas, Abdul Madjid Sallatu selaku moderator memberikan refleksi bagaimana berjalannya program pendidikan gratis dengan implemetasi SPM di Sulsel. Moderator menegaskan apakah ada hubungan yang signifikan antara SPM dengan pelaksanaan pendidikan gratis. Dianggap perlunya SPM untuk naik kelas, karena dalam banyak realitas melaksanakan SPM, telah memberikan suatu kepuasan tersendiri, padahal itu adalah pelayanan yang “minimum”. Yang diharapkan sebenarnya adalah bukan sekadar “minimum”. Persoalan yang harus dijawab adalah “bisakah pendidikan gratis di Sulawesi selatan ini naik kelasnya, menjadi tidak sekadar SPM di waktu-waktu yang akan datang”

Arismunandar, rektor Universitas Negeri Makassar yang tampil sebagai pembicara pertama menyampaikan perlunya memperbaiki standar pendidikan mulai dari hulu. Memperbaiki kualitas hulu menentukan kualitas sumber daya yang akan mencetak tenaga-tenaga pendidik. Jika kualitas tenaga pendidik baik maka kualitas hasil didikannya juga akan baik.

Di bidang kurikulum yang harus dijaga oleh kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten harus bisa merencanakan dan melaksanakan proses koordinasi kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan. Pada umumnya kabupaten/kota sudah memiliki perencanaan yang tercermin dalam renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota namun belum semua melaksanakannya. Kemudian, fungsi-fungsi koordinasi dan penguatan masih belum terjadi dengan cukup baik. Fokus program kita sepertinya terlalu banyak untuk mencapai pendidikan gratis, tapi kita kurang bisa mendorong substansi-substansi penting di dalam kurikulum pendidikan itu.

Bagaimana dengan kurikulum-kurikulum muatan lokal? Pertama,

implementasinya tidak jelas. Terjadi pemaksaan terhadap murid untuk mempelajari bahasa daerah tertentu, di mana situasi kebahasaan di tempat itu beragam, namun atas alasan pemenuhan kurikulum muatan lokal, siswa dipaksa untuk belajar satu bahasa tertentu. Kedua, kurikulum mendorong keunggulan lokal. Daerah memiliki potensi yang beragam, ada yang potensial dengan perkebunan kakao, bisa dikembangkan industri coklat, ada potensi pertanian kopi, dan sebagainya, akan tetapi hampir-hampir tidak ada kebijakan untuk penguatan kurikulum yang dapat mendorong keunggulan lokal tersebut.

Untuk SPM di bidang kurikulum, problem yang paling besar sebenarnya terjadi di tingkat satuan pendidikan, ada dua masalah yang dihadapi; 1) Satuan

pendidikan menerapkan kurikulum sesuai peraturan yang berlaku. Secara administratif sekolah kita telah menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, akan tetapi secara substantif masih banyak guru kita yang belum paham. 2) Pemahaman tentang KTSP, Standar Kompetensi dan kompetensi dasar masih sangat bervariasi. Problem guru-guru di lapangan adalah banyak di antaranya yang belum memiliki standar kompetensi untuk menyusun dan merencanakan pembelajaran yang efektif dan kreatif.

Pada bagian lain, National Advisor Program Kinerja USAID Prima Setiawan, menguraikan kerangka regulasi terhadap penerapan SPM di bidang pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Regulasi terkait dengan SPM yang dianggap telah memuaskan, ternyata masih meragukan. Tahun 2013 disebut sebagai puncak pencapaian SPM, tapi rupanya



Kartini Saade (Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan) menyajikan materi Penyusunan SPM dalam Kerangka penganggaran Pendidikan di Sulawesi Selatan.



Seminar Nasional bertema Kesiapan Daerah dalam Penerapan SPM Pendidikan Dasar, dihadiri berbagai stakeholder otonomi antara lain Media Fajar, JPIP, Kinerja USAID dan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota se Sulawesi Selatan.

kesiapan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan SPM belum tercapai. Untuk itu menurut Prima USAID Kinerja fokus pada peningkatan SDM dengan distribusi guru yang proporsional dan biaya operasional satuan pendidikan.

Selain itu USAID Kinerja melakukan analisis secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan guru, komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, DPRD dan lembaga-lembaga yang peduli dengan pendidikan baik LSM maupun media dalam mengintegrasikan penerapan SPM dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai contoh pada penerapan SPM 7 mengenai kualifikasi guru SD/MI. Berdasarkan standar SPM setiap sekolah SD/MI minimal memiliki 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi S1. Kondisi saat ini terlihat ada kesenjangan. dari 572 sekolah ada 50 sekolah yang sama sekali tidak memiliki guru dengan kualifikasi S1, kemudian 163 sekolah yang hanya memiliki satu guru dengan kualifikasi S1, sehingga kebutuhan guru S1 mencapai 263 Guru. Melihat kesenjangan ini beberapa alternatif kebijakan anggaran yang bisa dilakukan adalah; Pertama, perekrutan guru baru dengan perkiraan biaya operasional mencapai 6,6 miliar/tahun. Kedua, peningkatan kualifikasi guru menjadi S1 dengan estimasi biaya mencapai 1,85 miliar. Ketiga, *redeployment* guru yang sudah S1 dengan estimasi biaya mencapai 263 juta.

Kartini Saade mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel memaparkan bahwa standar nasional dan kualitas pendidikan menetapkan spesifikasi input, proses, output dan outcome. Spesifikasi input dan proses dipakai sebagai pendekatan untuk memperkirakan output, sedangkan output merupakan kualitas pendidikan, efisiensi internal, dan relevansinya (efisiensi eksternal). Pada konteks input terdiri dari guru, kepala sekolah dan pegawai, kemudian kurikulum, buku dan media serta infrastruktur dan peralatan. Pada sisi proses meliputi bagaimana manajemen, keberadaan teknologi dan mekanisme evaluasi

pendidikan, dan output yang diharapkan berupa kompetensi lulusan, guru, kurikulum yang representatif dan proses belajar yang efisien dan memiliki relevansi terhadap perkembangan yang ada.

Pencapaian SPM menuju SNP (Standar Nasional Pendidikan) memperlihatkan kondisi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan kita pencapaian ini akan berakumulasi hingga pada pencapaian SNP tahun 2014. Pada pencapaian SPM terhadap sekolah SD/MI, standar nasional mengharuskan semua guru sudah S-1/D-IV, guru sudah tersertifikasi, adanya buku yang lengkap, sekolah memiliki laboratorium bahasa dan komputer serta memiliki tenaga administratif. Untuk kualifikasi guru S1/D-IV telah mencapai 16, sementara itu masih banyak sekolah tanpa guru yang tersertifikasi dan masih belum semua sekolah menyediakan buku untuk siswa.

Penyusunan SPM dilakukan dengan fokus pada layanan di tingkat pemerintah daerah/kandepag dan tingkat sekolah/madrasah. Penyusunan tersebut dimulai dengan mengembangkan SPM tingkat sekolah kemudian merumuskan implikasinya dalam bentuk SPM tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya SPM tingkat sekolah berisi indikator yang merupakan bagian dari keseluruhan indikator SNP yang memiliki daya ungkit terbesar bagi peningkatan kualitas. Untuk itu SPM disusun dengan komposisi yang mencerminkan perbaikan input dan proses secara seimbang dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah.



Semarak Malam Anugerah Otonomi Awards 2012



Kepala Diklat Kemendagri Tarmizi A. Karim, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Komisaris Utama PT Media Fajar HM Alwi Hamu, Direktur Democratic and Governance USAID Mr. Miles F. Toder berfoto bersama para Bupati/wakil bupati peraih Otonomi Awards 2012.

SEMARAK dan gegap gempita malam penganugerahan Otonomi Awards membahana tepat pukul 20.00 wita, sesaat setelah sejumlah dara-dara cantik nan jelita dari UKM Seni Tari Unhas tampil sebagai pembuka acara dengan membawakan Tari Tondok Maleke untuk menghibur sekira 500 undangan



Mr. Miles F. Toder, Director office of Democratic and Governance USAID menyerahkan trofi otonomi awards kepada Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani sebagai peraih penghargaan kategori Pemberdayaan Ekonomi.

yang memadati Ball Room Hotel Sahid Jaya Makassar

Acara yang dihadiri tamu kehormatan seperti Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang, Komisaris Utama PT Media Fajar HMA Alwi Hamu, Kepala Badan Diklat Kemendagri, Tarmizi A. Karim. Di jajaran meja VVIP hadir pula, Director Office of Democratic and Governance USAID, Mr. Miles F. Toder dan Deputy of Party USAID KINERJA,

Mrs. Jana Hertz.

Selain itu turut hadir pula beberapa bupati dan wakil bupati, diantaranya, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi, Bupati Maros HM. Hatta Rahman, Bupati Jeneponto Radjamilo, Wakil Bupati Selayar Saiful Arif, Wakil Bupati Luwu Timur Thoriq Husler, Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriyani, serta beberapa asisten dan kepala SKPD.

Tahun 2012 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan otonomi awards. Pada tahun ini FIPO menambah satu lagi indikator penilaian menjadi 10 indikator, yakni pengentasan kemiskinan. Adapun sembilan indikator lainnya adalah: pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan



Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang bersama peraih Otonomi Awards bidang Kehidupan Ekonomi; Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi (pemberdayaan ekonomi lokal), Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah (pemerataan ekonomi), dan Wakil Bupati Selayar Saiful Arif (pertumbuhan ekonomi).



Dari kiri-kanan: Agussalim Alwi (Wadirut Media Fajar Grup), Tarmizi A Karim (Kepala Badan Diklat Kemendagri), Agus Arifin Nu'mang (Wagub Sulsel) HM Alwi Hamu (Komisaris Utama Media Fajar) Hazairin Sitepu (CEO Radar Bogor) dan H.Syamsu Nur (Dirut Media Fajar Grup).

administrasi kependudukan dan perizinan, akuntabilitas publik, partisipasi publik dan lingkungan hidup. Tahun ini tercatat 19 kabupaten/kota yang meraih nominasi dibandingkan tahun lalu yang hanya 17 kabupaten/kota.

Di tahun keempat ini daerah penerima award pada parameter kehidupan ekonomi untuk kategori pertumbuhan ekonomi diraih Kabupaten Selayar, disusul Kabupaten Bantaeng di kategori pemerataan ekonomi dan Luwu Utara dalam pemberdayaan ekonomi. Di bidang layanan publik Kabupaten Jeneponto meraih nilai tertinggi di kategori pendidikan, lalu Kabupaten Luwu Utara di bidang kesehatan dan di pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan perizinan memunculkan Luwu Timur sebagai kabupaten terbaik setelah sebelumnya Kota Parepare meraihnya selama tiga tahun berturut-turut.

Di parameter performa politik lokal, Kota Makassar meraih award kategori akuntabilitas publik dan Kota Parepare dalam kategori partisipasi publik.



National Advisor Kinerja USAID, Prima Setiawan (tengah) bersama South Sulawesi Provincial Coordinator Kinerja USAID, Regional Coordinator IUWASH Budi Raharjo (paling kanan) dan sejumlah staf di malam anugerah otonomi Awards FIPO.

Lingkungan hidup tahun ini diraih Kabupaten Maros, sementara itu Kabupaten Enrekang keluar sebagai peraih penghargaan kategori pengentasan kemiskinan yang untuk pertama kalinya diberikan pada tahun ini. Kabupaten Selayar adalah



Pementasan Tari Tondok Maleke dari UKM Seni Tari Unhas yang menyemarakkan Malam Anugerah Otonomi Awards 2012 di Maraja Ball Room Sahid Jaya Hotel Makassar

peraih award program inspiratif dengan program Membangun Selayar dari Desa.

Direktur Utama Media Fajar Grup, H. Syamsu Nur dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Otonomi Awards sangat strategis menyebarkan program-program inovasi dan FIPO sebagai institusi pelaksana memiliki peranan penting dalam proses diseminasi tersebut berdasarkan beberapa faktor. Pertama, pada puncak pemberian awards yang dihadiri oleh sebagian besar bupati/walikota beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing bukan saja sebagai ajang unjuk “gigi” atas prestasi yang diraih, tetapi secara tidak langsung juga menjadi media bertukar informasi. Bukan tidak mungkin daerah yang belum berhasil menjadi peraih awards akan mencoba mencari informasi program peraih awards. Kedua, FIPO mempublikasikan secara berkala, sekali seminggu, program-program inovatif masing-masing kabupaten/kota. Publikasi melalui koran Harian Fajar tentu saja merupakan sarana paling efektif menyampaikan suatu program kepada masyarakat dan juga kepada daerah-daerah lainnya.

Di bagian akhir sambutannya, Syamsu Nur mengharapkan partisipasi dan dukungan semua pihak agar kegiatan otonomi awards di Sulawesi Selatan terus berkembang dan maju bisa diwujudkan.

Harapan dan apresiasi yang tinggi kepada FIPO juga disampaikan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang. Dalam sambutannya Agus menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada FIPO dan Media Fajar yang senantiasa menunjukkan keberpihakannya pada pencitraan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menjadi pemicu bagi daerah untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus beberapa kabupaten/kota di Sulsel yang berhasil menempati rangking dalam hal pengelolaan daerah, tidak terlepas dari peran FIPO dan PT. Media Fajar.

Penilaian positif juga disampaikan oleh Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi A Karim. Menurutnya, inisiatif yang diambil FIPO mampu

mengembangkan partisipasi masyarakat pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi bisa dicapai karena proses monitoring dan evaluasi kinerja daerah yang dilakukan secara transparan akan mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas, tidak hanya sebatas pada tahap pelaksanaan yang akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, tapi juga dalam tahap perencanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.



Tentang Penulis/Editor



**SUKRIANSYAH
S. LATIEF**

Direktur Eksekutif Fipo

Me
s
ki lembaga ini baru terbentuk tahun 2008 lalu, namun upaya untuk menghidupkan lembaga tersebut terus dirintisnya. Uki, begitu dia akrab disapa memulai karier di Harian Fajar sejak Tahun 1990 sebagai reporter, dan saat ini dipercaya sebagai Direktur Produksi dan SDM Media Fajar Grup dan Pimpinan Redaksi Harian Fajar. Kecintaannya pada dunia pendidikan tidak membuat dirinya berhenti pada jenjang pendidikan strata satu (S1) Strata dua (S2) dan S3 di bidang hukum terus digelutinya hingga berhasil meraih gelar doktor tahun 2009. Sebagai lembaga independen, Uki selalu menekankan agar para peneliti selalu menjaga independensi, kredibilitas dan kepercayaan. Dengan tiga hal tersebut, FIPO akan terus tumbuh sebagai suatu

lembaga yang akan mendukung tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat.

(sukriansyah88@yahoo.com)



BASIR KADIR

Direktur Program Fipo

L
ahir di Makassar 28 Pebruari 1968. Memulai karir sebagai wartawan di Harian Fajar hingga posisi redaktur pada beberapa desk. Jiwa peneliti yang kuat membuat ia diberi amanah sebagai Kepala Litbang Harian Fajar. Jelang kelahiran The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) 16 Juni 2008, ia dipercayakan untuk mengawaki lembaga baru tersebut.

Dalam perjalanannya, lembaga independen ini sudah empat tahun berturut-turut mempersembahkan Otonomi Awards kepada kabupaten-kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang pantas mendapatkannya melalui serangkaian penelitian, survei dan pengumpulan data sekunder.

(basirkadir@yahoo.com)



Tentang Penulis/Editor



NURDIN TAPPA

*Sekretaris Eksekutif
Fipo*

Lahir di Belawa-Wajo, 12 Februari 1974. Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini bergabung di Harian Fajar sebagai staf Penelitian dan Pengembangan pada Maret 2003. Tahun 2005 ditunjuk sebagai staf Lembaga Pengembangan SDM PT. Media Fajar. Di lembaga ini dia ditugaskan melaksanakan workshop, lokakarya dan kegiatan pelatihan bagi wartawan/karyawan Media Fajar Group agar menjadi insan-insan profesional yang cerdas. Berdirinya FIPO tidak terlepas dari peran pria yang hobi membaca ini. Saat The Fajar Institute of Pro Otonomi terbentuk, dia diberi tanggung jawab melobi beberapa lembaga donor untuk berpartisipasi pada kegiatan penelitian FIPO. Kerja kerasnya membuahkan hasil saat Pemprov Sulsel dan Canadian International Development Agency (CIDA) setuju untuk bekerjasama. Tekadnya yang besar untuk menyukseskan program-program FIPO membuat dia senantiasa bekerja penuh semangat.

(nurdintp_st@yahoo.com)



**ANDI
MATTINGARAGAU
TERIGAU**

Peneliti

Lahir di Sabbang-Luwu Utara, 13 Maret. Sewaktu mahasiswa dipercaya sebagai Ketua Badan Penerbitan Pers dan Jurnalistik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (BPPJ-PMII) Cabang Ujung Pandang periode 1997-1998. Tahun 1998 menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jurusan Akuntansi. Pernah bekerja di Perusahaan Daerah Luwu tahun 2000-2001. Tahun 2001 sebagai pengajar Universitas Andi Djemma Palopo. Alumni pada Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tahun 2003 ini pernah bekerja di PT. Industri Kapal Indonesai (Persero) Makassar 2004-2007. Sejak tahun 2008 hingga sekarang selain sebagai peneliti FIPO juga mengajar pada sejumlah perguruan tinggi. Saat ini juga mendalami Ilmu Ekonomi untuk Program

Doktor di Universitas Hasanuddin.

(andimattingaragau@yahoo.com)

Tentang Penulis/Editor



SAIFUL RIJAL YUNUS

Peneliti

Pelatih buku ini seorang putra Sinjai, lahir pada tanggal 6 Februari seperempat abad yang lalu. Memperoleh gelar sarjana di jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP-Universitas Hasanuddin tahun 2010. Sejak mahasiswa aktif di berbagai organisasi serta terlibat beberapa riset dan survey baik dari lembaga intra maupun lembaga ekstra kampus. Dipercaya menjadi peneliti di FIPO sejak tahun 2010 lalu, dan terus berusaha menjadi pembelajar.

(d.rijal_yunus@yahoo.com)



DASMAN

Peneliti

Lahir di Bulukumba, 13 Februari 1986. Menempuh pendidikan sejak SD sampai SMA di Kabupaten Bulukumba. Gelar Sarjana Pendidikan (S1) diperoleh di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Selama kuliah, aktif di organisasi kemahasiswaan dengan menjabat Ketua Umum Maperwa Civis Hukum Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Makassar (UNM), 2006-2007. Ketua Bidang Kaderisasi Study Club (SC) Al-Furqan, FIS UNM. Ketua Bidang Komunikasi Study Club Forum Study Islam Raudathul Ilmi, UNM, 2009-2010. Aktif di berbagai lembaga survei sosial, politik, dan Ekonomi. Bergabung di The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) akhir tahun 2010 sebagai staf peneliti.

(dasman.samang@yahoo.com)

Tentang Penulis/Editor



IHSANUL AMRI

Peneliti

Lahir di Batujai (Lombok Tengah) 15 Mei 1979. Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik di FISPOL Unhas pada tahun 2004. Saat ini sedang melanjutkan studi magister pada program studi Sosiologi di Pasca Sarjana Unhas. Pengalamannya dalam penelitian diawali ketika tergabung dengan lembaga *Active Society Institute (AcSI)* dan *IMDeV research Institute* di Makassar. Ke dua lembaga inilah yang kemudian mengantarkannya terlibat dalam berbagai survey oleh LSI (Lembaga Survey Indonesia), LP3ES, Puskapol-UI dan PSKK-UGM. Kerjasama dalam penelitian dengan lembaga donor juga pernah dilakukannya bersama *LGSP (Local Government Support Programme)* dalam program *Local Government Assesment (LGA)*. Pernah terlibat sebagai fasilitator dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Maros dan Mamuju Utara serta sebagai peneliti dalam studi pelimpahan kewenangan dari Kabupaten kepada kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara. Tahun 2012 tergabung sebagai peneliti FIPO (The Fajar Institute of Pro otonomy).

(esan_amri@yahoo.com)



A. RISDAWATI AP

Peneliti

Alumni jurusan matematika Universitas Negeri Makassar Tahun 2011 ini, lahir di Palopo tanggal 7 Oktober 1989. Di lingkungan kampus, sempat bergabung dengan Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Penalaran UNM dan dipercaya sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan pada periode 2010-2011. Keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan penelitian baik internal maupun eksternal kampus ketika masih kuliah, menjadi bekal sejak bergabung menjadi peneliti FIPO pada akhir tahun 2011 lalu.

(andirisda_ap@yahoo.com)



Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik sekaligus media sosialisasi informasi bahwa otonomi daerah adalah suatu kenyataan di Indonesia. Secara formal, otonomi daerah memang sesungguhnya diartikan sebagai penyerahan kewenangan pusat ke daerah, atau bisa disebut desentralisasi. Konsekuensi formal, tentu saja, daerah memiliki hak prerogatif untuk menjalankan administrasi pemerintah sendiri dan potensi yang dimiliki. Namun, secara substantif, makna otonomi daerah jauh dari sekadar terpenuhinya hak-hak otonomi yang demikian itu. Sejak diimplementasikan secara resmi tahun 2001 lalu, otonomi daerah telah memicu tumbuh suburnya praktik-praktik cerdas di daerah. Pemerintah daerah berada dalam ruang kebebasan mengekspresikan potensi yang dimilikinya. Menyiasati kekurangan dan memaksimalkan potensi, sekecil apapun potensi itu, adalah tindakan kreatif yang dalam sudut pandang FIPO biasanya disebut inovasi. Hasilnya, program inovatif yang digagas daerah jauh lebih efektif mengatasi masalah-masalah di daerah kelimbang program pusat. Memang pengalaman sentralisasi selama berpuluh tahun menjadi pelajaran berharga bahwa pusat (Jakarta) tidak mampu mendesain pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Jakarta tidak saja kurang memiliki informasi tentang potensi dan kebutuhan seluruh daerah, tetapi juga kurang memiliki koordine politik mendistribusikan potensi-potensi pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah.



The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) adalah institusi independen yang secara sungguh-sungguh dan terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. FIPO didirikan Hanan Fajar pada 18 Juni 2008, sewaktu setelah otonomi daerah resmi diberlakukan. Visi FIPO adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi kemajuan Sukses Setan. Sebagai penjabaran dari visi, FIPO mengembangkan misi yakni mendorong inovasi dan kreativitas pemerintah kabupaten dan kota agar bertanggung kemajuan berkebebasan dan berkebebasan berkemajuan (development of freedom and freedom for development). Karena itu, FIPO mengambil peran mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan praktik-praktik cerdas pada parameter kehidupan ekonomi, pelayanan publik, performa politik lokal, dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap tahun, FIPO mengapresiasi dan menganugerahi trofi Otonomi Awards kepada kabupaten dan kota yang memiliki kinerja terbaik pada setiap parameter.